

SUARA TANI

MADJALLAH RESMI „BARISAN TANI INDONESIA”.

ISI DIANTARANJA :

1. Pidato Tjokronegoro.
2. Konstituante.
3. Sedikit tentang gula.
4. Pembangunan desa.
5. Sambutan 25 th B.T.I.
6. Pidato Alimin.
7. Pajak Bumi hapus.
8. Perundingan ALS-PPM
9. Rol kaum Tani.



KONGRES B. T. I. KE III DI JOGJA.



DITERBITKAN OLEH :

**Sekretariat Bagian Penerangan
Dewan Pimpinan Pusat
BARISAN TANI INDONESIA.**

Alamat
Red. Adm.
Djajengprawiran 13 B.
JOGJAKARTA.

TERBIT 2 × SEBULAN

TAHUN V 25 NOV. 1950.



Berita Penerbitan.

SEPERTI kita permaklumkan dalam Suara Tani No. 7 jang lalu, untuk sekedar memperingati „5 tahun berdirinja B.T.I.” jang djatuh tepat pada hari ini tanggal 25 November 1950, maka „Suara Tani” nomer ini kita terbitkan „istimewa”, lain dari jang sudah2. Baik mengenai waktu terbitnja, banjaknja lembaran, dan isi serta gambar-gambarnja.

Mestinja Suara Tani No. 8 terbit tgl 15 November 1950, dan No. 9 tgl 30 November 1950 jang akan datang. Kedua nomer itu kita djadikan satu, kita terbitkan sekaligus hari ini. Ketjuali kita tuliskan dengan ringkas sedjarah B.T.I. semendjak berdirinja hingga sekarang, kita muatkan djuga sambutan2 dari kawan2 dengan potretnja, terutama para anggota/bekas anggota pimpinan B.T.I. Agar mendjadi kenang2an bagi para anggota B.T.I. chususnja dan pematja umumnja.

Begitulah niatan dan maksud kita mengatur penerbitan „Suara Tani” sekarang ini. Tetapi karena ternjata banjaknja kekurangan dan keketjewaan segala2-

nja, maka tidak mustahil, kalau hasilnja usaha ini belum memuaskan adanja.

Lagi perlu kita sebutkan, bahwa masih ada beberapa tulisan dan gambar2 jang terpaksa ta dapat kita muatkan disini, karena terlambat datangnja dimedja kita.

Demikianlah semoga segala kekurangan dan keketjewaan itu dapat kita maklumi bersama, sebagai bahan untuk memperbaiki langkah2 kita selandjutnja, dan mudah2an tidak mengurangi meriahnja hari peringatan kita „5 tahun berdirinja B.T.I.”.

Pimpinan Umum,
Redaksi & Administrasi.

Harga Madjallah Suara Tani:

Langganan : 5 nomer berturut2.....	f 5,—.
No. 8 — 9	á f 2,—.
Etjeran : No. 2 — No. 7	á f 1,25.
No. 8 — 9	á f 2,50.

BIAJA ADVERTENSI :

1 pagina	f 200,—.	¼ pagina	f 75,—.
½ ”	f 125,—.	1 cm-kolom	f 4,—.

Kontrak berdamai.

Agen „Suara Tani”/perantara advertensi
dapat potongan 20%.

TUNTUTAN B.T.I. TJAB. SEMARANG KOTA BERHASIL.

Panenpan musim ini, kaum Tani jang mengerdjakan tanah partikulir Maskapai „KEMBANGAN” telah mendapat persetudjuan dari fihak tuan tanah, — jang dulu2nja Tani harus setor hasilnja $\frac{2}{5}$ bagian tiap2 panenpan —, sekarang atas tuntutan B.T.I. hanja setor $\frac{1}{5}$ bagian sadja.

5 Tahun Berdirinja B.T.I.

KALI ini Suara Tani melukiskan kisah perjalanannya Barisan Tani Indonesia (BTI) selama 5 tahun. Tepat pada 25 November ini adalah hari ulang tahun yang ke 5 dari Barisan Tani Indonesia. Banjak pengalaman dan penderitaan selama 5 tahun itu, yang banjak juga memberi pelajaran kepada para pemimpinnya, untuk bekal memimpin golongan Tani sampai kepada tujuannya. Itupun kalau orang suka mempelajari dan mempergunakannya.

BARISAN Tani Indonesia berdiri atas kehendak mempersatukan segenap golongan Tani menjadi satu front, untuk bersama dengan golongan lainnya menunaikan tugasnya mempertahankan Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang telah kita proklamirkan 17 Agustus 1945. Sekali lagi kita ulangi „mempersatukan segenap golongan Tani“ untuk menentang tiap langkah kearah penjajahan kembali; karena kita insaf bahwa Tani hanya dapat diperbaiki nasibnya bila Tani itu didalam Negara yang Merdeka. Zonder kemerdekaan ta' mungkin kita memperbaiki nasib Tani, yang sedjak zaman feodal sampai zaman kapitalisme modern ini selalu menderita karena tekanan dari pihak lainnya.

Banjak kesalahan dan kesukaran yang didjumpai, karena rata-rata bersebojan „memimpin sambil belajar“! Apa sebabnya? BTI belum dapat dipimpin oleh Tani sendiri, jadi: „yang memimpin belum mengalami, sedang yang mengalami tidak dapat merasakan“. Bila sudah dapat dipersatukan antara yang mengalami dan dapat merasakan tentulah akan lebih mudah.

Selama 5 tahun ini sudah banjak perubahan dimana kawan yang dari golongan Tani turut memimpin dari Ranting sampai ke Pusatnya. Kalau orang mengatakan bahwa pemimpin BTI terutama Pusatnya, hanya sebagai amateur itu tidak benar, sebagian besar sekarang ini dari golongan Tani yang menderita, mereka mengalami menjadi orang Tani berdiam didesa, langsung merasakan bahwa orang menjadi Tani dari zaman penjajahan sampai yang dikatakan Merdeka tetap belum enak, lebih selama revolusi. Dapat mereka mengisahkan sejarahnya masing-masing. Yang memang berasal dari luar golongan Tani dikit-dikit diganti oleh Tani sendiri.

B.T.I. lemah, memang kita akui keadaannya sebagai juga dipimpin; di mana dan semangat masih serba lambat dan satu dengan lainnya tempat berbeda-beda. Dimana pemimpin tepat, seperti locomotif terpisah dari wagon, lari sendiri; dimana banjak perhitungan, Tani lebih tepat larinya si pemimpin tidak

jadi memimpin malah terseret. Mudah-tidaknya itu tidak tinggal menjadi tje-laan, tetapi siap juga untuk membetulkannya.

B.T.I. kurang tegas. Selama keadaan masyarakat Tani masih setengah-setengah tentu selalu kurang tegas, sebab didalamnya sendiri penuh pertentangan, tetapi tidak pada tempatnya bila pertentangan itu diperbesar, yg akhirnya hanya akan menjadi tumbukan antara Tani dengan Tani sendiri, sedang kewajiban untuk menghadapi luar masih berat. B.T.I. selalu berusaha dengan ada letusan dari dalam yg akibatnya hanya akan melemahkan diri sendiri, mengingat kenyataan yang bertentangan didalam; misalnya: ditentang Tani yang mempunyai tanah agak luas (belum dapat dikatakan tuan tanah) beribu-ribu Rakjat Tani yang tidak mempunyai tanah. Apakah tanah itu harus dibagi yang adil? Sehingga satu m² pun harus dibagi? Kita berpendapat sangat tolol! Kita ingin memperbaiki hidup si Tani, tidak lain kalau mereka ditjukupi alat produksinya ialah tanah; sedang tanah mereka sudah sangat sempit, bila masih harus juga dibagi, maka tentulah akan lebih menderita. Rupanya sudah kehilangan akal. Ditentang Tani yang menderita kekurangan tanah beribu-ribu ha tanah kosong baikpun kepunjaan negara maupun yang disewakan negara kepada onder-neming. Disini tidak akan kita kupas kesalahan pemerintah penjajahan dengan opendeur politiknya, sebab ini sudah nyata, kita hanya akan menunjukkan kegandjilan yang lain. Masih ada lagi, ditentang tempat yang penduduknya berdjedjal-djedjal dilain tempat sangat kekurangan tenaga untuk mengerdjakan tanah. Kalau orang tahu, untuk mengangkat derajat kehidupan Tani memang sangat berat. Tidak saja Tani itu membutuhkan tanah, tetapi juga sangat membutuhkan modal, sebab sudah sangat kotor-katjir hidupnya. Kewajiban yang berat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada organisasi Tani sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Belum banjak hasil perjuangan yang prinsipil a.l. baru: a. hilangnya pajak kepala didaerah Jogja, b. hapusnya kon-

versi didaerah Jogja/Surakarta, c. pendemokrasian desa didaerah Jogja dan d. hapusnya pajak bumi menjadi pajak penghasilan yang baru ini diterima bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi reform yang bertalian dengan soal prinsip banjak juga yang dihasilkan oleh daerah, misalnya mempertahankan perubahan tanah selama zaman revolusi, persewaan tanah th. 1949/1950 dll. Usaha kedua-lam, banjak yang mati sebelum berkembang, karena kita sangat kekurangan „kader Tani“. Usaha kedua adalah besar artinya bagi menebalkan kepertjajaan para anggotanya, sehingga merupakan kekuatan yang permanent, tidak roq2 asem (sementara surut). Terdapat di beberapa tempat hidupnya B.T.I., dimasa menjalankannya „tuntutan“, sehabis menuntut boleh dikata tidak kelihatan hidup. Terang ini tidak benar, kita harus mempunyai kekuatan yang teratur.

Masih ada lagi kesalahan yang prinsipiel, B.T.I. menganut paham perjuangan yang revolusioner, tetapi banjak hal yang hanya melabrak pimpinan diatasnya, dikatakan tidak revolusioner, lambat dsb., kelupaan bahwa kekuatan B.T.I. adalah pada massa Tani yang kita pimpin, sehingga massa sendiri harus bergerak; terang bahwa perjuangan yang selalu diserahkan keatas akan menjadi perjuangan parlementer — perjuangan reform — ditambah lagi pemimpin baru bergerak dan menjadi serem, bila ada pemilihan DPR. Ini menjalahi dasar perjuangan. Ada juga di beberapa daerah yang dapat menggerakkan massa, tetapi tidak berpegangan „pedoman“ yang telah dibuat bersama (Kongres), mungkin terburu nafsu atau ada faktor lainnya, inipun harus diperbaiki, sebab tiap program yang dibuat oleh Kongres adalah ditilik dari „faktor kekuatan yang ada pada massa itu“, bila faktor dan ontwikkelingnya masyarakat berubah, pada Kongres jad. akan diubah pula.

Pendeck ta' usaha kita rentang panjang soal ini, kesalahan, kechilafan, kelengahan, kebodohan dimasa yang lampau, hendaknya ditjatat benar-benar supaya membawa pelajaran yang benar untuk memimpin dan memperjuangkan nasib Tani. Setelah 5 tahun kita berdjalan, tidak saja kita selalu melihat kemuka, tetapi harus banjak pula menoleh kebelakang, sampai dimana dan bagaimana kekuatan kita. Sebab hanya dengan faktor kekuatan disertai pimpinan yang baik yang akan menentukan hasil yang memuaskan.

Tj.

Dari Organisasi.

BTI TJAB. KEDIRI.

KONFERENSI BTI Tjab Kediri tgl 17 sampai 19 Sept. '50 yang dikunjungi oleh 85 orang terdiri dari 11 koordinator Ketjamatan dan 32 Rantingnja memutuskan:

I. Organisasi:

1. Konsolidasi dan stabilisasi organisasi.
2. Menjiapkan kadervorming.
3. Pertemuan tertentu di Tjabang, Ketjamatan dan Ranting.
4. Pengiriman anggota Ranting ke Ketjamatan tertentu sebulan sekali dan menentukan anggota Pleno Koordinator (3 orang badan pekerdja).

II. Ekonomi.

1. Mengatur pembajaran padjag tanah dengan hasil bumi.
2. Mendirikan koperasi produksi (pupuk, bibit, alat2 pertanian, hasil2 bumi dll).
3. Mendirikan bank tani.
4. Mendirikan lumbung bibit dan patjeklik.
5. Memperbaiki peternakan/perikanan rakjat.
6. Mengadakan kebun2 bibit.

III. Sosial:

1. Mengadakan P.B.H.
2. Mengadakan C.P.H.
3. Mengatur perbaikan perumahan rakjat

IV. Umum.

1. Memperjuangkan lapangan agraria, dengan melalui Hukum.
2. Mempersiapkan adanya pemilihan umum (D.P.R.).

V. Pengesjahan Pengurus Tjabang.

BTI TJAB TRENGGALEK.

PADA tg. 24-9-'50, BTI tjabang Trenggalek semupakat dengan Keluargaanja, telah memindahkan djenazah alm sdr Djalahudin, bekas wakil Ketua BTI Trenggalek bersama dengan djenazah 2 orang anggauta Pesindo, yang menjadi korban terror ketika „peristiwa Madiun“. Perhatian dari instantie2, organisasi dan rakjat sangat memuaskan. „Salut kepada almarhum sdr. Djalahudin ts! Tidak ada korban sia2“.

BTI TJILIMUS.

KONFERENSI Koordinator BTI Ketjamatan Tjilimus tgl 30-9-'50 yang dikunjungi oleh 17 dari 20 rantingnja, Wk.2 dari: Djaw. Penerangan, Djaw. Pertanian dan Wk. Pemerintah (Wedono), bertempat di Sekolah Gadis Tjili-



S. SARDJONO.

mus dengan Pimpinan Sdr. M. Achjar, a.l. memutuskan:

Membentuk Panitia pelajaran dgn:
Ketua: Pak Dodo,
Wk Ketua: Sdr Machmud.

BTI TJAB KUDUS.

KONFERENSI BTI tjabang Kudus, pada tgl 21 sampai 22 Octobor '50. Sesudah mendengarkan pelaporan dari Pimpinan Tjabang, wakil2 ranting dan pendjelasan dari wakil Dewan Pimpinan Pusat mengenai keterangan azas, tudjuan, Anggaran Dasar dan Program, maka konperensi memutuskan:

1. merentjanakan program urgensi tjabang, antara lain mengenai:
 - a. pendirian badan pendjualan (verkoop-centrale) hasil bumi,
 - b. pendirian Bank Kredit Tani, kooperasi2 dan lumbung patjeklik,
 - c. perbaikan pengairan dan perlindungan terhadap bahaya bandjir,
 - d. menuntut supaya tanah2 yang belum terang kedudukannja (tanah Negeri dan tanah onderneming yang dibumi-hanguskan) yang sudah menjadi tanah garapan rakjat, tetap menjadi tanah garapan rakjat,
 - e. memperkuat tuntutan dongkelan,
 - f. memperkuat tuntutan penolakan kenaikan padjag bumi,
 - g. kursus2 ranting.
2. menjusun Dewan Pimpinan tjabang disesuaikan dengan bentuk organisasi baru.

BTI TJAB SEMARANG KOTA.

KONFERENSI BTI tjabang Semarang Kota, pada tg. 23-10-'50 sesudah menerima pelaporan dari ranting2 dan pendjelasan dari wakil Dewan Pimpinan Pusat, memutuskan:

1. merentjanakan adanya Panitia Aksi Penghapusan Tanah Partikelir yang dipelopori oleh BTI.
 - a. anggotanja terdiri dari perseorangan (bukan organisasi), yang menjadi korban penghisapan tuan-tanah (tani, buruh, pedagang, tukang).
 - b. matjam tuntutan:
Tanah Partikelir dihapuskan, Tuan tanah diberi kerugian uang. Tanah diambil kembali oleh Pemerintah dan dijual kepada rakjat yang berkepentingan (mendiami / mengerdjakan), dengan menitjil. Kepada bangsa Tionghoa dan Indo lainnja Warga negara Indonesia, supaya diberi djuga hak sama dengan bangsa Indonesia. Gedung2 milik tuan-tanah dan bangsa asing lainnja yang sudah didirikan, tidak boleh diganggu/dirugikan.
2. menjusun Dewan Pimpinan Tjabang, sesuai dgn bentuk organisasi baru.

BTI RANTING BANGILAN.

RAPAT BTI Ranting Bangilan tgl 7-11-'50 bertempat didukuh Ngrajung (Kedunghardjo) yang dihadiri oleh: anggota2nja, BTI Tjabang Tuban, Pamong2 desa, Pulisi Negara, a.l. membi-tjarakan masalah:

Koperasi, lumbung bibit, petjeklik dan lumbung padjag, pengairan.

PANITYA PENJELESAIAN TANAH.

PADA tg. 8-11-1950 dimulai djam 10 sampai djam 1 siang dipendopo Kabupaten Bojolali diadakan pertemuan yang terdiri dari: Pemerintah Kabupaten: wakil2 organisasi Tani (BTI dan STII sedang Petani tidak hadir); dari Buruh (Sarbupri); wakil2 Perusahaan daerah Bojolali (Sukabumi, Sukarame, Mlambong, Gondangwedelan); didatangi pula oleh Wakil dari Perekonomian dan Agraria Karesidenan Surakarta antara lain memutuskan:

Membentuk Panitia dengan nama: **Panitia Penjelesaian Tanah.**

Adapun pokok tudjuan:

1. Merobah politik agraria yang bertolak kolonial dirobah menjadi politik agraria yang demokratis sesuai dengan UUD 33 RI asli. Rentjana pertama, untuk memberikan besluit sementara kepada orang2 yg mengerjakan dan mendirikan rumah di tanah bekas Perusahaan.
2. Membentuk vrije aanplant yang pokoknya menguntungkan dan memajukan perekonomian Rakjat/Negara, baik bahan makanan maupun bahan export.

BTI TJAB BOJOLALI

KONFERENSI kilat BTI Tjab Bojolali tg 17-11-'50 dikundungi oleh utusan2 dari koordinator dan rantingnya sebanyak 136 dari 171 ranting yg mewakili segenap anggautannya, a.l. memutuskan:

1. Sdr Projotenojo sebagai koordinator,
2. Mengusahakan terbentuknya lembaga Buruh dan Tani,
3. Mengadjudkan resolusi tentang:
 - a. Tanah2 perusahaan/perkebunan2,
 - b. Tanah2 sangan yang dibeli oleh Pemerintah di zaman Djepang,
 - c. Tanah2 kehutanan yang telah dibongkar oleh Pem zaman Djepang,
 - d. Tanah2 bekas Pasar,
 - e. Tanah2 Recht v. Opstal (RVO),
 - f. Tanah v. Eigendom (RVE),
 - g. Sunan Grond (SG),
 - h. Pensiunan yg berupa tanah,
 - i. Tanah2 yang tidak mendapat ontjoran dan
 - j. Memperkuat/menjetudjui resolusi Panitia Gerakan Tanah Gesikan Waduk Tjengklik.

PENGUMUMAN D.P.P. B.T.I.

Kepada segenap Tjabang2 BTI diseluruh Indonesia.

MOSI Moch. Tauchid cs. tentang pajak bumi, sebagai yang sudah diumumkan kepada segenap Tjabang2 dan penjelasannya sudah dimuat dalam madjallah Suara Tani no. 5 dan 6 telah diterima dengan suara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakjat R.I. dalam sidangnja pada 3 Nopember 1950.

Penerimaan mosi tersebut berarti:

1. **Pajak bumi bagi Rakjat Tani dihapuskan, diganti dengan pajak penghasilan.** Pemerintah sendiri telah menyatakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa mulai tahun 1951, sudah tidak berlaku lagi peraturan pajak bumi, dan akan berlaku **peraturan pajak penghasilan**. Dengan berlakunya peraturan pajak penghasilan ini, maka menurut perhitungan Pemerintah sendiri yang dikemukakan dalam DPR, kira2 80% dari Rakjat Tani di Djawa akan bebas dari pajak penghasilan tanahnja, atas dasar perhitungan bahwa me-

reka berpenghasilan kurang dari ukuran penghasilan yang dapat dikenakan pajak.

2. **Kenaikan pajak bumi th. 1950.** menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 1 April 1950 no. P.B. 5-1-1 yang besarnya menjadi 2 a 3 kali lipat, **dihapuskan**. Artinja, buat tahun 1950 Tani hanya membayar pokok pajak yg lama saja. Pokok pajak ini masih menjadi kewajibannya Rakjat Tani utk dibajarnya.
3. **Siapa yang sudah membayar kenaikan pajak** itu sepenuhnya atau sebagian (sudah melebihi pokok pajak lama).

akan menerima kembali uangnya itu.

4. Tentang tjara dan waktunya penerimaan kembali uang kelebihan itu, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan Djawatan2 yang bersangkutan. Mengingat kesulitan2 teknis administratif serta keadaan pada waktu ini, maka pengembalian kenaikan itu akan memakan tempo.
5. Atas keichlasan orang2 yang berhak menerima kembali uang itu, dapat juga uang itu dipergunakan untuk fonds pembangunan desanja masing2. Jogjakarta, Nopember 1950.

D.P.P. B.T.I.

Komite Besar Penghapusan Tanah Partikular Kota Pradja Semarang.

KOMITE Besar Penghapusan Tanah Partikular Kota-Pradja Semarang yang dibentuk oleh wakil2 organisasi rakjat/party2 dan R.T.2 di Kota-Pradja Semarang dengan dipelopori oleh Dewan Pimpinan Tjabang Barisan Tani Indonesia Semarang Kota pada tanggal 12 Nopember 1950, dalam rapatnja tgl. 16 Nop. 1950, telah mengambil resolusi sebagai berikut:

MENGINGAT:

1. Tanah2 yang didiami atau digarap/dikerjakan untuk bertjotjok tanam oleh rakjat dalam Kota-Pradja Semarang sebagian besar adalah Tanah Partikular.
2. Tanah2 tersebut dikuasai oleh Tuan2 Tanah dan menjadi miliknya telah berpuluh2 tahun hingga sekarang masih tetap berlaku/langsung.
3. Peraturan Tanah Partikular di daerah Kota-Pradja Semarang hingga sekarang belum mendapat perhatian yang njata dari pemerintah.

MENIMBANG:

1. Bahwa masih berlakunya Tanah Partikular dalam Negara Merdeka sekarang ini sangat tidak beralasan, karena peraturan tersebut adalah akibat politik Agraria Kolonial Belanda yg paling djahat yang oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sendiri diakui, selanjutnja setjara berturut2 mulai tahun 1910—1940; pemerintah Hindia Belanda membeli kembali.
2. Bahwa adanya hukum tanah demikian, bukan saja memberatkan beban penderitaan rakjat terutama kaum tani, tetapi juga politis hilangnya kekuasaan pemerintah Negara didaerah tsb. dan hapusnja hak2 Demokrasi Rakjat, karena Tuan2 Tanah dapat leluasa membuat peraturan2 sendiri zonder kontrol dari pemerintah dan leluasa pula mengadakan terror persewaan/pajak tanah yang

setinggi2nya terhadap yang mendiami/kaum Tani yang mengerjakan.

3. Bahwa akibat perang Kemerdekaan yang berulang2 yang dibejainja dipikulkan kepada Rakjat terutama kaum Tani, sehingga sekarang rakjat terutama kaum Tani masih sangat menderita harta benda dan jiwa yang berat. Sesudah perang selesai Rakjat terutama kaum Tani belum dapat menerima hasilnya kemerdekaan, sebaliknya bahkan masih saja dibiarkan oleh pemerintah untuk menjadi sasaran penghisapan dari beberapa golongan yang tertentu terutama Tuan2 Tanah, ini adalah sesuatu tindakan pemerintah yang sangat tidak adil.
4. Bahwa yang tersebut fatisal2 diatas psychologis sangat melukai perasaan hati rakjat, yang akibatnja tentu saja mengurangi/akan menghilangkan kepertjajaan rakjat terhadap pemerintah.

MEMUTUSKAN:

1. Mendesak kepada pemerintah agar dalam waktu yang sesingkat2nja pemerintah bertindak untuk menghapuskan tanah2 partikular atau dengan perkataan segera *Menasionaliseer* tanah2 tersebut, dengan tjara membeli kembali/memberi kerugian kepada Tuan2 Tanah.
2. Membagi2kan tanah2 tersebut kepada rakjat yang sekarang ini berdiam di situ atau/ dan kaum tani yang menggarapnja.
3. Komite Besar Penghapusan Tanah Partikular sanggup menanggung segala konsekwensinya untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tersebut fatisal 1 dan 2 (Memutuskan).

Semarang, 16 Nop. 1950.

Penghapusan Tanah Partikular
Komite Besar Kota-Pradja Semarang.

MEMPERINGATI:

5 Th. Barisan Tani Indonesia.

25 Nopember 1945 sampai 25 Nopember 1950.

DALAM menjusun tjatatan riwayat perdjalanannya Barisan Tani Indonesia kami djumpai kesulitan², disebabkan tidak adanya bahan², karena banjak tjatatan² dan archief habis dibumi-hanguskan pada waktu agresi Belanda ke II. Karenanya banjak tjatatan dalam riwayat ini didasarkan atas ingatan dari orang² yang terus-menerus mengalami sedjak lahirnya sampai sekarang.

Tentulah terdapat banjak hal yang tertjertjer.

(Penjusun).

BARISAN TANI INDONESIA LAHIR.

KESIBUKAN RAKJAT INDONESIA dalam menjambut Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 berupa kesibukan dalam menjusun Organisasi, baik yang berupa organisasi Pemerintahan, maupun organisasi perdjjuangan, untuk meneruskan perdjjuangan mempertahankan Kemerdekaan bangsa, sebagai djalan mentjapai tjita², yang penuh dan lengkap. Disusunnya Komite Nasional sebagai badan perdjjuangan dan pembantu Pemerintahan, dari Pusat sampai kedaerah², bahkan sampai kedesa². Disamping itu berdirilah organisasi massa, jg akan menjusun kekuatannya sebagai alat perdjjuangannya.

Disamping organisasi bersendjata sebagai kekuatan untuk melawan tiap² maksud mendjajah kembali, serta untuk merebut kekuasaan dari tangan imperialis yang masih ada, djuga untuk mempertahankan yang sudah direbutnya, berdiri djuga organisasi Pemuda, Buruh pada waktu dan bermaksud sama, mempertahankan dan mewujudkan maksud yang dikandung dalam isi Kemerdekaan.

Lahirilah disamping organisasi Buruh dan organisasi perdjjuangan lainnya, satu organisasi Tani, yang lahir karena dorongan keinsjafan bahwa:

1. Revolusi bangsa Indonesia yang meletus sedjak 17 Agustus

1945, adalah revolusi segenap Rakjat Indonesia, yang akan melepaskan dirinya dari kungkungan kemiskinan dan kemelaratan yang sudah diderita berabad²:

2. Bahwa untuk mentjapai maksud itu, seluruh golongan dalam masyarakat harus ikut serta dalam revolusi;

3. Bahwa untuk melaksanakan dan mentjapai semuanya itu Rakjat harus berorganisasi untuk menjusun kekuatan sebagai alat perdjjuangan.

4. Bahwa golongan Tani adalah golongan yang paling besar diantara bangsa kita, yang karenanya harus turut mengambil bagian yang tidak ketjil, sebagai golongan di Indonesia yang paling menderita.

Itulah diantaranya yang mendorong lahirnya organisasi Tani pada waktu itu, yang hampir² orang melupakan.

Timbullah keinsjafan tentang ini diantara beberapa saudara yang kemudian mengambil inisiatif utk mendirikan organisasi Tani (diantaranya: sdr² Hadisiswojo, Ismail, Sumarsono, Pronoasmoro, Karjodihardjo, Moch. Tauchid), dengan nama Barisan Tani Indonesia, disamping Organisasi Buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia (BBI).

PADA permulaan bulan Oktober 1945 (satu setengah bulan sesudah proklamasi), mereka menjampaikan kehendaknya kepada kawan² yang lebih banjak lagi Sdr² Wijono, S.A. Sudibjo,

Sajoga dan Tasman, mengadjak mereka bersama² mendirikan Barisan Tani Indonesia. Sesudah bulat pendapat mereka, diundanglah pada 8, Oktober 1945, orang² yang dianggap dapat mewakili golongan Tani dari seluruh daerah Jogjakarta, dan terdjadilah Konferensi di Jogjakarta yang dikundjungi oleh lk 25 dari segenap pelosok didaerah Jogjakarta. Dalam Konferensi itu diuraikan oleh Sdr. Moch Tauchid tentang kedudukan Tani dalam masyarakat Indonesia sebagai Negara agraria, keadaan Tani didjaman feodal, selanjutnya keadaan Tani didjaman pendjajahan Belanda dan Djepang, dan seharusnya kedudukan Tani dalam Indonesia Merdeka, kewajiban Tani dalam masa revolusi disamping Buruh dan Tentara serta Pemuda, dan keharusan berorganisasi bagi Rakjat Tani dalam menudju tjita²nja. (Uraian itu kemudian didjelaskan dalam resepsi pada penutup Konferensi di Balai Mataram, dimuka utusan² organisasi dan Djawatan², dan isi uraian ini yang kemudian dibukukan mendjadi buku „Perdjjuangan Tani“, yang ditjetak pada bulan Maret 1946).

Sambutan dari chalajak besar sekali. Konferensi menjetudjui sepenuhnya berdirinya organisasi Tani dengan nama Barisan Tani Indonesia, serta mengesahkan rentjana keterangan sikap serta A.D. dan A.T.-nja dan tersusunlah Pengurus BTI Jogjakarta:

Ketua: Wijono Surjokusumo.

Wakil Ketua: Hadisiswojo.

Ponitera: S.A. Sudibjo, Sumarsono.

Organisasi: Sajogo, Pronoasmoro, Ismail, Sunarjo,

Pen/Pend: Moch Tauchid.

Sosial/Ekonomie: Suradi.

Perdjjuangan: Tasman, Karjodihardjo,

Badan Penasehat: Ir. Purbodiningrat, K. R. T. Taniprodjo, Mustakim, R. M. Surjopranoto, Drs. Danuhusodo dan Mr. Sajid Mangunjudo.

Kemudian menjusul Sdr S. Sardjono, yang lalu duduk sebagai Wakil Ketua I dan Sdr Hadiswojo sebagai Wakil Ketua ke II (Ketua Harian). Sdr S. Sardjono juga merangkap Ketua Bag. Perjuangan.

Pembentukan organisasi kepe-losok2 berdjalan sangat lancar, dan mendapat sambutan dan bantuan dari segenap badan2 dan Djawatan Pemerintah serta KNI.

Dalam satu bulan sadja nama BTI sudah tersiar diseluruh pelosok. Dan dalam waktu satu setengah bulan BTI Daerah Jogja sudah dapat memulai pekerdjaannya, yang dapat ditjatat:

1. Usaha kearah pendemo-krasian Pemerintahan desa, dengan membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Kelurahan, yang kemudian peraturan yang diadakan oleh BTI itu disahkan oleh KNI Daerah Jogja menjadi Maklumat Pemerintah Daerah.

2. Bersama2 dengan KNI Daerah bag. Kemakmuran menetapkan harga pendjualan padi oleh Rakjat Tani kepada Pemerintah, yang selanjutnya BTI menuntut hapusnya kewadajiban penjerahan padi dari Rakjat kepada Pemerintah sebagai landjutan peraturan djaman Djepang.

- * 3. Telah mengeluarkan madjallah Suara Tani dengan bahasa Indonesia dan Daerah, dengan oplag 20.000 (dua puluh ribu) exemplar yang kemudian oleh Konggres Tani dijadikan madjallah resmi BTI seluruhnya.

4. Membuka konsultasi Biro, yang dipimpin oleh Mr. Sajid Mangunjudo dan Ir. Purbodiningrat.

Berita berdirinya BTI Jogja tersiar dengan melalui radio, surat2 kabar, dan segera diikuti oleh daerah2, sedang daerah2 yg sudah terdiri organisasi Tani lain segera berhubungan dengan surat-menjurat. Dari surat2 yang di-

terima itu, ternyata bahwa didaerah2 sebagian organisasi Tani didirikan baru, ada pula meneruskan Noogyokumiai di Djaman Djepang, dan ada pula yang menghidupkan kembali sematjam Rukun Tani Parindra' dulu. Bermatjam2 ragam sifat dan bentuknya, tetapi satu hal sudah pasti, bahwa semua itu sebagai tanda **perwujudan kebangkitan berorganisasi dari Rakjat** dalam melaksanakan revolusi. Hubungan diantara daerah2 itu kemudian mendorong mereka untuk mempersatukan organisasi2 didaerah menjadi satu organisasi yg besar.

DALAM Konggres „Buruh dan Tani” yang diadakan di Surakarta pada 5 sampai 7 Nopember 1945 organisasi2 Tani serta persiapannya mendapat undangan dari Kementerian Sosial Djakarta. Konggres Buruh dan Tani yang dilangsungkan disociet Habiprodjo Surakarta di-kundungi oleh kira2 2000 orang wakil2 kaum Buruh dan Tani dari seluruh daerah, yang kemudian melahirkan Partai Buruh Indonesia (PBI), ternyata bahwa dari wakil2 Tani tidak diberi kesempatan untuk berbitjara dan tidak ada atjara untuk membitjarakan soal Tani, karena umumnya orang menganggap bahwa soal Tani sudah termasuk dalam lingkungan Buruh. Dan hal ini ternyata kemudian, bahwa ada beberapa daerah Serikat Tani menjadi bagian dari BBI ada pula Serikat Tani yang minta pengesahan (pengakuan) dari BBI. Wakil2 Tani yang datang disitu merasa ketjewa, dan menganggap tidak perlu untuk terus mengikuti Konggres „Buruh dan Tani” yang tidak membitjarakan soal Tani. Dalam pertemuan di hotel Merdeka Solo, pada tanggal 6 Nopember 1945, wakil2 Tani yg datang di Surakarta memutuskan untuk mengadakan Konggres sendiri yang melulu membitjarakan soal Tani dan organisasinya. Keputusannya:

1. Konggres Tani akan diadakan di Jogjakarta pada 22 sampai 25 Nopember 1945.

2. Penjelenggaraan Konggres diserahkan kepada BTI Jogja.

3. Jang diundang segenap organisasi2 serta persiapan organisasi2 Tani diseluruh Indonesia.

4. Jang dibitjarakan: a. Organisasi Tani, preadviz diserahkan BTI Jogja, dan b. Koperasi oleh wakil dari Djawa Barat.

Dengan melalui siaran radio, surat2 kabar serta undangan melalui KNI Kabupaten diseluruh Djawa (hubungan keluar Djawa belum dapat), dalam tempo 2 minggu persiapan, dapat datang dalam Konggres di Jogjakarta 56 wakil dari masing2 Kabupaten dan banjak penindjau dari tempat2 ketjil lainnya, dengan jumlah pengundjung semua 300 orang. Sambutan dari masyarakat, dari badan2 perjuangan dan djawatan memuaskan, sumbangan alat2 dan biaja tjukup besar. Konggres dilangsungkan dipendapa museum Sono Budojo, dipimpin Sdr Moch Tauchid atas pilihan Konggres.

Dalam membitjarakan preadviz tentang organisasi yang diuraikan Sdr Wijono dan S. Sardjono, yang menghendaki berdirinya Organisasi Tani sebagai vak organisasi, terdapat dua pendapat, sebagian menghendaki berdirinya Partai Tani, sebagian lagi menghendaki berdirinya vak Organisasi sebagai preadviz Jogja. Imbangan suara hampir sama besarnya.

Pada rapat pertama belum dapat diambil keputusan, dan baru pada rapat yang kedua digedung Taman Siswa, kemudian diputuskan dengan suara 23 lawan 21 menerima berdirinya Partai Tani. Komisi untuk menjusun Azas, AD dan AT diserahkan kepada Sdr2 Suradiwidjaja dan Kastura yang harus selesai selama Konggres itu untuk disahkan.

Perlu diperingati, bahwa pada waktu konggressisten sudah mulai datang ditempat konggres digedung Sono Budojo, pada pukul 8.30 pagi (rapat akan dimulai pukul 9) kota Jogja, chususnja gedung siaran radio, mendapat serangan dari angkatan Udara

Inggris, yang memberi ultimatum setengah djam sebelumnya. Gedung Sono Budojo mendapat hadiah bom, dan hantjur sebagian.

Kurban jiwa diantara Kongressisten tidak ada. Dengan seketika itu rapat dipindahkan ke Perguruan Taman Siswa dan pada pukul 10 pagi (hanya terlambat satu djam) rapat sudah dapat dimulai lagi, dan meneruskan membitjarkan soal Organisasi, dan seterusnya soal lain2nja.

Rentjana Azas, A.D. dan A.T. setelah diperdebatkan, tidak dapat diterima, dan akhirnya putusan berdirinja Partai Tani ditjabut, dan kembali kepada preadvis Jogjakarta jaitu berdirinja: Barisan Tani Indonesia dengan Azas, A.D. dan A.T. dari B.T.I. Jogjakarta.

**

KONGGRES B.T.I. KE I.

KONGGRES KE I diadakan di Djember tg 28-12-1946 sampai 1-1-1947. Kota ini dipilih sebab tersohor mendjadi kota beras; dan beras pada waktu itu ta' kalah pentingnja dgn pelor, sebagai sendjata perdjungan yg penting pula. Konggres mendapat perhatian yang memuaskan, djuga dalam Konggres mendapat pemandangan2 yang lebih maju dari pandangan2 yang telah lampau. Kata „agraria” mendjadi populer. Perlu kita tjantumkan disini bahwa masaalah agraria di Indonesia dikupas oleh sdr. Sarimin, tentang keadaan diluar negeri oleh sdr. Alimin.

Dengan adanya Konggres yang pertama ini terbukalah pandangan lebih luas tentang masaalah agraria dan perdjungan Tani umumnya, dan dapat dimengerti pula bahwa untuk memperkuat perdjungan perlu adanya „program” yang djelas, sebagai pedoman untuk mengarahkan perdjungan yang tertentu. Dua matjam soal yang perlu diperhatikan didalam perdjungan Tani, ialah soal: tanah dan mekanisasi.

Didalam revolusi nasional Rakjat Tani harus turut mengambil bagian yang sebesar-besarnya, supaya rakjat Tani mendapat ke-

untungan didalam revolusi itu. Ta' lain ta' bukan harus ada perubahan hak tanah yang dapat menguntungkan sebagian besar dari Tani, dan tidak boleh bersifat memetjah. Mekanisasi sangat penting untuk mengubah jiwa Tani yang masih statis akibat pengaruh keadaan kanan kirinja. Kalau keadaan itu berubah, dengan sendirinja alam fikiran Tani djuga turut berubah.

**

PUTUSAN2 KONGGRES.

KONGGRES Barisan Tani Indonesia yang pertama, diadakan di Djember pada tanggal 29 Desember 1946 hingga 1 Januari 1947, dikundungi oleh 230 orang, mewakili 65 dari 76 Tjambang dan 15 dari 16 Daerah seluruh Djawa-Madura, memutuskan sbb:

1. Dengan suara 53 setuju, 3 tidak setuju dan 4 blangko serta 3 suara tidak sjah dan ada 2 tjambang tidak hadir, Konggres menjetudji sikap Dewan Pimpinan Pusat: menerima rentjana persetudjuan Indonesia-Belanda.
2. Rentjana sdr. Sardjono tentang kedudukan dan program Barisan Tani Indonesia dalam prinsip diterima oleh Konggres. Oleh Konggres Sdr. S. Sardjono dipilih sebagai formatur untuk membentuk Panitia perentjana werkprogram. Kemudian werkprogram itu akan diserahkan selanjutnja kepada suatu Werkkomite.
3. Program dua tahun dari Panitia perentjana tentang modernisasi pertanian, padjag, agraria dan lain2 usaha disjahkan oleh Konggres. Demikian djuga tentang hal keuangan.
4. Tentang „gula” Konggres membentuk sebuah Panitia untuk membuat resolusi yang isinja: mendesak kepada Pemerintah untuk selekas mungkin mereorganiseer perusahaan gula sebagai masyarakat, dengan djalan: segala tindakan yang diambil untuk menjapainja harus dikerdjakan bersama-sama antara organisasi2 Tani, Buruh

dan Pemerintah.

5. Tentang soal Koperasi, Lumbug dan Bang Desa, oleh Konggres diserahkan kepada Werkkomite.
6. Untuk membentuk Dewan Pimpinan Pusat yang baru, Konggres memilih formatur yang terdiri atas: sdr2 S. Sardjono, Ir. Sakirman dan Mochamad Tauchid.

**

PROGRAM — 2 — TAHUN.

I. Modernisasi Pertanian:

1. Mendesak kepada Pemerintah supaya memperbaiki tjara pengairan dengan djalan:
 - a. memperluas pemakaian „elektro-hydraulische pompstation” dan hydraulische pompen ketjil, seperti yang telah didjalkan di daerah Kroja dan Semarang dulu.
 - b. menjtoba mempergunakan „artetische putten” untuk keperluan pengairan dengan memakai „waterslangen” sebagai alat pembagi air.
 - c. memperbaiki peraturan2 pengairan (golongan regeling dsb) sesuai dengan kepentingan Tani pada dewasa ini.
 - d. mengadakan pertjobaan2 tentang pemakaian alat2 pengairan modern.
- e. memperbanyak djumlah laboratorium untuk menjelidiki serta mengadakan pertjobaan2 tentang soal pengairan.
 1. Membantu Pemerintahan dalam usahanja melakukan herbebossching.
 2. a. Mempergunakan traktor2 ketjil untuk menggali dan mengerdjakan tanah.
 - b. mempergunakan alat2 atau obat2an modern untuk membasmi ama.
 - c. mendesak kepada Pemerintah supaya mendirikan perusahaan pupuk dan alat2 pertanian modern dinegeri kita sendiri.
 - d. mendesak kepada Pemerintah supaya mengadakan penjelidikan tentang djenis dan luasnja tanah2 yang dapat ditanami serta menetapkan djenis tanaman yg sesuai dgn tanah2 itu.

e. mendesak kepada Pemerintah supaya mengorganiseer alat2 pengangkutan untuk kepentingan pertanian.

f. Pemerintah supaya memperbanyak ahli2 pertanian dengan mendatangkan ahli2 pertanian menengah dan tinggi, dan mendatangkan ahli2 pertanian dari luar negeri.

g. Memperluas pendidikan dan pengetahuan kaum Tani dengan mengadakan latihan2 dan menambah klas tani pada sekolah rakjat.

h. Mendesak kepada Pemerintah supaya memperluas pemeliharaan ternak Kerdja dan menghapuskan larangan pengiriman ternak dari satu kelain daerah.

3. a. Mendesak kepada Pemerintah supaya mendirikan Buro-Penerangan, yang berkewajiban memberi penerangan seluas2nja kepada rakjat Tani tentang :

1. tjara memperbanyak hasil produksi.

2. pertanian diluar negeri.

3. mengadakan pertundjukan2 (landbouw-tentoonstelling) baik didesa2 dan dikota2, dimana diperlihatkan dan dibandingkan hasil2 usaha pertanian yang dikerdjakan menurut tjara kolot dan jang modern.

b. Mengadakan perhubungan jg. teratur dengan organisasi2 pertanian diluar negeri.

II. P a d j a k :

1. Mendesak kepada Pemerintah supaya dalam usahanya menambah penghasilan Negara, djangan menaikkan pajak rakjat djelata, istimewa Rakjat Tani.

2. Pemerintah supaya mempergunakan hasil pajak bumi dari Buruh Tani ketjil untuk kepentingan pertanian dengan menjerahkan sebagian dari hasil pajak itu kepada desa.

3. Pemerintah harus menaikkan pajak kekajaan tuan tanah dan Tani2 besar, jang mana kenaikan itu dipergunakan untuk kepentingan pertanian.

4. Badan2 perdjuaan tidak diperbolehkan memungut pajak dari Rakjat Tani, baik jang berupa uang, maupun barang, ketjuali dengan idzin dari Pemerintah.

5. Mendesak kepada Pemerintah supaya menghapuskan segala matjam systeem indirecte belastingen.

III. A g r a r i a :

a. Menghapuskan systeem feodalisme dalam lapangan pertanian dengan djalan :

1. Pemerintah harus membeli tanah2 perdikan, partikulir, konsesi2 dan erpacht.

2. tanah2 ini dijadikan onderne-ming Pemerintah atau Pemerintah memberi/mendjual tanah2 itu kepada rakjat menurut Undang2.

b. Menentukan peraturan2 dengan Undang2 jang mengatur perhubungan antara Tani besar dan Buruh Tani atau Tani ketjil jang bekerdja pada Tani besar.

c. Djual beli tanah harus diatur dengan Undang2 (misalnja ditetapkan bahwa orang dilarang mendjual atau membeli tanah ketjual kepada Negara) atau dengan seidjin Negara.

d. Dengan Undang2 harus ditetapkan pula maximum dan minimum luasnja tanah sanggan.

e. Berdjaja upaja supaya tiap2 orang Tani mendapat tanah, jang tjukup luas untuk mendjamin penghidupannja jang lajak sebagai manusia.

f. Peraturan tentang hak waris tuan tanah atau Tani besar supaya diatur dan diperbaharui sesuai dgn dasar demokrasi.

g. Pemerintah supaya menjokong usaha memajukan masjarakat pertanian dengan djalan memberi kredit kepada Organisasi2 Tani dgn rente semurah2nja.

h. Perusahaan2 pertanian supaya selekas-lekasnja dinasionaliseer.

i. bank dan koperasi pertanian supaya dapat perlindungan dari Pemerintah.

j. hak dan kewadajiban Buruh Tani dan Tani Ketjil supaya diatur dengan undang2.

k. Pemberantasan buta huruf harus diperhebat dengan sokongan dan bantuan dari Pemerintah sepenuhnya.

l. memberantas sekerasnja adanya gaden, woeker, idjon dan kedok systeem.

m. Pemerintah supaya menyelesaikan soal transmigrasi menurut rentjana jang tertentu.

IV. L a i n - l a i n u s a h a :

1. Barisan Tani berusaha sekuat-kuatnja untuk mengembalikan dan mempertinggi tenaga produktif rakjat dengan djalan :

a. memperdjuaan segala kesempatan untuk dapat dipakai sebagai pangkalan guna menanam kepertjajaan dalam kalangan kaum Tani (misalnja dengan menuntut supaya bank desa dan lumbung desa diurus dan dipimpin oleh Organisasi2 Tani).

b. mendidik kader2 Tani jg berideologi, sesuai dengan azas tudjuan Barisan Tani.

2. Mempererat kerdja-bersama dengan alat2 Pemerintahan umumnja dan dengan pengurus ketjamatan khususnja, jang pekerdjannja langsung berhubungan dengan pekerdjaan kaum Tani.

3. Mendesak kepada Pemerintah supaya Lurah2 desa diberi nafkah jang tertentu oleh Pemerintah.

4. Bersama2 dengan Pemerintah membentuk suatu Panitia jang khusus untuk mengerdjakan soal agraria.

5. Import dan export hasil bumi ditangan Pemerintah.

RESOLUSI KONGGRES TENTANG „GULA”.

KONGGRES Barisan Tani Indonesia jang pertama di Djember pada tgl 29 Des. 1946 hingga 1 Djanuari 1947, dikundjungi oleh 65 dari 76 Tjabang

seluruh Djawa—Madura, membitjarkan tentang soal Gula:

Setelah mendengarkan pemandangan² dan pemitjaraan² dalam Konggres tsb:

Mengingat:

1. Bahwa gula adalah satu bahan yang dapat dipergunakan sebagai alat perdjuaan politik luar dan dalam negeri:

2. Bahwa gula adalah salah satu bahan yang penting untuk hidup manusia.

3. Bahwa Indonesia adalah negara yang mengambil bahagian menghatsikan gula yang tidak sedikit artinja untuk mentjukupi kebutuhan Dunia.

Berpendapat:

1. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka dasar yang harus dipergunakan untuk menentukan harga penghatsilan ialah dasar yang semurah²nja, dengan tidak memberatkan beban kaum Tani;

2. Bahwa pada masa ini tjara yang dilakukan untuk menghatsikan gula yang diperoleh didalam negeri tidak sesuai dengan kekuatan membeli dari Rakjat, sedang terhadap luar negeri harga itupun tidak dapat menjainginja;

3. Bahwa dinegeri kita ada tjukup kemungkinan menghatsikan gula untuk mentjukupi kebutuhan² tersebut diatas dengan tenaga² dan alat²nja yang ada;

Memutuskan:

Mendesak kepada Pemerintah untuk selekas mungkin mereorganiseer perusahaan Gula sebaik²nja hingga dapat bermanfaat bagi Masyarakat, dengan djalani segala tindakan yang diambil untuk mentjapainja harus dikerdjakan bersama² antara Organisasi² Tani, Buruh dan Pemerintah.

**

UNTUK melantjarkan djalanja pekerdjaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh program itu, bentuk organisasi djuga diubah, yang perubahan itu

diserahkan kepada 3 orang, formatore terdiri dari sdr²: S. Sardjono, Moch. Tauchid dan Ir. Sakirman. Selandjutnja:

a. Pimpinan Pusat berbentuk Presidium yang terdiri dari sdr²: S. Sardjono, Ir. Sakirman, Moch. Tauchid, Sundjoto dan Ir. Kasanmuntalib. Saudara yang paling belakang mendjadi Sekretaris Djendral. Lengkapnja susunan sebagai berikut:

I. Presidium:

Ketua I: S. Sardjono.

Ketua II: Ir. Sakirman.

Ketua III: Moch Tauchid.

Anggota²: Ir. S. Kasanmuntalib, Sundjoto.

II. Eksekutief-Komite:

Direktur Djendral: Ir. S. Kasanmuntalib.

1. Bagian Umum: Susilo.
2. Bagian Organisasi: S. A. Sudibjo, Marwoto.
3. Bagian Keuangan: Sajoga, Sunarjo.

III. Pemuda:

Ketua: Sardjono.

Sekret.: Kartiko.

Anggota: Purwosudirdjo.

1. Bg. Kader: Sardjono, Kartiko.
2. Bagian Lasjar: Purwosudirdjo, Handoko, Padi.

III. Pen. Pend:

Ketua: Moch Tauchid.

Sekretaris: Tjiptodarsono.

Anggauta: Ridwan, Imam Supardi, Wijono.

1. Bg. Umum: Moch Tauchid, Tjiptodarsono, Ridwan.
2. Bag. Pers/komisi: Imam Supardi, Moch Supardi, Suprapti, Sunarno.
3. Bag. Pendidikan: Wijono, Slamet-Machmud.

IV. Panitia Keuangan:

Ketua: Sundjoto.

Anggauta: Sajoga, Sukemi, Sujitno, Suhardi, Sukanda, Kastura.

- a. Susunan Daerah dihapuskan dan diganti Konsulat, terdiri dari 3 orang.
- c. Dari Tjabang sampai Ranting masih tetap.

**

SAMPAI saat itu B.T.I. masih selalu memusat di Djawa saja, diluar Djawa belum mendapat perhatian yang sewadjar²nja. Karena itu sehabis Konggres ke I ini mengutus sdr. Moch. Tauchid ke Sumatera untuk mengembangkan B.T.I. disana. Permulaan tahun 1947 berangkat ke Sumatera dan pulangnja hingga pada penghabisan tahun itu, karena terhalang adanja agresi Belanda ke I.

MASJARAKAT Tani tidak dapat terpisah dari aliran² yang ada di Indonesia. Perselisihan antara partai satu dengan lainnja mulai timbul, karena pro dan kontra „Linggardjati“. B.T.I. turut menjetudjui Linggardjati. S.T.I.I. lahir, banjak diantara pemimpinnja yang dulu mendjadi anggota pengurus B.T.I. didaerah-daerah. Selain dari pada itu B.T.I. djuga menjetudjui pengiriman beras ke India untuk menembus blokkade Belanda.

21 Djuli 1947.

KABINET Sjahrir djatuh, diganti Kabinet Amir. Perdjandjian Linggardjati tidak dapat didjaalankan. Agresi Belanda ke I petjah. Sebagian Djawa dan Sumatera diduduki Belanda. Di daerah² pendudukan, B.T.I. tidak dapat bergerak, tetapi orang²nja masih banjak jg tetap berdjuaan untuk mempertahankan Kemerdekaan. Tidak sedikit yang mendjadi korban dalam agresi Belanda ke-I itu.

Agresi Belanda ke-I diachiri dgn adanja persetudjuan „Renville“. BTI diam, tidak menjatakan apa-apa.

28 Desember 1947.

DALAM suasana yang masih panas karena agresi Bld ke-I, BTI. melangsungkan konferensinja di Blitar pada 28 Des. 47, a.l. putusannja jg penting: a. Daerah jg diduduki Belanda masih mendjadi daerah kita, kita berdjuaan terus supaja daerah² tsb. terlepas dari Belanda.

b. BTI harus bekerdja lebih kongkrit untuk memperkuat perjuangannya.

Setelah konperensi ini, susunan Pimpinan Pusat diubah, Presidium menjadi 3 orang, sdr2: S. Sardjono, Moch. Tauchid dan Ir. Sakirman. Werkkomite supaya bekerdja lebih kongkrit dan pimpinannya diserahkan kepada sdr. Sardjono (ketjil).

PERLU disisipkan disini bahwa semendjak berdirinya B.T.I. telah ada bagian Pemuda: Pemuda Barisan Tani Indonesia (P.B.T.I.) dipimpin oleh sdr. Kusumosundjojo dan Hartoyo cs. Kongres Djember memilih formateur sdr. S. Sardjono; selanjutnya dibentuk presidium, dan statusnya P.B.T.I. mempunyai hak otonomi; keluar dapat berhubungan dengan organisasi2 Pemuda lain, kedalam masih ada hubungan yang erat dengan B.T.I. Pemuda Tani adalah stoot brigade B.T.I. Oleh karena yang dimaksud oleh konperensi Blitar untuk mengkonkritkan usahanya, maka P.B.T.I. pun telah siap sedia menerima beban yang ditugaskan oleh B.T.I. sebagai pelopornya, jaitu dengan usahanya membuka tanah kosong (tanah rakjat) didaerah Sapuran (Wonosobo), yang dipimpin oleh sdr. Marnomo. Harapan pembukaan tanah kosong ini baik, tetapi sayang sekali terhalang oleh adanya clash ke II.

1 April 1948.

SELAIN dari pada usaha2 yg nyata pun BTI menegaskan pula tuntutanja yg prinsipieel: jaitu dimulai lagi tuntutanja akan hapusnja konversi di Daerah Jogjakarta—Surakarta (sebelumnya sudah pernah diajukan kepada Pemerintah). Maka pada 1 April 1948 Rakjat Tani didaerah Jogjakarta—Surakarta mengadakan demonstrasi, yang maksudnja mendesak kepada yang berwadjib, supaya hak konversi selekas mungkin dihapuskan. Demonstrasi di Jogjakarta menghadap Presiden dan selanjutnja ke BP KNIP. Setelah itu baru soal kon-

versi dirundingkan dalam BP KNIP pada 24 April 1948 yang dilanjutkan pada 26 April 1948, dan achirnja pada hari itu djuga diputuskan dengan suara bulat bahwa: **hak konversi dihapuskan mulai 1 April 1948.** Tetapi disamping ini masih mewadjibkan kepada desa utk mendjamin kebutuhannya perusahaan2 atas tanah.

Pada pertengahan bulan April itu djuga PBTI mengadakan konperensi besarnya di Klaten, diantaranya menegaskan status dari P.B.T.I.

KONGGRES BTI KE-II.

DIDALAM suasana politik yang panas sekali BTI menyelenggarakan Konggresnja di Jogjakarta pada 3—7 September 1948. Sebelum Konggres dimulai lebih dulu mendengarkan causeri sdr. Muso yang baru pulang dari luar negeri tentang pengalamannya yang bersangkutan dengan perubahan2 agraria di Eropa Timur umumnya dan di Tjekoslovakia khususnya — bertempat digedung bioskoop Tandjung (Jogja); hari berikutnya Konggres dilaksanakan di Hoa Kiau Jogjakarta.

Pusat perhatian Konggres kepada perubahan agraria, sehingga putusanja yang terpenting ialah mengenai program agraria.

UNTUK mendjalankan program itu maka dipilih formateur supaya membentuk Pengurus baru, terdiri dari sdr2: S. Sardjono, Dr. Tjokronegoro dan sdr Sardjijo (almarhum).

17 September 1948.

FORMATEUR selesai berunding untuk menjusun Pengurus baru, dan segera minta kepada tenaga2 yang dibutuhkan.

19 September 1948.

TIMBUL peristiwa Madiun, sdr. S. Sardjono ditangkap, formateur yg lain tidak kelihatan.

21 September 1948.

Atas iniatif sdr. Moch Tauchid, kawan2 yang masih ada dikumpulkan semufakat disusun

Pengurus darurat yang akan bertanggung djawab kepada formateur, bila keadaan sudah memungkinkan. Susunannya sbb.:

Ketua: Moch Tauchid.

Wakil ketua I: Sadjarwo.

Wakil ketua II: Sundjoto.

Sekretaris: Susilo/S.A. Sudibjo.

Penerangan: Tjiptodarsono.

Kemudian sdr Moch Tauchid djuga ditangkap, pimpinan dipegang oleh sdr Sadjarwo.

13 Oktober 1948.

BTI mengadakan statement sbb:

DALAM rapatnja 11 Oktober 1948 Pusat Barisan Tani Indonesia telah mengambil putusan:

1. Pimpinan Pusat sementara diserahkan sdr2 Sadjarwo dan Sundjoto.
2. Mengadakan pengumuman sebagai berikut:

Mengingat:

- a. Peristiwa pembontakan Madiun,
- b. Dalam usaha pemerintah memadamkan pembontakan tsb. „Pemerintah tidak melarang salah satu ideologie berdasarkan demokrasi”
- c. Maklumat Pemerintah tgl 30 Sept 1948 yg mengandjurkan organisasi2 Buruh dan Tani yang telah terkatjau karena pembontakan tersebut, supaya mengusahakan langsung berdirinya organisasi2 tersebut atas dasar yang sehat dan konstruktif.

Menimbang:

- a. Sedjak berdiri hingga kini Barisan Tani Indonesia selalu bekerdja dgn pedomannya anggaran dasarnya yg berbunyi: „Tudjuannya: mempertegak Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat menudju masyarakat Sosialisme”
- b. Barisan Tani Indonesia adalah organisasi massa Tani yg berdiri sendiri, tidak terikat oleh salah satu partai politik;

Menjatakan:

- a. Barisan Tani Indonesia tidak ada hubungan dengan peris-

tiwa Madiun dan tidak tahu menau tentang peristiwa tsb sebelum ada keterangan dari pemerintah.

- b. Barisan Tani Indonesia terus berjuang menjelesaikan revolusi nasional dan tidak dapat membenarkan tindakan2 pengatjauan jang memetjah belah terutama golongan tani jang memperkosa demokrasi.
- c. Barisan Tani Indonesia tetap mempertahankan Negara Republik Indonesia jang diproklamarikan pda tg 17 Agt 1945.

Dewan Pimpinan Pusat B.T.I. Sementara.

P.S.

Kata „pembrontakan“ dibatja „peristiwa“.

DALAM keadaan jang gelap itu BTI bekerja sekuat tenaga. Tenaga didaerah2 sampai Ranting2 banjak jang ditawan; sekalipun demikian masih ada beberapa tjabang jang boleh dikatakan kompak.

12 Desember 1948.

Mengingat gentingnja suasana, Pusat BTI menginstruksikan kepada Tjabang2nja supaya bersama2 dengan Pemerintah dan segala golongan siap sedia menghadapi segala kemungkinan.

19 Desember 1948.

Belanda mendjalankan agresi2 jang ke-II, kawan2 banjak jang pindah dari kota ke desa2, meneruskan perjuangannya.

Karena sdr S. Sardjono sudah keluar dari tawanan dan mungkin dapat berhubungan dgn kawan formateur lainnja sdr Sadjarwo menjerahkan pimpinannya kepada sdr S. Sardjono. Tetapi sdr S. Sardjono sendiri sebenarnya sulit mengadakan hubungan dengan kawan formateur lainnja, bahkan sdr Sardjono pada beberapa hari dari tg 19 itu menjadi korban persengketaan (meninggal dunia).

31 Maret 1949.

Sdr S. Sardjono sendiri dengan rasa penuh tanggung jawab, membentuk pengurus jang sangat darurat, terdiri dari sdr S.

Sardjono dan Tjiptodarsono tugasnja diluar kota; sdr Sadjarwo dan Susilo tugasnja didalam kota.

25 April 1949.

Sebelum Perdjudjian Rum—van Royen BTI mengadakan resolusi sebagai berikut:

Dewan Pimpinan Barisan Tani Indonesia dalam rapat tg. 25 April '49 disalah satu tempat.

Mengingat:

Keadaan dalam dan luar negeri pada dewasa ini, antara lain.

Memutuskan:

1. Menjetudjui kembalinja Republik Indonesia sebagai pangkalan untuk meneruskan perjuangannya.
2. Pimpinan Barisan Tani Indonesia didalam lingkungan Daerah kekuasaan Republik Indonesia diserahkan kepada sdr Sadjarwo.

Ditempat, 26 April 1949.

Dewan Pimpinan Barisan Tani Indonesia.

15 Djuni 1949.

Mengadakan pertemuan di Djatinom, jang kesimpulannya memberi mandat kepada sdr. Sadjarwo supaya membentuk Pengurus Darurat.

18 Djuli 1949.

Pada tanggal 18 Djuli 1949 disusun Pengurus darurat lagi, jang susunannya sbb:

Ketua : Sadjarwo.

Wakil Ketua : Moch. Tauchid.
Sekretaris : Soesilo/S.A. Soedibjo.

Urusan Umum : Soendjoto.

Sosial/Ekonomi : Marnomo/
Kartowinoto.

Penerangan : Tjiptodarsono.

19 Djuli 1949.

Mengadakan konperensi Daerah Jogjakarta jang pertama kali sedjak Jogja kembali: dimana jang menjadi urgensi program adalah „economische opbouw“.

22—26 Nopember 1949.

Atas iniatif B.T.I. diadakan Konperensi Tani Seluruh Indonesia di Jogjakarta. Panitia konpe-

rensi ini terdiri dari: B.T.I., S.T.I.I. dan PETANI. Maksud dari konperensi tersebut terutama untuk membentuk front Tani guna menghadapi modal asing. Kelanjutan konperensi Tani ini berdirilah „Lembaga Tani Indonesia“, djuga terdiri dari 3 organisasi tsb diatas.

9 Djanuari 1950.

Formatur mengoper pekerdjaan dan selandjutnja disusun pengurus sebagai berikut:

Ketua : Dr. Tjokronegoro.

Wk. Ketua Umum : Sadjarwo.

Ketua Harian : S. Sardjono.

Wk. Ketua Harian I : Moch. Tauchid.

Wk. Ketua Harian II : Djadi.

Penulis I : Soesilo.

Penulis II/Penerangan : Tjiptodarsono.

Keuangan : Marlan, Soendjoto.

Pemuda : Kartowinoto.

Keahlian : Sugiharto.

Dan anggota2 Pleno/tersiar lainnja sdr2:

S.A. Soedibyo (Jogja), Dja-jusman (Purwokerto), A. Rachman (Semarang), Soejitno (Solo), Soekemi (Madiun), Soedar-madji (Bodjonegoro), Darmosumarto (Bondowoso), Basri (Dkt) dan S.M. Tarigan (Medan).

WAKTU Republik Indonesia (sesudah K.M.B.) menjusun Kabinetnja B.T.I. mengusulkan kepada Pemerintah supaya Kementerian Kemakmuran dibagi menjadi 2:

a. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan

b. Kementerian Pertanian.

Usul mana dilaksanakan oleh jang berwadjib, dan dari B.T.I. sdr. Sadjarwo turut dalam Kabinet sebagai Menteri Pertanian.

25 Maret 1950.

Setelah hampir 2 tahun dari Konggres ke II baru dapat mengadakan rapat pleno jang pertama kali; a.l. putusannya:

a. Membangun Tjabang2 kembali.

b. Memupuk Tjabang2 jang telah timbul.

Kaum Tani dan Land-Proletariaat di Indonesia.

Ringkasan pidato Sdr Alimin.

SAUDARA-SAUDARA!

Sepatah dua patah kata hendak saja sampaikan tentang kaum Tani dan Landproletariat (Buruh ondeneming, persilan, plantage dll) di Indonesia. Dengan adanya Demokrasi di Indonesia maka baik sekali kesempatan ini dipergunakan sebanyak2nja untuk memajukan Pergerakan Tani dan Pertanian.

Dalam pengembaraan sekian tahun di Eropah dan Asia kita dapat mempelajari soal2 dan keadaan2 golongan Tani dan kawannja, jaitu Landproletariaat. Disebahagian dari tanah benua Eropah jang berteknik, hidupnja kaum Tani ada sedikit ringan, dan sebaliknya ditinjau benua Asia dimana tanah2 itu masih tetap tinggal bersifat feodal dan jang sebahagian besar masih tinggal tanah jang terdjajah atau setengah terdjajah, maka hidupnja kaum Tani dan Landproletariaat itu sangat melarat dan menderita. Maka pentinglah dibicarakan tentang nasib berjuta2 kaum Tani dan kawannja sekerdja jaitu Landproletariaat.

DI INDONESIA.

LEBIH dari tiga abad Tani kita di Indonesia tinggal tidur, diam dan tertindas jang melebihi dari pada segala ukuran tindasan. Di Indonesia, bekas tanah djadjahan imperialisme Belanda, penduduknja terdiri dari 75 persen dari kaum Tani. Hidup mereka sangat sukar dan menderita. Ini disebabkan oleh adanya kapital asing jang konservatief,

disertai dengan stlm kolonial feodal jang kolot, jang mengisap dan mengambil keuntungan jang absolut, keuntungan jang sebesar2nja.

Lebih dari 100 tahun, sedjak Cultuurstelsel v.d. Bosch, keadaan ekonomie Indonesia telah kurus dan kering. Penduduknja tinggal bodoh, buta huruf dan terbelakang. Sebagaimana djuga politiknya imperialisme Inggris di India dan



ALIMIN.

dilain2 tanah djadjahannya, imperialis Belandapun dengan djalan jang sangat konservatief, mempertahankan supaya Indonesia tetap tinggal bersifat feodal, dimana penduduknja dipaksa terus menerus mengerdjakan sawah, bertjotjok tanam. Dizaman djadjahan, Indonesia diwadjabkan mengisi pasar dunia dengan bahan2 jang indah, jang penting dan nikmat bagi dunia berdjuis.

Sekarang Indonesia telah Merdeka. Sekarang Indonesia tidak sadja berkuasa atas perekonomiannya sendiri akan tetapi Indonesia telah memegang nasibnja jaitu politik dan ekonomi ditanganja sendiri.

Inilah permulaan jang sungguh terpenting dan terbaik bagi seluruh penduduknja. Anggapan ini terdapat dari pelajaran2 jang dilukiskan oleh Marx, Engels, Lenin dan Stalin.

Indonesia memegang dan mendjalankan demokrasi2 kerakjatan jang seluas2nja, maka itu kita pandang perlu menggunakan kesempatan itu untuk mengusulkan dan mengadakan rantjangan2 jg. sekiranya mungkin didjalankan dalam waktu satu dua atau tiga tahun jang akan datang.

Berhubung dengan pembangunan perekonomian Indonesia, maka kita mengadakan usul tentang soal pertanian sebagai berikut:

1. Mendirikan Komite jang permanent

Dari Redaksi:

Sekedar untuk melengkapi putusan2 Kongres B.T.I. ke I di Djember, mengingat pula isinja jang tetap aktueel, — maka kita muat djuga: Ringkasan pidato Sdr. Alimin dalam Kongres Djember itu.

2-6 Agustus 1950.

Sampai adanya Konggres ke III jang diadakan di Jogjakarta pada 2-6 Agustus 1950, djumlah Tjabang2 B.T.I. sudah ada 94 Tjabang. Dalam Konggres bukan malah surut suasananja, sekalipun boleh dikata beberapa waktu berhenti (hampir patah), tetapi malah sebaliknya, suaranya lebih tegas.

Bapak putusan2 jang diambil oleh Konggres ke III — (telah disiarkan dalam Suara Tani nomor Konggres) — jang penting ialah: Azas dan Anggaran Dasar serta program, seperti jang telah dimuat dalam Suara Tani no. 6 th V.

Untuk mendjalankan program itu maka telah disusun pengurus baru pula oleh formatur, seperti jang tersebut dalam Suara Tani no. 6 th V.

7-9 Oktober 1950.

Diadakan rapat pleno jang I sehabis Konggres ke III, antara lain jang dibicarakan:

a. Mengesahkan Pengurus baru.

b. Mengerdjakan program jang telah diputuskan oleh Konggres ke III.

3 Nopember 1950.

Perlu diingat bahwa hari 3 Nopember 1950 mosi Moch. Tachid cs. jang isinja:

a. Menjambut kenaikan padjag bumi 1950.

b. Mengembalikan kenaikan padjag bumi jang telah dibayar.

c. Mengganti padjag bumi menjadi padjag penghasilan, telah diterima oleh Parlemen dengan suara bulat.

Sampai tgl. 25 Nopember sekarang ini genaplah 5 tahun Barisan Tani Indonesia berdiri. Mudah2an segala pengalaman dapat dipergunakan untuk menjempurnakan organisasi, dan segala kemenangan2 baik jang prinsipieel maupun jang insidental, bisa menjadi pupuk bagi keinsjafan Tapi berorganisasi.

Jogjakarta, 25 Nopember 1950.

jang berdjaja upaja agar tiap2 keluar- ga kaum tani mendapat tanah jang tjukup untuk hidup sempurna seba- gai manusia.

2. Pemerintah Republik harus memban- tu keperluan pertanian. Hasil bumi mesti diperbanjak. Sjarat2nja jaitu: mempermodern alat2 pertanian (mo- dernisasi landbouwgereeschappen), mempermodern peraturan Agro-tech- niek dan peraturan urusan pekerdjaan. Harus lekas diusahakan membeli trak- tor2 jang praktis untuk mengerdjakan (mluku tanah perladangan kering dan untuk menggali tanah penkebu- nan tebu.
3. Mendirikan Bureau Penerangan jang antara lain memberi penerangan pa- da bapak Tani tentang: tanaman apakah jang baik ditanam disuatu dje- nis tanah serta rabuk dan pupuk apa- kah jang perlu digunakan untuk tana- man disuatu djenis tanah jang tertent- u; djuga harus diterangkan pada ba- pak Tani berapa banjak air dan ma- tjam djenis rabuk atau pupuk dan se- bagainja jang dibutuhkan untuk tana- man disuatu djenis tanah.
4. Pemerintah harus: memberikan pin- djaman kepada bapak Tani dengan rente jang semurah2nja (cheaprate of credit); memperbanjak kader Tani dengan mendirikan sekolahan2 perta- nian dan lain2 pengadjaran (educati- on) jang murah atau prodeo didesa2.
5. Memperbanjak dan meluaskan dengan mendidik dan membiasakan bekerdja bersama dalam pembagian air dan membeli sebanjak2 pompa air (water- pompen) dan lain2 mesin jang didja- lankan dengan air (hydromachine). Mempermodern sistim waduk dan lai- n2 bevoloeingsmethode.
6. Memperbanjak landbouw-consultan- ten dan meninggikan (memperbanjak) hasil bumi (technische cultures, be- mesting dll).
7. Menggunakan segala tenaga dengan hemat, tanah jang dapat ditanami mesti ditanami bagi keperluan perta- nian dan menggiatkan atau membikin radjinnja kaum Tani seumumnja.
8. Mengadakan peraturan guna mema- djukan usaha penanaman bahan2 ma- kanan jang teratur (systematische be- vordering van de verbouw van voed- ingsmiddelen).
9. Memilih atau mengadakan seleksi ten- tang djenis dan kwaliteitnja tanah un- tuk ditanami dengan benih jang tjot- jok menurut ilmu pengetahuan (we- tenschappelijk).
10. Mendirikan Kooperasi2 dengan Staats- crediet untuk memenuhi segala ke-

perluan pertanian seperti alat2 dan lain2 grondstoffen; mendirikan pabrik2 dengan kekuatan kapital Nasional atau memberi konsessi pada kapital asing, dengan dibatasi jang dianggap berguna bagi kemadjuan kaum Tani.

11. Mendirikan Komite jang permanent semata2 untuk meluaskan peternakan jang dipimpin oleh ahli2, misalnja dokter chewan atau mantri chewan.

KITA telah mengetahui betapa sulit- nja mengorganisir serta mendidik kaum Tani dan Landproletariaat dalam melakukan perdjuaan jang revolusio- ner melawan kapitalisme dan imperia- lisme. Kapitalisme imperialisme telah sangat merusak budi dan persatuan ka- um Tani, telah sangat merusak budi dan persatuan Bapak Tani dengan kawannja Landproletariaat, jang sengadja hendak diperbudakkan oleh kapitalis imperialis- me kepada feodalisme buat selama2nja.

Maka itu tiap2 Partai Komunis diwa- djibkan memperhatikan sungguh2 penghi- dupan dan perlawanannya seluruh kaum Tani dan seluruh massa jang bekerdja diladang2 dan golongannya semi proletar di desa2 dan di distrik2. Semua perbuat- an2 dan pekerdjaan kaum Komunis umumnja lambat laun mendjadi satu tjor- rak jang terang, jaitu tjoraknya ORGA- NISASI KLAS Kaum Tani dan Land- proletariaat.

Partai Komunis harus dengan segala daja upaja bekerdja diseluruh bahagian jang diduduki oleh kaum Tani dan ber- usaha mendidik mereka dengan setjepat- tjepatnja guna mengadakan organisasi.

Organisasi mana harus djuga digabung- kan dengan pergerakan kaum sekerdja diladang2 dan kaum proletar serta semi proletar. Organisasi Kaum Proletar serta semi Proletar. Organisasi kaum Tani itu harus didekatkan dan dieratkan dengan pergerakan Buruh Industri enteng dan Buruh Industri Berat. Djadi verbroede- ring dari dua Organisasi besar, jaitu Pergerakan Buruh dan Pergerakan Tani mendjadi Pergerakan jang besar dan kokoh kuat, jang bisa membela kepentin- gan kaum jang tertindas dan menolak segala tindasan dan antjaman dari pihak manapun djuga.

Kita harus mengadakan propaganda sebanjak2nja. Propaganda itu harus di- djalankan dengan tjara jang semudah2- nja, jang gampang diartikan dan praktis; dan membikin sel2 jang revolusioner di seluruh tempat2 jang diduduki oleh ka- um Tani, Landproletariaat dan semi Proletariaat.

Kaum Komunis harus mengerti, baha- wa penghidupan Massalah - Agraria (Agrarian Question) dan meninggikan deradjat serta penghidupan Kaum Tani, adalah berarti memadjukan dan memper- tjepat djalannya Pergerakan revolusioner diseluruh dunia.

Memadjukan Pertanian dan meluas- kan serta memperdalam pengetahuan ten- tang Agrogeologie berarti menudju dan memperkuat Revolusi Dunia.

Inilah kewadajiban kaum Komunis jg. terpenting! Lakukanlah pekerdjaan dia- tas!

Saja antar!!!!



Pemandangan alam jang indah.

Hari Ulang Tahun ke V.

MENDJELANG hari ulang tahun ke V berdirinya Barisan Tani Indonesia, kami uraikan sekedar buah fikiran tentang arti serta kedudukan organisasi Tani massa.

Berdiri serta pertumbuhannya Barisan Tani Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses revolusi di Indonesia. Barisan Tani Indonesia insjaf, bahwa kaum Tani jang merupakan golongan terbesar di Indonesia turut menentukan berpurnja roda revolusi.

B.T.I. sebagai pelopor selama lima tahun ini mengalami pahit-getirnja perdjongan rakjat Tani, tidak hanja dalam usahanja turut serta menegakkan negara, tapi djuga dalam usahanja merobah dasar2 susunan masjarakat Tani.



Sugiarto.

KITA semua mengetahui bahwa keadaan Tani di Indonesia lemah sekali, terdesak dan terkungkung di desa2 kedudukannya, dan sebetulnja demikianlah pula kedudukan Tani di lain2 negara. Sedjarah „boeren bevrijdingen“ (pembebasan Tani) di lain2 negeri seperti: Inggeris, Djerman, Rusia, Amerika, Djepang dll membuktikannya.

Tiap2 negara mempunyai masa'alah Tani sendiri2, hanja berlainan sifat dan tjoraknja. Segala sesuatu ini adalah akibat dari pertumbuhan arti tanah didalam „productie proces“, masa'alah mana tidak dapat dilepaskan dari masa'alah modal dan tenaga, masa'alah pertumbuhan kapitalisme.

Dari manusia jang hidup dari berburu telah timbul masjarakat Tani jang berdiam tetap, timbul masjarakat desa, kepala2 desa, suku2 bangsa, kepala2 suku2 bangsa, hingga timbulnja radja2 jg berkuasa atas tanah di dlm lingkungan bangsanja. Zaman feodalisme tln mulai.

Masa'alah sewa tanah, pembagian tanah mendjadi ramai, dengan sengketa2 jang terus-menerus; suasana sosial, su-

sunan ekonomi dan politiek negara sangat dipengaruhi.

Pertanian menghasilkan bermacam2 hasil bumi jang dibutuhkan untuk hidup. Timbul tukar-menukar hasil2 itu berupa barang, disusul oleh berkembangnja perdagangan dengan mempergunakan uang. Rumah tangga keuangan berpengaruh luas sekali atas sedjarah dunia. Perdagangan dalam negeri mendjadi perdagangan internasional. Lahirlah tanah2 djadahan (koloni). Zaman kapitalisme lahir mendesak zaman feodalisme jang mengerem perkembangan modal setjara tjepat, mengerem masuknja keuntungan setjara lebih hebat dan tjepat.

Modal jang terhimpun ada jang dimasukkan dalam tanah, hingga terdjadi grootgrondbezit, jang sangat mendesak kedudukan Tani. Ada jang dimasukkan dalam industrie, jang mendesak mati plattelands industrie dari kaum Tani — Handels — financieele — dan industriele kapitalisme berdjalan terus dengan tjara2 jang modern, mendesak kedudukan Tani diseluruh dunia, djuga di Indonesia.

Maka dari itu perdjongan Tani tidak

selesai dengan datangnya kemerdekaan negara, djustru ia barulah mulai. Disinilah letaknja arti djasa dari perdjongan Tani, jang dipelopori oleh B.T.I. kemudian disusul oleh lain2 organisasi Tani massa.

ATAS dasar ini maka organisasi Tani massa mempunyai hak hidup. Ia harus kuat dan sentausa:

1. Sebagai orgaan untuk menghadapi serangan dari luar (modal besar).
2. sebagai orgaan utk mengangkat derajatnja rakjat Tani sendiri.
3. Sebagai alat untuk mendidik anggota-anggotanja.

Mengingat uraian diatas, untuk kepentingan rakjat Tani, perlu sekali agar supaya Tani diberi kesempatan dapat mengatur peredaran dari hasil produksi tanahnja sendiri, sebagai sendjata perdjongannya. Dan ini tidak boleh dilepaskan dari faktor2 agraris jang turut menentukan perdjalan sedjarah negara kita.

Dengan demikian djelas, bahwa perdjongan Tani jang berupa organisasi Tani massa merupakan conditie sine qua non (didalam perdjongan negara dengan kalangan Tani, tapi perdjongan organisasi vak dan koperasi ini tidak akan kuat dalam menjelesaikan masa'alah Tani, djika tidak didukung oleh organisasi Tani massa. Ini terutama perlu dikemukakan dlm negara kita pada ini waktu, sebagai bekas negara koloni.

Kami mengetahui bahwa B.T.I. insjaf akan hal ini, dan mudah2an ini mendjadi pendorong bagi hari2 jang akan datang, utk meneruskan perdjongannya.

BATJAAN RAKJAT MERDEKA:

„PEDOMAN“

Harian Umum. Harga Langganan : f 8,50 sebulan.

„SIASAT“

Warta Sepekan. Harga Langganan : f 5,— sebulan.

Alamat :

Djl. Pintu Air 23 — Postbox 194 — Tilp. 1943 — Gambir
13—8/9 R. DJAKARTA.

Menengok kebelakang.

Memandang Kemuka.

Oleh: Rs. Hadisumarto.

PADA 25 NOVEMBER 1950 ini genaplah 5 tahun usia Barisan Tani Indonesia. Sebagai halnya keadaan baji pada umumnya, juga B.T.I. selama mentjapai umur 5 tahun ini, tidak luput dari godaan, penderitaan, dan bermacam2 kesulitan, kesemuanya itu merupakan ujian bagi kelangsungan tegaknya perdjongan.

Djustru karena para nachoda B.T.I. lulus dalam mengatasi gelombang alun yang maha dahsyat itulah, maka B.T.I. selamat dapat mentjapai usia 5 tahun, walaupun dengan penuh rintangan.

Apakah daja kita sekarang sebagai kaum pembimbing B.T.I. untuk memperkuat kedudukannya, hingga tertjapai apa yang ditjaja2kan dalam Anggaran-Dasarnya, jaitu: mentjapai masjarakat yang sosialis?.



Rs. Hadisumarto.

UNTUK maju kedepan kearah tertjapainya tjaja2, kita wadajib menengok pengalaman2 kita kebelakang dengan mengoreksi segala kekurangan-kekurangan kita.

Massa Tani yang alam pikirannya statis, ini disebabkan karena:

- a. Lamanja mereka diperbodoh oleh pendjadjah Belanda.
- b. Dasar penghidupan mereka yang agraris dari hasil pertanian dan sifatnja hanja menanti akan hasil tanamannya yang tidak dapat dipertjepat sebelum waktunya, menjebakkan si Tani menjadi statis seperti sekarang ini.

Djadi kewadajiban kita sekarang yang pertama-tama ialah: merobah alam pikiran si Tani dari alam statis, menjadi alam dinamis.

Adapun dynamisierungsproce ini tidak dapat hanja dirobah dengan djalan pendidikan jaitu memasukkan ideologie sa

dja, tetapi kita harus merobah keadaan dulu dasar penghidupan mereka. Disamping ini barulah ideologie dapat dimasukkan kepada mereka. Karena hukumnja: „Keadaan merobah pikiran seseorang“.

Tetapi bagaimanakah kita dapat merobah dasar penghidupan masjarakat sekarang, sedang ekonomi Negara kita sudah dilumpuhkan oleh perdjandjian K.M.B. yang rupa2nja ditaati betul oleh Pemerintah?

Jang amat menjedihkan ialah, bahwa masjarakat kita yang sudah sengsara karena tekanan ekonomi sekarang ini masih belum mengakui sebagai golongan yang tertindas, jaitu ditindas dengan eksploitasi (pemerasan) kaum imperialis modal besar. Tetapi inipun mereka tidak boleh kita salahkan, karena tebalnja adjaran dari kaum feodalis dan adjaran2 setjara dogmatis, umpama: bahwa nasib seseorang itu sudah ditakdirkan. Atau karena adjaran: sekalipun sengsara hidup didunia, tapi suka kalau menang, akan mendapat kebahagiaan dikemudian hari.

Berhubung dengan itu, karena tudjuan B.T.I. dalam mentjapai masjarakat yang sosialis itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan kenjataan2, maka lapangan kewadajiban B.T.I. dalam mentjapai tudjuannya, kita harus menjempurnakan 3 lapangan pokok, jaitu:

1. Memperkuat (consolidasi) Organisasi B.T.I.
2. Mempertinggi pendidikan masjarakat
3. Menjempurnakan susunan pemerintahan.

Kita bentangkan dalam garis besarnya sbb:

1. Konsolidasi Organisasi.

- a. Bentuklah ranting2 B.T.I. sampai di pelosok2 desa.
- b. Bentuklah kader2 B.T.I. yang militant di tiap2 ranting untuk membimbing massa jg abstract itu menjadi konkret.
- c. Adakanlah sering pertemuan dan diskusi. Djangan hanja memberi penerangan sadja, utamakanlah mendengarkan kemauan para anggota sambil mengukur kekuatan mereka.
- d. Wujudkanlah usaha2 jang mendjadi kebutuhan anggota langsung sehari-hari.

2. Mempertinggi pendidikan masjarakat.

- a. Djelaskanlah kepada para anggota, bahwa kemelaratan jg mereka derita itu akibat tekanan ekonomi kaum kapitalis/imperialis.
- b. Bentangkanlah bahwa perdjandjian K.M.B. yang diantaranya kembalinja perceel2 dan paberik2 asing yang sudah diterima oleh Pemerintah itu dan membawa kemelaratan bagi kaum buruh dan Tani, hanja dapat dilenjakkan djika siburuh dan sitani sudah bangkit dan tidak mau ditindas lagi.

3. Menjempurnakan pemerintahan.

- a. Orang2 yang merupakan alat pemerintahan harus orang yang berdjawa progressief, sedikitnja orang yang memikirkan nasibnja kaum Buruh dan kaum Tani.
- b. Alat2 pemerintahan diinsjafkan, bahwa selama Negara kita terikat perdjandjian K.M.B., ekonomi kita terus-menerus sulit, obatnja hanja satu ialah dibatakkannya K.M.B.

Beberapa peringatan.

1. Insjafilah bahwa Tani umumnya kaum bordjuis ketjil, djadi mereka tidak dapat kita masukkan sebagai golongan revolusioner. Kita hanja meneneutaliseer mereka djangan sampai turut menjadi golongan reaksioner.
2. Perdjandjian K.M.B. mudah dibatalkan, djika klas buruh dan Tani yang tertindas sudah bangkit sendiri utk tidak mau ditindas lagi dan dapat menginsjafkan pemerintah untuk tidak mentjintai lagi perdjandjian K.M.B.

Kearah Pembangunan Tani.

Oleh : Soekemi.

SEPANDJANG perdjongan kemerdekaan bagi tiap2 tanah djadjahan atau setengah djadjahan hakekatnja adalah perdjongan Ra'jat Tani.

Sebab itu jang perlu dan penting kita harus dapat mentjari soal2 jang pokok didalam kalangan Tani sendiri. Kalau didalam masjarakat Tani sendiri kita belum dapat mentjari soal2-nja apa jang harus kita ketahui, maka untuk tudjuan jang pokok kita harus mengetahuinja lebih dulu. Untuk menindjau kembali bersama 2 dalam pertimbangan dan pandangan ini kiranya perlu diadakan tindjauan kembali.

Masjarakat desa adalah masjarakat agraria. Pertanianlah jang mendjadi dasar kehidupan dan pokok ekonominja. Sebab itu perdjongan kita untuk selanjutnja tidak boleh melupakan dasarnya diatas dan keperluannya. Apa keperluanja dan kebutuhannya Ra'jat dalam masjarakat Tani sendiri, kiranya dapat kita petjahkan seperti dibawah ini:



SOEKEMI.

1. Perdjongan jang sipatnja **politis** — tjahan dan soal2nja jang pokok untuk **economis**, umpamanya: soal agraria atau tanah, ialah dasar dan sjarat jg mutlak bagi — adanya dan hidupnja pertanian: mitsalnja jang mengenai hak tanah, hak air, djuga jang mengenai atau jang menghadapi usaha-bangsa asing, umpama persewaan tanah. Soal pajak dan soal credit dll.
 2. Perdjongan jang sipatnja **sosial** — **economi**, umpamanya, soal = kope-rasi, kolektificatie, lumbung, hubungan kerdja, kehidupan kaum Tani, kebutuhan kaum Tani dll, jang sipatnja menguntungkan.
 3. Perdjongan jang sipatnja **tehnis** — **economis**; umpamanya: soal mec-anisasi, tecnificasi, modernisasi, intensivering, rasionalisasi, transmigrasi. Satu dan dua ini mungkin di Djawa tida dapat di njatakan, hanya di luar Djawa kiranya bisa di djalankan karena tanahnya agak luas.
 4. Perdjongan jang sipatnja **psychologis** — **sociologis**; umpamanya, jang mengenai Pak Taninja sendiri sebagai orang dan sebagai anggota Masjarakat. Hal ini mengenai Pemerintahan, pendidikan kedaulatan Ra'jat, penerangan, Dewan Desa, otonomi dll. jang dibutuhkannya.
- Mendjadi usaha jang pokok dalam keterangan atau penindjauan masalah Tani diatas, mulai No. 1 sampai 4 isinja ialah tidak lain:
- a. meninggikan ketjerdasan otak bagi kaum Tani.
 - b. meninggikan tingkat kehidupan dan penghidupan serta mendidik mereka kearah keinsjafan berdiri sendiri dalam soal2 pengertian umum.
 - c. Orang2 jang dapat mendjadi pelindung keamanan dan hak2nja ialah Kepala Desa dan pamongnja.
 - d. Orang2 jang dapat menolong berupa materi dalam kesukaran dan penderitaannya, umpama: pelepas uang, kaum tengkulak dan orang2 kaya.
 - e. Orang2 jang dapat menjelamatkan hidupnja.
 - f. Orang2 jang memberi petunjuk dalam soal kehidupannya sehari2, ialah orang2 tua jang banjak pengalamannya dan djudjur.
 - g. Orang2 jang dapat mendjadi pelindung keamanan dan hak2nja ialah Kepala Desa dan pamongnja.
 - h. Orang2 jang dapat menolong berupa materi dalam kesukaran dan penderitaannya, umpama: pelepas uang, kaum tengkulak dan orang2 kaya.

Dalam psychologis massa hal diatas belum dapat kita lupakan, terutama untuk pemimpin2 pergerakan Tani di Desa; bahwa kebanyakan sdr2 pemimpin2 pergerakan di Desa, masih belum mendapat tempat kepertjajaan, seperti orang tsb, bila tidak ada pembawaan atau sjarat salah satu diantaranya sjarat2 diatas.

Sekarang bagaimana dan apa soal-nja? Disini sekarang Ra'jat Tani kenja-taannya berhadapan dengan bentukan organisasi jang kokoh rapi dari kaum modal jang memakai sistem feodalis. Setelah kita mengetahui soalnja jang pokok dan jang harus kita hadapi, maka perlu adanya organisasi Tani jang kuat, jang sementara ini belum akan memetjahkan masjarakat Tani sendiri untuk diadjak bersama2 melawan kapital jang bersifat feodalisme diatas. Akan menentukan bentuk dan tjorak organisasi itu, perlu diadakan penjelidikan dulu jang teliti, dan ditindjau kemungkinan-nja, didalam tiap2 daerah lingkungannya, sebab sifatnja berlainan. Kalau kita sudah dapat mempergunakan kemungkinan kemungkinan jang telah kita uraikan diatas, barulah organisasi Tani atau organisasi kita bisa kita bawa kearah tudjuan revolusi nasional jang bersifat anti pendjadjahan, atau konsekwen anti imperialisme. Ini pase pertama. Dalam tudjuan jang terachir perlu kita memberi didikan dan keinsjafan kepada mereka, disamping soal2 jang njata, jang selalu dihadapi dan dibutuhkan sehari2 umpama seperti jang telah kita uraikan diatas, didalam sifat perdjongannya, sjarat untuk kita adjak kearah masjarakat jang adil dan makmur (socialistis).

Sekianlah sekedar pandangan untuk memetjah soal Tani dan pembangunja lumajan bagi pertimbangan, dan perlu bagi siapa jang membutuhkan.

BERDIRI 5 TAHUN.

INI hari tgl 25 November 1950 B. T. I. tjukup berusia 5 th. Dlm 5 th itu sedjarah organisasi petani telah melalui djalan yg sulit dlm melakukan perdjangan pembebasan rakjat tani dari tindasan dan pengaruh sistim feodal dan politik pendjadjahan Belanda sedjak berabad2 yg lampau. Dlm 5 th ini B. T. I. telah mentjurahkan segala tenaganya bagi perdjongan dan kemadjuan rakjat tani tertindas.

SAMBIL memperingati ulang tahun kelima kalinya dari pada B. T. I. kita diharuskan memberikan pendjelasan tentang sifat dan bentuk masjarakat Indonesia didjaman pendjadjahan Hindia Belanda. Pertama, Indonesia adalah negara feodal dan kurang lebih 85% dari pada penduduknya terdiri dari rakjat tani yg berdasar atas penghidupan perekonomian ketjil2 (kleine producenten) yg terpentjar2. Sedjak berabad2, alat penghasilan perusahaan tanah berlaku setjara sederhana. Didjaman pendjadjahan sebagian besar dari pada penduduk yg berdjumla ± 70 djuta djiwa manusia itu langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dgn perusahaan tjotjok-tanam disawah2 atau diperkebunan. Bentuk politik negara dikuasai oleh beberapa golongan tuan tanah, regent2 dan wakil2 alat kolonial yg dibantu oleh tentara kolonial, polisi dan birokrasi yg telah dapat menguasai keadaan umum dlm beberapa abad yg lampau. Ketika pada djaman pendjadjahan penghidupan rakjat tani sangat tertindas disebabkan oleh tekanan modal, timbullah perpetjahan dan kemlauratan umum dlm masjarakat pertanian dan oleh karenanya seringkali timbul kekatajauan dan pembontakan antara golongan tani yg menentang tindasan kolonial. Sistim kolonial Belanda telah berabad2 melakukan hisapan mutlak dan tak sedikitpun memberikan bantuan bagi kemadjuan perusahaan tanah, akan tetapi sebaliknya pemerintahan kolonial itu dgn tudjuan yg tertentu mempertahankan sistim feodal kolot hingga kedudukan rakjat tani merdeka lebih mendjadi merosot pada tingkat perbudakan (serfdom). Kemadjuan perkembangan modal asing berdjalan pesat dan achimja kekuasaan kolonial djatuh dlm tangan klas baru, jaitu klas bordjuis nasional dan tuan2 tanah besar yg berhubungan erat dgn wakil2 modal internasional (Belanda, Inggeris, Perantjis, dll) dan dgn begitu Indonesia sedjak satu setengah abad dikuasai penuh oleh kekuasaan modal internasional. Kepulauan Indonesia sbg negara feodal merupakan suatu sumber

kekajaan bagi kemodalan, sumber bahan mentah bagi perindustrian kapitalis, sumber kerdja upah murah dan pasaran barang2 dagangan kapitalis dan oleh karena itu Indonesia sedjak th 1911/1914 mendjadi sumber pertentangan dan persaingan antara negeri2 kapitalisme/imperialisme. Bersama dgn kemadjuan kemodalan asing pertentangan2 antara negara2 imperialis mendjadi semakin tadjam.

Dlm kemadjuan ekonomi pendjadjahan klas bordjuis nasional dan alat2 negara yg mendapat sebagian keuntungan dari pada keuntungan modal umum, sama memihak dan membantu pada kepentingan kemodalan dan sebaliknya mereka itu menentang gerakan rakjat tani yg tingkat demi setingkat menudju pada persatuan aksi menentang tindakan sewenang2. Antara tahun2 1917/1924 disana sini mulai timbul gerakan tani teratur di Djawa dan Sumatera, akan tetapi gerakan2 itu belum mendapat pimpinan yg baik dan hanya di beberapa daerah sadja telah berdiri organisasi tani yg terpisah2. Sedjak tahun 1918 perdjungan rakjat tani, khususnya di daerah Priangan dan Djawa Tengah ditudjukan menentang tindakan2 reaksioner dari pada pegawai negeri bangsa Indonesia dan kemudian menuntut kenaikan sewa tanah dari tuan pabrik dan kenaikan upah kerdja diperusahaan (dipabrik2 gula dan onderneming2 lainnja). Selain dari pada itu rakjat tani di daerah pertanian tebu menuntut pembagian air setjara adil utk ladang2 dan tanaman padi. Seperti djuga dilain2 negeri feodal tanah dan air itu adalah alat yg terpenting bagi perusahaan tani. Sedjarah rakjat tani adalah sedjarah perebutan pemilihan tanah setjara mati2an antara tani kaya dan tani miskin. Perdjungan tani tengah dan tani ketjil di Indonesia thd politik kolonial dan kulturstelsel yg sangat ganas sedjak pertengahan abad ke XIX. Kemudian pada tahun 1940/1942 tingkat krisis kapitalisme telah memuntjak hingga meletusnja perang dunia ke II dan imperialisme Djepang melakukan intervensi thd tanah djadjahan imperialis Belanda dan berha-

sil menduduki Indonesia buat beberapa waktu. Dlm waktu meletusnja perang dunia ke II hampir seluruh negeri2 djadjahan mengalami perobahan politik setjara besar2an. Pada waktu pendudukan imperialis Djepang rakjat tani Indonesia menderita kesengsaraan yg tak terbatas dan pada waktu runtuhnja kekuasaan Djepang meletuslah revolusi nasional dan pada tahun 1945 rakjat mengumumkan kemerdekaannya dgn pembentukan republik rakjat Indonesia. Dlm peperangan thd agresi imperialis Belanda peperangan Inggeris yg menjerbu kembali pada bekas tanah djadjahannya, rakjat tani lah yg mendjadi backing teguh bagi pertahanan nasional. Dlm waktu 4 tahun rakjat tani telah memberikan segala tenaga dan benda2 bagi pertahanan negara dan mempunyai pemuda2 tani yg telah melakukan perdjungan aktif thd agresi asing. Puluhan ribu rakjat tani mendjadi korban. Setelah memakan begitu banyak korban, revolusi nasional, setelah dilumpuhkan tenaga revolusionernja dibelokkan oleh golongan bordjuis nasional komprador dan berahir dgn persetudjuan damai dgn wakil2 modal internasional (Belanda dan Anglo-Amerika) dan pertjideraan ini sangat merugikan rakjat tani pada waktu ini dan hari2 yg akan datang. Setelah adanya persetudjuan dgn golongan kapitalis/imperialis maka Indonesia itu kembali mendjadi negeri setengah djadjahan yg dikuasai oleh persatuan finans kapital yg dikepalai oleh imperialis Amerika dan sedjak itu rakjat tani Indonesia terlibat lagi dlm keadaan tindasan modal asing.

B. T. I. setelah berdiri 5 tahun lamanya telah memberikan banyak pengadjaran dan pengalaman yg berharga pada perdjungan rakjat tani. Dan sedjak itu rakjat tani mulai mendjadi maju, dan sadar akan nasibnja. Maka berhubung dgn keadaan baru dan berhubung dgn meruntjingnja suasana internasional maka B. T. I. itu harus merobah sikap dgn menindjau kembali pengalaman2 yg lampau, membenarkan kesalahan2 yg telah dibuatnja, mempererat hubungan rakjat tani dgn perdjungan kaum buruh, membentuk kader2 baru, membersihkan pimpinan pusat dari pada segala aliran oportunis dan sektarisme dan menindas setiap aliran reaksioner dlm kalangan B. T. I. sendiri, mendjalankan operasi yg tegas yg menudju pada persatuan seluruh

Hari Ulang Tahun ke 5 BTI.

SEMENDJAK lahirnja hingga saat ini perjuangannya B. T. I. mengalami kesukaran² dan rintangan² dari luar dan dalam Negeri sehingga belum dapat memberikan hasil yang lajak bagi kaum tani khususnya dan rakyat pada umumnya. Marilah kita renungkan segala penderitaan selama ini:

1. Lahirnja (tgl. 25-11-1945) pada saat itu bergelora Revolusi Nasional untuk menghadapi dan merebut kekuasaan Djepang dan sisa² kolonial Belanda yang sebagian besar adalah ditangan Pemuda Tani dan tak sedikit pengorbanan tenaga dan jiwa.
2. Menghadapi serangan² dari pihak Imperialis Belanda yang akan merebut kembali kekuasaan dengan menggunakan tentara dan agennja setjara politik halus untuk memetjah dlm lapangan politik-ekonomi yang mengakibatkan pertempuran antara kita dengan kita (pertempuran antara kaum tani dengan kaum tani lainnya dan rakyat pada umumnya (peristiwa Delanggu) yang sedikit korban dari Pemuda dan pimpinannya.
3. Tekanan dari dalam Negeri hari jg. berdarah tgl. 19 September 1948 penangkapan hampir seluruh anggota pimpinan dari Pusat sampai Ranting² dan anggota² tak sedikit menjadi korban masuk dalam tawanan yang tak sedikit penderitaannya moral dan materiel, lebih² setelah

Belanda masuk dalam daerah Republik (serangan tentara Belanda ke II tgl. 19-12-1948 banyak diantara kawan² pimpinan dan anggota yang tiwas atas perbuatan dari orang² jg tidak bertanggung jawab diantaranya sdr. Sardjo salah satu formateur dalam Konggres ke II. Pada saat itu boleh dikata hantjurlah B.T.I. Semua tenaga pimpinan terpentjar di masing² tempat sambil menjusun tenaga untuk gerilja menghadapi Belanda dan menjusun tempat kembali dalam daerah gerilja.

4. Setelah kota Jogjakarta kembali dlm lai dapat menjusun kembali tenaga pimpinan Pusat untuk melanjutkan perjuangannya dengan langkah pertama mengeluarkan statement 13 Oktober 1949, selanjutnya dapat melengkapi pimpinannya tgl 2 Nov. 1949 dan mengadakan konferensi Tani Seluruh Indonesia 22-26 November 1949 di Jogjakarta bersama² dengan organisasi tani lainnya (S.T. I.I. dan Petani). Pada saat itulah mulai muntjulnja kembali B.T.I. di seluruh Indonesia maupun menghadapi Pemerintah R.I., barulah mudiapi rintangan² dan reaksi berdjalan terus hingga dalam Konggres ke III telah menundjukkan tersusunnya kembali dari tiap² Tjabang meskipun belum sempurna.

5. Perjuangan bertambah berat pertanggungannya, hanya berganti sifat dari perjuangan pertempuran menjadi perjuangan ekonomi/sosial yang langsung menghadapi modal besar asing. Dalam perjuangan pada dewasa inilah sangat membutuhkan tenaga² yang berani dan sanggup menghadapi segala kemungkinan. Oleh karena itu dalam melaksanakan semua program dan tujduannya membutuhkan kekuatan yang riell (bucking dari massa).

6. Setelah mengalami beberapa ujian seperti tersebut diatas, menambah kemajuan yang melahirkan kader² yang kuat dan ulung dalam melanjutkan perjuangan B.T.I. dengan tjara yang lebih sempurna (organisasi lebih kuat dan teratur dengan pimpinan yang kuat menderita). Ternyata dalam kemajuan setiap waktu dgn. tambahnja anggota/Ranting dan Tjabang. Sehingga pada waktu ini dan yang akan datang ternyata sibuk dalam segala bagian Organisasi untuk melajani bermacam soal yang di kehendaki dan harus di perjuangkan dari dan untuk kaum tani khususnya dan rakyat pada umumnya. Tak sedikit pada pengorbanan dari tiap-tiap anggota dan pimpinan dalam melanjutkan perjuangan B.T.I. Kami yakin bahwa hanya dengan tjara inilah kita dapat mentjapai kemenangan dan dapat melaksanakan tjita-tjita hingga sampainya pada saat dan waktu yang lajak bagi hidup kaum tani. Sekali berdjuaug terus berdjuaug sampai berhasil.

tenaga dan organisasi petani hingga dapat terbentuknya persatuan rakyat tani jg teguh jg tak sadja memberikan djaminan akan kemenangan perjuangan tani, akan tetapi B. T. I. itu harus dapat merupakan sesuatu organisasi jg riell dan militan.

Achirnja dlm keadaan jg sekarang ini kewajiban B. T. I. ialah menuntut:

- a) berlakunya nasionalisasi atas semua tanah. Tanah utk mereka jg mengerdjakan.
- b) perubahan tanah jg menguntungkan pada tani ketjil dan tani miskin.
- c) menuntut dgn segera pembatalan per-setudjuan K. M. B.

Begitulah aksi jg aktueel jg harus diperjuangkan oleh B. T. I. dlm waktu jg singkat dan aksi ini harus mendapat bantuan dari seluruh kekuatan dan tenaga tani dinegeri kita.

Hidup dan menanglah perjuangan rakyat tani!!!

Jogja. November 1950.

Alimin.

5 th. Berdirinja Barisan Tani Indonesia.

SEDJARAH „BARISAN TANI INDONESIA“ tidak bisa dilepaskan dari pada sedjarahnja revolusi di Indonesia. Revolusi ini tentu sadja perubahan dalam susunan Politik, ekonomi dll. Tidak kurang² meminta pengorbanan jiwa dan harta. Perubahan ini tidak sadja ditujukan kepada sasaran Politik, artinja tidak sadja ditujukan kepada perpindahan kekuasaan dari tangan Belanda kepada Indonesia, tapi mesti dilapangan kehidupan rakyat, yang mesti perubahan kehidupan dari pada yang lama kepada yang baru.

Dalam penghidupan yang lama akibat dari politik pendjadjahan, rakyat yang banyak tidak diberi kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri. Ini sudah logis, karena yang sebenarnya pendjadjahan itu, tidak lain perebutan ekonomi dengan djalan menggunakan kekuasaan dan alat-alatnja pendjadjah.

TIDAK heran kita, dimana revolusi tahankan revolusi itu. petjah di Indonesia, segenap rakyat Dalam perubahan² ini djuga termasuk rakyat tani, yang membawa akibat perubahan jiwa dan pikirannya. Dan (Bersambung hal. 22).

Halaman Tehn

GAMBAR2 INI ADALAH OLEH2 ANGGOTA REDAKSI K

Sudah lama Negara tetangga kita itu memper-
jang kita muatkan disini baru sebagian ketjil dari
atkan agar diketahui oleh kaum Tani Indonesia chu-
patkah Negara kita memulai kearah kemajuan itu
mendjawabnja !!



1

1. **PUSAT PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA.** Kantor dan beng-
bél ditepi laut Palawan.

2. **TRACTOR.** Dari pantai menudju
ketanah pedalaman. Melalui sungai,
karena ta' ada djembatan. Dibela-
kang ada jeep (allround car). Di
Mindanao.

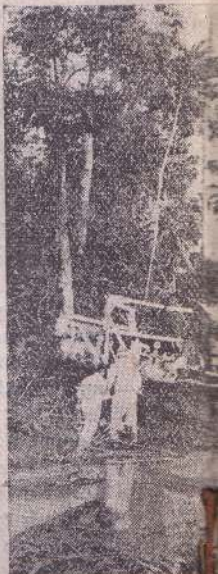
3. **MEMBUKA HUTAN ALANG2**
utk didjadikan sawah. Di Mindanao.

4. **BULLDOZERS.** Untuk membuka
hutan jang berpohon2 besar. Di
Palawan.

5. **MEMBIKIN PEMATANG.** Untuk
menahan erosi (bahaja bandjir),
ditanah jang berbukit2. Di Mara-
mag-Mindanao.



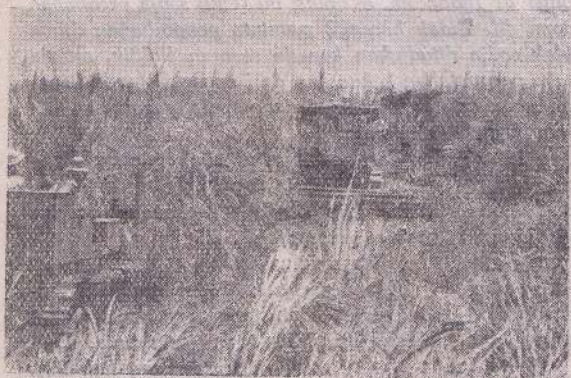
2



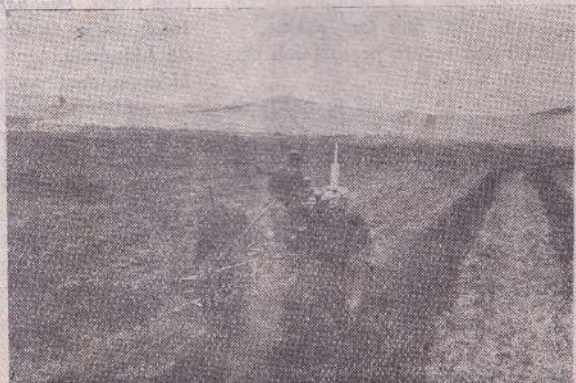
4



5



3



6

nik Pertanian.

KITA JANG PERNAH BERKUNDJUNG KE PILIPINA. pergunakan „mekanisasi pertanian”. Gambar2 i mesin2 pertanian jang dipakai disana. Kita mu- chususnya dan rakjat umumnja. Selandjutnja, da- tu? Pemerintah dan para Pemimpin kita harus



6. MEMBADJAK (MELUKU). Lihat luasnja tanah. Di Maramag.

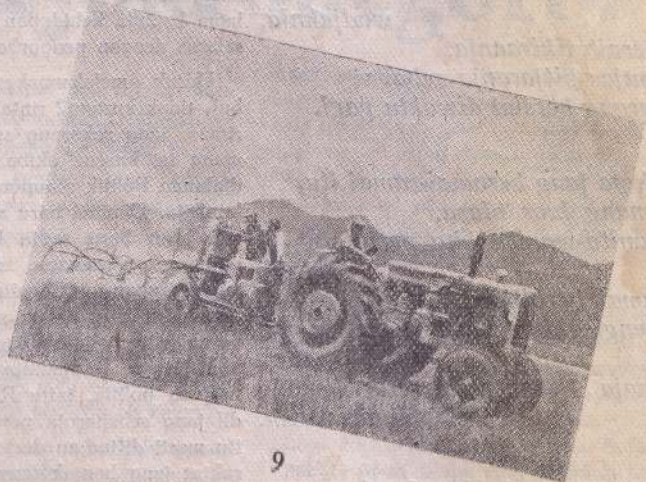
7. MENJIKAT (MENGGARU). Setelah selesai diluku. Di Alla Valley- Mindanao.

8. MESIN PENJEBAR BENIH. Di- tarik dengan tractor.

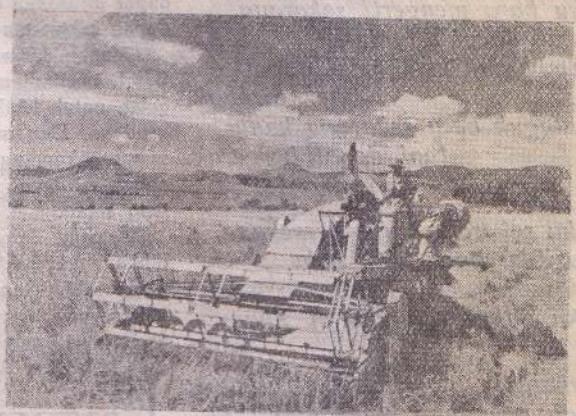
9. MESIN PEMBRANTAS HAMA. Setelah tanaman tumbuh, kalau kena hama. Di Maramag.

10. COMBINE. Mesin kombinasi, untuk mengetam dan menggiling padinja. Ada jang hanya mengetam saja. Di Mindanao.

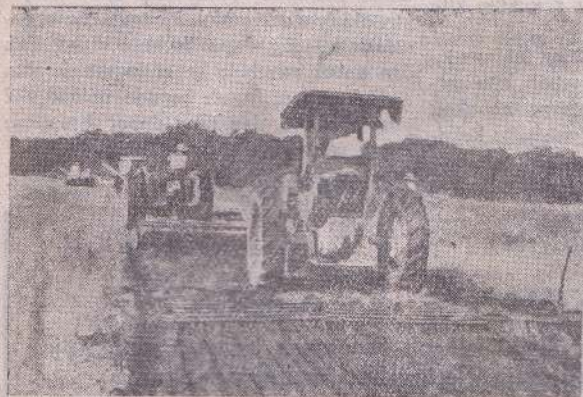
11. COMBINE. Dilihat dari dekat. Be- sar betul.



9



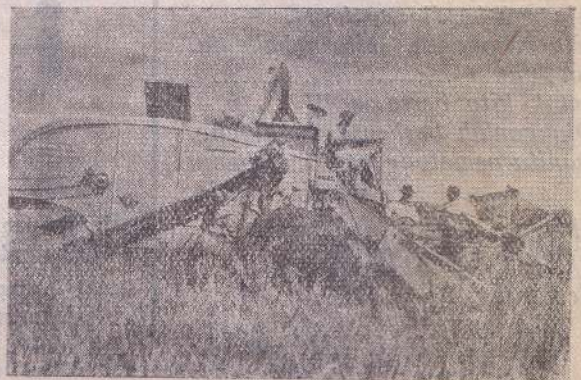
10



7



8



11

Pemotong padi turut beruntung.

Mereka bergembira,
bersenang hati berseri seri
wadjahnja,
djernih fikirannja,
lantjar bitjaranja sebagai
burung bersiul diwaktu pagi.

Sapa jang beramai-ramai itu,
senang luar biasa,
wanita-wanita kita pemotong
padi,
ramai berbitjara,
mengisahkan hasil tuntutan pak
tani,
hanja 1/6 meraka setor kepada
tuan tanah.

Belum pernah kita alami,
berabad-abad nenek moyangku
bekerdja terus,
2/5 untuk tuan tanah,
aku baru mengerti sekarang,
nasib dapat dituntut,
pembagian hasil padi dapat
dirobah,
sungguh baru sekarang kaum
tani dapat bergerak.

Aku sekarang turut bersenang,
nasibku turut baik pula,
biasanja
aku dapat 1/9 padi si Tuan
tanah
sekarang
tiap pemotong boleh ambil 1/6.
pak tani lebih banyak memberi
padaku,
tidak seperti tuan tanah jang
amat kikir !!!!

Ajo pak berdjoang terus,
kita membantu, kita membantu,
hasijnja
untuk kita bersama !!!
Djanganlah berhenti berdjoang,
wanita pemotong padi membantu
pula,
djangan kuatir
Tentu berhasil !!!
Semarang, 23-11-1950.

SRI.

(Sambungan hal. 19).

ketumbuhan inilah udjudnja. mendjelma
dimana pantjaroba sedang berlaku rak-
jat tani bersatu padu, tidak memandang
golongan dan agama, tani sedang, tani
ketjil, tani melarat, berkumpul untuk
mengadakan perobahan kehidupan jang
lama kepada kehidupan jang baru, jang
selaras dengan pengorbanannja.

Untuk melaksanakan usaha2 terse-
but, tidak kurang2 rintangan dan pende-
rita, jang sekarang sudah terasa, me-
mang ini karena akibat dari pada per-
djalanen Politik ataupun dari akibat dari
lain2nja. Dimana baru sadja kita menjun-
sun atau baru sadja kita sedang me-
ngumpulkan tenaga, maka datanglah
angin taupan jang begitu besar.

Seperti kita, dalam sedjarahnja, telah
pernah diumbang-ambingkan dimasa jang
lalu dengan terdjadinja beberapa perse-
tudjuan politik, jaitu Renville, K.M.B.
dll jang sebenarnya persetudjuan Politik
itu mesti ditindjau dari sudut kebutuhan
rakjat jang banyak termasuk djuga rak-
jat tani. Sebab kita mempunjai kejakinan
bahwa dengan adanja perobahan itu, bu-
kan perobahan kekuasaan hanja untuk
kuasa, tapi benar2 perobahan itu harus
dapat dirasakan dalam lapangan penghi-
dupan rakjat jang banyak.

Dengan dasar itulah, perlu organisasi
B.T.I. menindjau pengalaman pahit dan
getir, untuk lebih sadar dan insjaf akan
keadaan. Dan mesti organisasi kita di-
sempurnakan, agar kita dalam perdjo-
angan ini dapat mengukur kekuatan kita
jang sebenarnya.

Memang dalam kedjadian ini menje-
dihkan buat rakjat tani, sebab kita me-
ngeri rakjat tani ikut mempertahankan
kekuasaan jang telah ditjapai, jaitu keku-
asaan dari tangan Belanda sehingga pin-
dah ketangan Bangsa Indonesia, bukan

hanja untk pindahnja sadja, tapi kepin-
dahan itu supaja dapat dirasakan oleh
rakjat tani jang sudah lama menderita
kesangsaraan, kepahitan dan penderitaan
jang dapat dirasakan oleh rakjat tani
sendiri.

Rakjat tani sekarang mesti insjaf dan
sadar dan ketumbuhan ini mesti dipeli-
hard jang sebaik2nja. Apalagi karena
akibat Politik jang sekarang berlaku di-
dalam anti berhadapan dengan modal
raksasa asing, jang rapih organisasinja
maupun perlengkapan dan lain2nja.
Kita mengerti karena akibat politik jang
tidak mau menghiraukan kepada peroba-
han2 penghidupan rakjat tani dan rak-
jat Indonesia umumnja, segala sumber2
kekajaan jang mengenai kehidupan orang
banyak, masih ada dalam tangan mereka
(kapital asing).

Sedar akan keadaan kita sendiri, dan
apa jang kita hadapi dimuka kita, dan
dengan kekuatan diri sendiri, untuk me-
njusun organisasi kita.

Kesedaran atas kepertjajaan kepada
diri sendiri ini, mesti disalurkan kepada
organisasi jang teratur jang kemudian
dapat dipertanggung-djawabkan.

Didalam mempertanggung-djawabkan
kepada tjita2 rakjat tani djuga djangan
lupa kepada sjarat2 jang mesti diadakan
ialah diantaranya perobahan tjara ber-
pikir jang sebenarnya sebagai modal un-
tuk perdjoangan.

Marilah kawan jang sepaham terdjun
kelapangan massa, memberikan bahan2
untuk merobah rakjat tani tjara berpi-
kir, didalam arti untuk menguatkan orga-
nisasinja, jang dapat kiranja ditudjukan
dan untuk membela kepentingan mereka.

Rakjat tani butuh kepada petundjuk2
jang berguna, dan jang dapat dirasakan
untuk membela kepentingannja.

Tjirebon, Nop. 1950. Sukanda.

BATJALAH HARIAN :

15-8/9 R.

"FIKIRAN RAKJAT"

Sk. populer, tersebar diseluruh Sumatera Selatan chususnja
dan Indonesia umumnja. Setiap hari menghidangkan :

- Berita-berita hangat sekitar Tanah Air,
- Situasi Luar Negeri-Pergolakan Internasional.
- Istimewa berita-berita daerah, sekitar perkemba-
ngan politik, ekonomi sosial, perburuhan, peristi-
wa-peristiwa dll.
- Tadjuk2 Rentjana pembawa pendapat2 rakjat.
- Kritik pedas-tegas, berisi andjuran-andjuran.

Pemimpin Redaksi : M. J. SJAMSOEDDIN

Alamat Red.-Adm. : Tengkurak 50 Telf. 481

Langganan : Kota f 7.— Luar Kota 7,50 sebulan
Adpertensi Terbaik Untuk PERUSAHAAN TUAN.

Pidato Dr. Tjokronegoro.

II (habis).

SDR. KETUA! Mudah dimengerti, bahwa dengan dimiliki dan dikontrolnja oleh modal besar monopoli asing, semua „kommandoposten” dilapangan perekonomian Indonesia ini, maka seluruh perekonomian Indonesia betul2 berada dalam genggaman modal besar monopoli asing. Dengan keadaan jang sedemikian itu, tidak ada tempat sama sekali untuk perkembangan modal Nasional!

Apakah jang mëndjadi kepentingan pendjadjah dilapangan ekonomi?

Kepentingan pendjadjah dilapangan ekonomi adalah pertama2, mendapat laba jang sebesar2nja dari modal besar monopolinja jang telah tertanam disini, baikpun jang tertanam dalam bank2 besar, perusahaan2 produksi besar, maupun dalam perusahaan2/export, atau perusahaan2 transport besar. Pendapatan laba jang sebesar2nja ini, ditjapainja dengan segala matjam akal, jang didjalankannja dgn pertolongan dan perlindungan kekuasaan politiknya, jaitu pemerintah kolonial.

MISALNJA sadja :

1. Dengan membajar pajak jang seringan2nja. Ini ditjapainja dengan segala akal pembukuannja, hingga jang tertjat sebagai laba, hanja bagian ketjil sadja dari laba jang sebenarnya. Dengan demikian, masyarakat seluruhnja **dirugikan**.
2. Dengan membajar upah jang serendah2nja kepada tenaga Buruh dan Tani dan dengan membajar sewa tanah jang serendah2nja kepada Rakjat Tani.
3. Dengan membeli hasil perkebunan dan hasil pertanian Rakjat jang dapat diexport dengan harga jang serendah2nja.
4. Dengan mendjual hasil2 industri imperialis jang ada disini, seperti minyak misalnja, dengan harga jang setinggi2nja. Umpamanja sadja, bensin didjual disini dengan harga f 0,25 se-liternja sebelum perang dunia II, sedangkan beaja pembuatannya belum ada 1 sen se-liternja. Dan dinegerinja sendiri, jang pada waktu itu belum mempunjai tambang minyak sendiri, harga bensin adalah f 0,14 seliternja.
5. Dengan mendjual barang2 import dengan harga jang setinggi2nja.
6. Dengan mengadakan beaja angkutan jang setinggi2nja. Misalnja perusahaan kapal besar2, seperti Rotterdamse Lloyd, Stoomvaart My Nederland.

Dengan tindakan2 atau aturan2 istimewa, modal besar asing membasmi segala usaha Bangsa Indonesia, agar supaya mereka tidak mendapat saingan. Misalnja:

1. Tindakan2, jang dengan terang2an atau bersembunji, menghalang-halangi

langi bekerdja dan berkembangnja modal Nasional dilapangan import/export dan dilapangan industri.

2. Aturan2 jang menindas perkembangan perkebunan rakjat, seperti aturan restriksi export karet Rakjat dllnja lagi.
3. Aturan2 jg menjukarkan atau tidak memungkinkan berdiri/hidupnja perusahaan2 industri bangsa Indonesia.
4. Aturan2 jg menjukarkan pemberian kredit kepada bangsa Indonesia.

Sdr. Ketua! Dengan tindakan2 seperti tsb diatas ini, maka modal besar asing hendak tetap memegang kedudukan monopoli disegala lapangan ekonomi, dengan memberantas segala pertjobaan dan usaha modal Nasional untuk hidup dan berkembang. Supaja dengan begitu, modal besar asing, dengan bantuan penuh dari Pemerintah kolonial, tetap dapat memonopoli laba2 jang sebesar2nja disegala lapangan ekonomi itu. Disamping ini, modal besar asing, djuga dengan bantuan penuh dari Pemerintah kolonial, senantiasa berusaha **menekan penghidupan Rakjat**, agar supaya Rakjat tetap melarat penghidupannya dan dengan begitu, modal besar asing mudah memperoleh tenaga pekerdja jang **murah dan banjak**.

Lagi pula, modal besar asing dan Pemerintah kolonial senantiasa berusaha untuk membebaskan kepada **seluruh masyarakat**, djadi termasuk djuga Rakjat Buruh, Tani dan pengusaha ketjil, segala kesukaran jang dihadapinja pada waktu ada krisis ekonomi. Dengan begitu modal besar asing menghindarkan diri dari kerugian2 besar. Sebab kerugian2 besar ini dilimpahkan olehnja kepada pundak Rakjat. Misalnja sadja: pada waktu ada krisis ekonomi, Buruh dan pegawai ditu-

runkan gadjinja atau dilepas begitu sadja dalam jumlah jang banjak. Kontrak sewaan tanah jang telah diadakan oleh modal besar asing dengan Rakjat, dirobek begitu sadja, dengan idzin Pemerintah kolonial dan dengan tidak memberi kerugian kepada Rakjat Tani. Segala pajak dinaikkan, pajak2 baru diadakan.

SDR KETUA! Tujuan modal besar asing, supaya Rakjat Indonesia tinggal tetap melarat, dibantu tertjapainja oleh Pemerintah kolonial. Bukti adalah:

1. Pajak2 jang berat, jang tidak adil bagi Rakjat, seperti pajak bumi, pajak upah dllnja, jang menekan kepada Rakjat lebih banjak daripada pajak jang harus dibajar oleh Perusahaan2 modal besar asing, terutama kalau diingat, bahwa mereka dengan segala akal dlm pembukaan selalu memperketjil labanja.
2. Politik pemerintah kolonial, untuk selalu menekan harga hasil bumi Rakjat, agar supaya Rakjat Tani tetap berpenghasilan sedikit.
3. Tidak adanja bantuan jang sungguh2 kepada Rakjat Tani, jang dapat meningkatkan penghasilannya. Seperti umpamanja, mengadakan bangunan pengairan jang tjukup banjak, mengadakan kredit jang murah dan mudah bagi Rakjat, mengadakan perbaikan pertanian dsbnja. Dibangunkannya Alg. Volkscredietbank dan Landbouwwoorlichtingsdienst adalah sebenarnya hanja schijnbewegings sadja. Sebab didalam praktek, tjara bekerdjanja AVB tidak disukai oleh Rakjat dan karenanja, Rakjat segan2 untuk berhubungan dengan AVB. Dari statistik2 dapat dilihat, bahwa sedjak berdirinja Landbouwwoorlichtingsdienst, malahan penghasilan pada rata2 per HA makin merosot.

Akibat daripada ekonomi kolonial bagi seluruh negeri dan Rakjat adalah:

1. Indonesia tinggal **tetap** suatu negeri pertanian ketjil jg amat terbelakang.
2. Tidak ada industri nasional besar jg berarti, baikpun jang berat maupun jang ringan.
3. Negeri dan Rakjat tetap melarat keadaannya, karena penghisapan kolonial.
4. Rakjat terbelakang dalam segala2nja.
5. Ekonomi jang sangat terpengaruh oleh „conjunctuur”, karena ekonomi

djadjahan menjadikannya diri kepada system imperialisme internasional. Karena itu mudah terombang-ambing, hal mana turut dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sekianlah tentang hal susunan dan teknik ekonomi kolonial. Dari ini sudah jelas kiranya, bahwa selama modal besar monopoli asing masih menguasai seluruh lapangan perekonomian, seperti halnya di Indonesia, sebagai akibat dari persetudjuan KMB, maka **mustahillah** ekonomi nasional dapat dibangun dalam arti kata yang sebenarnya. Jelas pula, bahwa soal kemerdekaan ekonomi dari belenggu pendjadjah, yaitu modal besar monopoli asing, adalah suatu **soal umum** bagi bangsa Indonesia, suatu soal yang mengenai kepentingan ekonomi bangsa Indonesia **seluruhnya**, bukan saja golongan Buruh, Pegawai, Tani dan pengusaha ketjil, melainkan pula golongan modalnya, golongan modal nasional. Atas dasar **persamaan kepentingan yang nyata** bagi segala lapisan Rakyat kita ini, sebenarnya dapat dibangun suatu front nasional anti pendjadjah yang kuat untuk merebut kemenangan penuh dilapangan Politik dan Ekonomi.

Sdr. Ketua! Berlainan sekali dan bertentangan dengan susunan ekonomi Kolonial, adalah susunan **ekonomi nasional**, yaitu susunan ekonomi yang dapat **memadjukan dan memakmurkan** negeri dan seluruh Rakyat. Syarat mutlak untuk membangun ekonomi nasional di Indonesia ialah, **kebebasan penuh** dari kekuasaan modal besar monopoli asing.

Azas2 ekonomi nasional sudah tertantun sedjak permulaan revolusi kebangsaan kita ditahun 1945, dalam fasal 33 UUD RI aseli. Kemudian, fasal 33 UUD RI aseli ini, dipindahkan dalam UUD baru sebagai fasal 38. Akan tetapi, ada perbedaan yang besar sekali antara fasal 33 UUD RI aseli dan fasal 38 UUD baru. Negara RI yang diproklamasikan pada tgl 17 Agustus th '45, adalah suatu **Negara Revolusioner**, yang **bebas penuh** dari kekuasaan modal besar asing. Padahal Negara kesatuan RI, bukanlah suatu Negara Revolusioner lagi, melainkan suatu Negara yang sudah **mengikatkan** diri dengan pendjadjah, melalui persetudjuan KMB dan dengan demikian, telah merosot kepada kedudukan djadjahan lagi. Djadi sebenarnya, fasal 38 UUD baru, bagaimanapun juga, **tidak mungkin** dipraktekkan!

S DR, KETUA! Bagaimanakah susunan ekonomi, menurut fasal 33 UUD RI aseli?

1. „Kommandoposten“ disegala lapangan ekonomi, yang tadinya berada ditangan modal besar monopoli

asing, mesti dimiliki oleh **Negara**. Misalnja perusahaan perindustrian besar, perkebunan2 besar, perusahaan2 perkapalan besar, perusahaan2 import/export dllnja. Menurut azas perdjuaan kebangsaan yang anti pendjadjah, maka perusahaan2 ini, sebagai milik musuh, harus **disita** oleh Negara. Dengan dimilikinja perusahaan2 besar ini oleh Negara, maka laba2 besar yang didapat dan padjak2 yang djumlahnja banjak, jg harus dibayar oleh perusahaan2 besar ini, djatuh ditangan negara. Djadi, segala kekajaan yang dihasilkan oleh perusahaan2 besar milik Negara ini, dapat digunakan oleh Negara, untuk membeajai semua keperluan masyarakat.

2. Azas kedua adalah: tanah, yang bukan milik Tani dikuasai oleh Negara supaya Negara dapat memberikannya kepada Tani yang memerlukanja, dalam djumlah yang tjukup, untuk penghidupan yang lajak dengan keluarganja. Dan djuga, supaya Negara dapat mengatur keperluan tanah untuk kehutanan dan untuk perusahaan2 pertanian dan perkebunan Negara yang besar2. Air dikuasai oleh Negara, supaya Negara dapat mengatur penggunaannya untuk kepentingan masyarakat seluruhnja, umpamanya untuk kepentingan pengairan, perusahaan2 listrik, saluran2 besar dllnja. Kekajaan alam yang terkandung dalam bumi, dikuasai oleh Negara supaya dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan2 tambang dan perindustrian berat yang besar, milik Negara, yang dapat menguntungkan seluruh masyarakat. Dari kedua azas ini, teranglah bahwa modal besar Negaralah yang mempunyai **kedudukan monopoli**, jg tadinja berada dalam tangan modal besar monopoli asing. Hal yang sedemikian itu perlu sekali, oleh karena modal besar negaralah, yang harus menjadi **pemimpin dan regulator** (pengatur) perekonomian Negeri seluruhnja.

3. Azas ketiga, yang terkandung dalam perekonomian menurut fasal 33 UUD RI aseli adalah: bahwa terutama kepentingan golongan **pengusaha ketjil**, yaitu Rakyat Tani dan pengusaha ketjil lainnja serta kepentingan golongan **konsumen** ketjil yang harus diperhatikan oleh Negara. Golongan2 ini harus diandjurka untuk bekerdja setjara **koperatif**, oleh karena djalan koperatif ini, adalah satu2nja djalan baik yang dapat mendjamin kemadjuan dengan pesat kearah

penghidupan yang lajak dan kemakmuran. Dengan sendirinja, negara harus memberi **pimpinan dan perlindungan** yang setjukupnja, kepada perusahaan2 koperatif ini. Tidak tjukup, bila Negara hanya memegang peranan sebagai pendorong saja dalam pada ini, seperti diterangkan oleh Pemerintah. Perlindungan dan pimpinan negara terdiri atas, misalnja: pemberian kredit yang tjukup, pemberian bahan2 dan alat2 yang diperlukan, pertolongan untuk export, padjak yang ringan dsbnja. Perlindungan dan pimpinan ini bisa terdjamin adanya, kalau **Negaralah** yang memegang kekuasaan ekonomi seluruhnja dan **bukan** modal besar asing seperti di Indonesia sekarang, yang masih terikat kepada persetudjuan KMB. Karena ini, karena syarat mutlak, bahwa **negara** yang harus memegang kekuasaan ekonomi dan politik seluruhnja **tidak** dipenuhi, maka sudah dapat dipastikan lebih dahulu, bahwa program Pemerintah, untuk menghidupkan gerakan koperasi2 Rakyat, **tidak** akan berhasil sebagai mana mestinja.

4. Azas keempat adalah: Kesempatan yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan partikelir disegala lapangan untuk hidup dan berkembang, guna melajani kepentingan masyarakat seluruhnja, bersama2 dengan kepentingannya sendiri. Golongan modal nasional ini dizaman pendjadjahan, **tidak** diberi kesempatan sama sekali untuk hidup dan berkembang. Apa lagi **pertolongan** untuk ini!

Perusahaan2 partikelir dalam system ekonomi menurut fasal 33 UUD RI aseli diberi kesempatan untuk berkembang, hingga mereka mentjapai kedudukan yang bermonopoli. Pada waktu ini, perusahaan2 itu harus dinasionalisasi, harus didjadikan milik Negara dengan diberi kerugian. Sebab, semua perusahaan2 besar yang mempunyai kedudukan monopoli, seperti tadi halnya dengan perusahaan-perusahaan besar milik modal besar asing, harus dinasionalisasi. Bagaimanapun djuga, bagi iniatif partikelir nasional, terbuka kemungkinan dan **kesempatan yang tjukup luas**, untuk berkembang disegala lapangan perekonomian, menilik keadaan ekonomi Indonesia jg masih sangat terbelakang itu. Kesempatan dan kemungkinan ini tidak dapat dlm lingkungan ekonomi kolonial.

S DR, KETUA! Demikianlah azas2 ekonomi nasional menurut fasal 33 UUD RI aseli, yang sekarang sudah **dikebiri**, hingga menjadi fasal 38 UUD baru. System ekonomi sematjam ini

mendjamin keuntungan, bukan sadja bagi golongan Rakjat pekerdja, Buruh dan Pegawai, Tani dan pengusaha ketjil, melainkan djuga bagi golongan modal nasional. Systeem ekonomi ini mewujudkan **demokrasi yang luas** dilapangan perekonomian, sesuai dengan sifat kedemokrasian daripada revolusi kebangsaan kita. Systeem ekonomi ini menunjukkan pula sifat yang **lebih maju**, kalau dibandingkan dengan systeem ekonomi liberal yang sudah bobrok itu. Selanjutnja, systeem ekonomi menurut fasal 33 UUD RI aseli merupakan suatu dasar yang kuat, bagi **persatuan nasional anti pendjadjah** yang kokoh.

S DR. KETUA! Susunan ekonomi menurut fasal 33 UUD RI aseli, memenuhi segala sjarat yang diperlukan, untuk memetjahkan setjara **revolusioner**, segala soal penting dilapangan pembangunan ekonomi, yang dihadapi oleh sebuah Negeri yang sedang berevolusi kebangsaan anti pendjadjah yang **demokratis**. Sjarat yang terpenting diantara ini adalah: **dikuasainja semua „kommandoposten“** dilapangan perekonomian oleh Negara. Sjarat ini membuka kemungkinan bagi Negara untuk:

1. **Memimpin** pembangunan ekonomi nasional setjara **teratur**, menurut rantjangan.
2. Menjadikan beaja2 yang tjukup guna membelandjai pembangunan ekonomi setjara besar2an dari laba2 yg didapatnja dari semua perusahaan besar milik Negara.

Indonesia, seperti djuga semua negeri djadjahan yang sedang berevolusi kebangsaan anti pendjadjah yang demokratis, menghadapi 2 **mas'alah pokok** yg berikut, dilapangan pembangunan ekonomi nasional. Jaitu:

1. Memetjahkan **masalah Tani**. Dengan mengadakan aturan2 dan tindakan2 yang memberi kemungkinan dan kesempatan bagi Rakjat Tani untuk **memperbaiki penghidupannja** dengan djalan, menambah penghasilannja sebagai Tani atau mentjari lapangan pekerdjaan lain. Mas'alah Tani dapat dipetjahkan dengan **tjara2 yang pokok** sbb:

- a. Mengadakan perubahan hukum agraria kolonial yang merugikan Rakjat Tani dan menjadikannja hukum agrasia nasional yang demokratis, yang menguntungkan Rakjat Tani. Supaja dengan demikian terdapat lebih banyak tanah, yang dapat diberikan kepada tani yang memerlukanja.
- b. Membangun industri besar milik Negara serta industri ketjil dan menengah milik kooperatif/kolektif

dan perseorangan. Supaja dapat memberi lapangan pekerdjaan dan penghidupan baru kepada Tani. Dengan demikian dapat pula mengurangi djumlah Tani yang memerlukan tanah.

- c. Mengadakan transmigrasi setjara besar2an kepulau2 lain, dimana masih banyak tanah yang terluang.
 - d. Mengadakan perbaikan tehnik disegala lapangan pertanian, agar supaja penghasilan pertanian Rakjat dapat dipertinggi. Akhirnya, sedjadar dengan **kemajuan industri nasional**, mengusahakan modernisasi dan mekanisasi pertanian Rakjat setjara kooperatif/kolektif, dengan pimpinan dan bantuan Negara.
 - e. mengadakan systeem krediet Negara yg dapat memberi krediet yg murah dan mudah kepada Rakjat Tani serta pengusaha ketjil dan menengah lainnja.
2. Mas'alah pokok yang kedua ialah: merubah dengan setjepat2nja, Indonesia sebagai Negeri pertanian ketjil yang sangat terbelakang, menjadi suatu Negeri **modern yang berindustri**. Untuk membangun industri nasional setjara teratur dan tjepat, harus dipenuhi beberapa faktor, jaitu:
- a. Membangun lebih dahulu **dasar yang kuat** bagi pembangunan industri nasional ialah: **industri berat yang besar milik Negara**, diantara mana adalah pertambangan2 besi dan batu bara, pabrik2 besi dan badja serta pabrik2 mesin.
 - b. Disamping ini membangun industri2 pokok lainnja yang besar milik Negara dan industri ringan yg besar milik Negara.
 - c. Selanjutnja, membangun perindustrikan ketjil dan menengah milik kooperatif/kolektif dan milik perseorangan, dengan **bantuan dan pimpinan Negara**.

S DR. KETUA! Selain mas'alah2 yg pokok ini masih ada mas'alah2 lain, yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi nasional yang harus pula dipetjahkan, misalnja:

1. Pembangunan dan pengeluaan perusahaan2 transport besar milik Negara, dan perusahaan2 transport ketjil dan menengah milik kooperatif/kolektif dan milik perseorangan.
2. Pendidikan setjara luas kepada Rakjat, supaja dapat dilajani keperluan masyarakat tenaga2 yang banyak bagi pembangunan ekonomi.
3. Pembangunan **system baru** utk peredaran barang, yang **dipimpin** oleh

Negara dan didjalankan bersama oleh Negara dan koperasi2 Rakjat serta toko2 partikelir. Dengan djalan ini, maka peredaran barang dapat merata dengan lebih baik, lebih lanjut dan lebih murah, serta lebih adil, daripada dizaman pendjadjahan, dengan djalan yang lama.

4. **Mempertinggi tenaga pembeli** masyarakat, sebagai sjarat yang penting untuk perkembangan ekonomi seluruhnja dengan tjepat. Bagian yang terbesar Rakjat kita (kl. 95%) terdiri atas kaum Buruh, Tani dan Pengusaha ketjil. Karena itu maka penaikan tenaga pembeli masyarakat terutama tergantung kepada penghasilan golongan Buruh, Pegawai, Tani dan Pengusaha ketjil ini. Penaikan tenaga pembeli bagi golongan Buruh dan Pegawai dapat ditjapai dengan pemberian upah atau gadjih yang sesuai dengan djiwa demokrasi daripada ekonomi nasional yang progressif. Penaikan tenaga pembeli bagi Rakjat Tani dan Pengusaha ketjil dan menengah, dapat ditjapai dengan berusaha setjara kooperatif/kolektif, yg dipimpin dan dilindungi oleh Negara. Penaikan tenaga pembeli masyarakat dapat ditjapai dengan politik pajak yang nasional dan demokratis, yang bertudjuan, meringankan beban pajak Rakjat, menetapkan penghasilan minimum bagi pembajaran pajak dan memungut pajak setjara progressif. Aturan2 ini dapat didjalankan, karena sumber penghasilan Negara terpenting, adalah: perusahaan2 besar milik Negara.

S DR. Ketua! Selesailah saja dengan penggambaran setjara ringkas tentang soal2 yang pokok, yang mengenai susunan ekonomi kolonial dan ekonomi nasional yang demokratis dan progressif. Kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Djelaslah sudah, bahwa dengan dikuasainja kembali „kommandoposten“ dilapangan ekonomi di Indonesia, oleh modal besar monopoli asing, maka **tidak ada kemungkinan sedikitpun** untuk membangun ekonomi nasional yang dapat menolong penghidupan Rakjat. Mempopagandakan, bahwa kemungkinan itu ada, **memperkosakan kebenaran**.
2. Sudah dapat dipastikan lebih dahulu, bahwa **tiap program** daripada tiap2 Pemerintah, yang didasarkan atas pelaksanaan persetudjuan KMB dan yang al. bertudjuan, memperbaiki keadaan ekonomi umumnja serta penghidupan Rakjat chususnja, **mesti akan gagal**, karena **sjarat2 pokok** untuk itu **tidak ada**.

Wanita dengan Perjuangan kelas.

DALAM tiap2 perjuangan kemerdekaan dari Negara/bangsa/rakyat djadahan atau setengah djadahan, kaum wanita tentu mengambil bagian. Karena dorongan yang akhirnya menimbulkan keinsyafan, atau olah keinsyafan yang memang sudah tertanam.

Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang biasa juga diberi istilah *revolusi nasional*, tenaga kaum wanita mewujudkan pula sebagian dari tenaga rakyat yang berjuang. Perjuangan untuk mengusir kekuasaan asing di Indonesia, kekuasaan kapitalisme/imperialisme.

Jang sampai saat ini belum banyak dimengerti oleh kawan2 kaum wanita, ialah: apa hakekatnya dari perjuangan kemerdekaan—, atau revolusi nasional ini? Hanya untuk mentjapai kemerdekaan bangsa saja, tidak lebih? Sehingga djika kita telah diperintah oleh bangsa sendiri, dengan Presiden dan Menteri2 bangsa sendiri, itu sudah tjukup?

BUKAN demikian. Hakekat dari perjuangan kemerdekaan ini, tak lain ialah **perjuangan kelas**. Jaitu antara kelas yang tertindas, dengan kelas yang menindas. Jg disebutkan kelas jg tertindas, ialah bangsa/rakyat jg didjadjah tadi. Sedangkan kelas jg menindas, ialah kaum kapitalis imperialis yang memegang kekuasaan seluruh politik dan ekonomi rakyat. Merekalah yang harus dipatahkan kekuasaannya.

Sekarang, sebagian dari perjuangan kemerdekaan ini sudah berhasil. Kemerdekaan politik sudah dipegang oleh tangan bangsa Indonesia. Tetapi, kemerdekaan ekonomi belum dipegang oleh tangan bangsa Indonesia sendiri, jg se-

landjutnya, dipegang dan diatur oleh rakyat sendiri. Kita masih melihat, adanya kekuasaan modal asing jg besar. Masih terdapat konsesi2 jg luas, bagi para pengusaha asing, dgn djaminan tjukup dari politik Negara. Semua itu menimbulkan kontras dlm hidupnya rakyat.

Dimana modal asing masih dapat menimbun keuntungan jg banyak, dgn mempergunakan tenaga rakyat jg maksudnya, dihargai murah. Oleh adanya kontras jg demikian, lalu menimbulkan aktivitas2 rakyat jg berwujud tuntutan2 dari kaum buruh dan tani, pemogokan dari kaum buruh; dll.

Dlm menjalankan aksi jg demikian, apakah kaum wanita tidak ambil bagian? Apakah hanya kaum laki2 saja jg menjalankan?

Tidak. Kita tahu, bahwa dlm perkebunan2 milik asing, dlm pabrik2, perusahaan2, banyak pula wanita menjadi tenaga bekerdja. Jg ikut memberikan keuntungan kpd modal asing. Dan bahkan nasib mereka, sering lebih jelek daripada saudaranya kaum laki2 dlm pekerjaan. Tenaga2 mereka lebih rendah dihargaikan, karena kurang tjukup kuat menghasilkan, sebagai umumnya tenaga laki2. Pun berhubung dgn sifat2 kewanita-an serta keibuannya, menhendaki hari2 mengaso jg lebih banyak daripada kaum laki2. Jg semua ini dipandang dari sudut kepentingan modal, adalah rugi.

Karena keadaan jg demikian, maka kaum wanita ikut pula berjuang memperbaiki nasib. Dgn tjara, menggabungkan dirinja dlm organisasi2. Organisasi2 buruh bagi buruh wanita, dan organisasi tani bagi wanita tani. Selanjutnya, ikut pula dlm aksi2 jg diadakan oleh organisasi2-nja. Kianlah, dlm pemogokan2 menentang tindakan sewenang2 dari pihak madjikan (modal), kaum wanita ikut mengambil bagian, sehingga menang.

ITULAH wujud jg lebih nyata dari perjuangan kelas, dlm Negara jg telah sebagian merdeka ini. Dan kaum wanita, ternyata tidak bisa juga/luput dari arus perjuangan kelas jg sedang tumbuh kini dlm masyarakat kita. Belum lupa kiranya kita, adanya pemetjatan buruh2 wanita diperusahaan rokok di Surabaya tempo hari. Dgn alasan bahwa adanya buruh2 wanita itu merugikan, karena tenaga mereka jg tak dapat dipakai penuh seperti buruh laki2. Sikap jg demikian itu, adalah sikap jg sifatnya **merendahkan** kpd kaum wanita, disamping menjelundupi Undang2 Perburuhan dari Pemerintah.

Melihat kenyataan2 itu, maka pergerakan kaum wanita jg bertujdukan **mempertinggi** kedudukan kaum wanita, adalah sebagian dari perjuangan kemerdekaan rakyat. Sebagian pula dari **perjuangan kelas**. Ialah kelas tertindas melawan kelas penindas.

DALAM masyarakat kemodalan seperti sekarang ini, maka rakyat Negara2 djadahan serta setengah djadahan, dan rakyat di Negara2 kemodalan itu sendiri, menjadi rakyat jg tertindas. Maka wanitanya-pun, menjadi wanita dari kelas jg tertindas juga hal ini ternyata dari kurangnya hak2 wanita, dlm lapangan politik dan ekonomi, sebagai warganegara. Kurangnya juga penghargaan hidup sehari2.

Djika hal itu sudah dapat di-insjafi, maka tentu di-insjafi pula, pihak jg mana jg harus dibela oleh kaum wanita, dlm perjuangannya. Pihak jg menindas? Pihak kapitalis? Mempertahankan kapitalisme? Tidak. Kaum wanita, tentu harus pula memihak kpd kelas jg tertindas dlm perjuangannya. Kelas jg tertindas, ialah rakyat djelata. Jg bagi Indonesia terdiri dari kelas buruh/tani, serta golongan lain2-nja jg berdekatan nasibnja dgn kelas buruh/tani.

Mem bela kpd mereka, memperjuangkan kepentingan mereka, sama azasnja dgn mem bela dan memperjuangkan kedudukan kaum wanita, utk perubahan nasibnja. Mengapa? Sebab mem bela dan memperjuangkan kepentingan mereka, berarti memperjuangkan tertjiptanja masyarakat baru, sebagai gantinya masyarakat jg lama ini. Jg lebih sempurna dan tinggi tjorak susunannya. Dan dlm masyarakat baru itulah, bisa ditjptakan kehidupan baru bagi kaum wanita. Jg lebih baik dan tinggi pula daripada sekarang.

3. Mempertahankan persetudjuan KMB lebih lanjut, seperti yang menjadi tujuan pula dari pada Pemerintah Natsir, akan **lebih mempertinggi** lagi kesukaran2 dilapangan ekonomi dan kesukaran2 penghidupan Rakyat.

S DR. KETUA! Sekianlah tindjauan saja atas program pemerintah Natsir, berdasarkan azas2 perjuangan kebangsaan yang revolusioner dan anti pendjadjah. Pada pemandangan termyn kedua, akan saja landjutkan penindjauan saja, yang lebih mengenai detail2 bagian ekonomi dan keuangan daripada program Pemerintah Natsir.

Sebagai penutup Sdr. Ketua, saya menjatakan, bahwa fraksi BTI tidak dapat menerima susunan dan program Kabinet Natsir, sesuai dengan keputusan Pimpinan Pusat BTI, yang telah diambil dengan suara bulat, dengan alasan, bahwa Kabinet Natsir dan programnja terikat kepada persetudjuan KMB.

Sekianlah dan terima kasih.

Djakarta 4 Oktober 1950.

KONSTITUANTE.

PROGRAM Pemerintah no. 1 berbunyi: „Mempersiapkan pemilihan umum utk membentuk Konstituante setcepat mungkin“. Program ini dijelaskan dlm keterangan Pemerintah a.l. begini: „Bahwa dlm UUD sementara R.I. terdapat 2 buah badan yg terdiri dari anggota2 yg dipilih dlm suatu pemilihan yg berdasarkan umum yakni: D.P.R. dan Konstituante. Bahwa Pemerintah bermaksud akan memajukan rentjana Undang2 tentang pemilihan Umum anggota2 Konstituante dlm waktu yg sesingkat-singkatnja dan dgn memperhatikan Undang2 R.I. dulu No. 27/1948 serta persiapan2 yg telah dijalankan di Djawa dan Sumatera“.

Dari Program dan Keterangan Pemerintah itu dapat ditarik dua kesimpulan:

1. membentuk Konstituante setcepat mungkin,
2. memajukan rentjana Undang2 tentang pemilihan anggota2 Konstituante dlm waktu yg sesingkatnja.

Mengingat akan hal ini hendak diselenggarakan dgn serba tjepat, maka dirasa sangat perlu utk memberikan penerangan2 seluas-luasnja kepada chalajak ramai.

Perlu dijelaskan, bahwa ada dua matjam pemilihan umum, jaitu:

1. pemilihan umum anggota2 D.P.R. (Parlemen),
2. pemilihan umum anggota2 Konstituante.

Dlm hal ini Pemerintah tidak menjebutkan pemilihan utk membentuk D.P.R. melainkan utk membentuk Konstituante. Kira2 sebabnja karena: djika kedua2nja pemilihan umum itu diselenggarakan, akan memakan biaya yg sangat mahal. Dan UUD sementara memperkenalkan Konstituante merangkap menjadi DPR apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan anggota2 D.P.R. (pasal 138).

Persiapan2 pemilihan umum yg telah diselenggarakan ialah di pulau Djawa. Bagaimana keadaannya di Sumatera masih harus ditinjau, dan kemudian persiapan2 itu harus diteruskan di kepulauan2 lain seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda-ketjil dllnja.

Phase pertama Pemerintah akan memajukan Undang2nja, undang2 mana akan dimintakan pengesahan dari Presiden, setelah disetujui oleh D.P.R. sementara. Dan menurut Keterangan Pemerintah hal ini tidak lama lagi akan diadakan kepada Parlemen.

Dasar2 utk membentuk konstituante sudah lengkap diterangkan dalam UUD sementara, dan beberapa pasal yg berlaku buat D.P.R., berlaku juga buat Konstituante. Undang2 yg akan diadakan oleh Pemerintah jaitu mengenai aturan2

pemilihan umum, yg akan diperdebatkan dlm DPR Sementara.

Konstituante terutama diperlukan utk membuat UUD dan utk merubah UUD yg sudah ada. Peristiwa sematjam ini tidak akan sering terjadi, hingga Konstituante tidak akan banjak bersidang. Walaupun demikian Konstituante adalah penting, karena Konstituante membuat fundament Negara, yg ditjantumkan dalam UUD. Bahkan kedudukannya akan menjadi lebih penting, justru Konstituante ini dapat merangkap menjadi DPR, dewan mana setiap waktu dapat menentukan haluan Negara, bila diperlukan. Karena pentingnya ini, maka perlu kiranya Rakjat kita, sebagai Rakjat dari Negara yg sudah merdeka, didjadian Konstituante-minded (mengerti akan kedudukan serta tujuan Konstituante).

KESUKARAN yg pertama ialah bagaimana tjara mengertikan kepada Rakjat. Apakah yg dinamakan Konstituante itu? Bisa dijawab: Konstituante adalah Sidang Pembuat Undang2 Dasar. Bagi Rakjat terpeladjar hal ini mudah dimengerti, tetapi bagi Rakjat lain2nja penerangan dititik beratkan apa arti Undang2 Dasar, karena mereka belum begitu mengenal akan hal ini.

Boleh djadi mereka sudah mendengar perkataan ini, tetapi bagaimana bunji dan artinja, belum semua faham. Mereka perlu sekali dimengertikan, karena mereka akan tjampur tangan dalam pemilihan anggota2 Konstituante yang berdasarkan umum, sehingga mereka banjak sedikitnja harus sadar dan insjaf akan perbuatannya nanti. Untuk menerangkan apa arti UUD kepada mereka, itu tidak begitu mudah, dan soal ini baiklah diserahkan kepada yg berwadjib dan kepada orang2 yg menaruh banjak minat akan soal ini.

Kemudian baiklah diterangkan, bahwa untuk membuat UUD itu, diperlukan satu Sidang (Rapat) yg dinamakan Konstituante. Mereka supaya memilih anggota2 Sidang ini.

Penerangan2 bisa diberikan, tetapi yg penting ialah bagaimana tjara memberikan penerangan supaya betul2 dapat dimengerti oleh yang mendengarkan. Apakah dengan tjara rapat2, pertemuan ramah-tamah, latihan2, kursus2, atau dengan tjara tertulis dlsbnja.

Mengingat akan pentingnya dan sukarja apa yang akan diterangkan, jaitu soal Konstituante, maka teknik penerangan, mesti dipikirkan sebaik2nja, supaya usaha membentuk Konstituante akan berhasil dengan baik.

Apakah hal ini akan tertjapai atau tidak, tergantung kepada kesanggupan dan kemampuan orang2 yg akan memberikan penerangan dan rakjat yang akan menerima penerangan. Djika teknik penerangan tidak dipikirkan lebih dulu, segala sesuatu yang direntjanakan tidak dapat berjalan lantjar.

Konstituante adalah soal ketatanegaraan, bukan soal yang mudah. Selama zaman kemerdekaan ini, dalam latihan2 manapun juga boleh dikatakan, bahwa soal tata-negara menjadi bahan pelajaran, dan apakah bahan pelajaran ini sudah meningkat sampai Konstituante, dan sudah berapakah pelatih2 yang diproduksi oleh latihan2 itu belum dapat diketahui.

PERATURAN pemilihan umum sebaiknya disusun sedemikian rupa, hingga mudah dimengerti dan mudah dijalankan, serta harus bersifat djujur dalam arti, bahwa tidak ada sesuatu golongan yang lebih dapat menarik keuntungan dari pada golongan lain2. Di Negeri2 lain sudah biasa diadakan pemilihan umum, dan karena itu, buat menjusun peraturan pemilihan umum disini, hanya tinggal menjelidiki peraturan2 disana, serta menimbang2 mana yang baik buat Indonesia, sesuai dengan pertumbuhan demokrasi. Tentu saja Indonesia tidak bisa hanya meniru apa yang dikerdjakan oleh Negeri2 lain. Perubahan2 yang perlu2 mesti diadakan, hingga tertjapailah suatu peraturan yang baik buat Indonesia. Beberapa hal mesti ditinjau sedalam2nja seperti:

1. Apakah pemilihan umum itu didjadian suatu kuadjiban (plicht), atau suatu hak (recht).
2. Apakah dengan sistim bertingkat (vertrapte verkiezingen) atau tidak.
3. Apakah djago anggota Konstituante dikemukakan sebagai orang-seorang saja.

Pembela Perdamaian di Indonesia.

Putusan Konperensi Pertama di Jogja 31 - 10 - 1950.

I. **PERDAMAIAN** adalah wujud dari pada persaudaraan antara manusia seluruh dunia. setjara demokratis, dalam lapang politik, ekonomi dan sosial dan itu adalah sjarat untuk memajukan serta mempertinggi penghidupan jang lajak bagi manusia, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Perdamaian itu bisa terlaksana, apabila dalam dunia ini tidak ada penindasan dan penghisapan antara manusia dengan manusia.

Perdamaian tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan sendjata semata2, akan tetapi harus ditjapai dengan hapusnja

penindasan dan pendjadjahan.

II. Perdamaian itu terhalang2, karena didunia sekarang ini ternyata masih ada penindasan dan penghisapan antara manusia dengan manusia, jang pada waktu sekarang, berupa pendjadjahan dalam segala matjam bentuk.

Setelah berachirnja perang dunia jang kedua, kaum pendjadjah (imperialis) mengalami krisis umum jang makin hari makin menghebat, disebabkan karena:

a. Makin sempitnja daerah2 djadjahan dan setengah djadjahan, dan daerah2 pengaruh kekuasaan ekonomi imperialis.

b. Makin bertambah kuat dan meluasnja gerakan kemerdekaan nasional di negeri2 djadjahan, setengah djadjahan dan di negeri2 jang baru merdeka, dan gerakan demokratis anti imperialis diseluruh dunia.

c. Makin bertambahnja pengangguran dan kekatjaan dimana2, jang timbul sebagai akibat dari pada krisis sistim ekonomi imperialis.

Daja upaja kaum imperialis untuk mengeluarkan diri dari krisis umum itu serta daja-upaja mereka untuk mempertahankan kekuasaannja, adalah dengan djalan mengadakan persiapan2 perang seperti terbukti dari:

4. Apakah djago dikemukakan sebagai daftar gerombolan (lijstenstelsel) oleh Partai2 dan Badan2 sadja.

5. Apakah dgn sistim tjampuran (gecombineerd) termaksud sub 3 dan 4.

6. Apakah Indonesia didjadikan satu ataukah didjadikan beberapa daerah pemilihan.

HAL tersebut diatas patut dipertimbangkan untuk mendapatkan peraturan jang sedjudjur2nja, dan kalau hal itu ditinjau sedalam2nja, memang ada tersimpan tudjuan jang tertentu.

Djika Indonesia berpenduduk 75 djuta warga negara, sedangkan setiap 150.000 mempunyai seorang wakil, maka Konstituante akan beranggota 75 djuta dibagi 150 ribu = 500 orang (UU D Sementara pasal 135). Lima ratus orang ini akan beramai2 dipilih. Timbullah pertanyaan *siapakah* jang patut dan tepat dipilih?

Kalau diingat, bahwa Konstituante adalah Sidang Pembuat UUD, tentunja jang dipilih harus orang2 jang mengerti perundang-undangan, jaitu orang2 **achli** dalam undang2. Adakah Indonesia mempunyai orang2 ini? Ada, bahkan mungkin lebih dari pada jang diperlukan. Kenalakah Rakjat di kota2 maupun di desa2 kepada orang2 ini? Mereka semestinja harus mengenal, karena mereka jang akan memilih. Lebih landjut dapat ditanyakan: „Mengertikah Rakjat apa jang dinamakan Undang2? Mereka semestinja harus mengerti, karena Indonesia adalah Negara Hukum.

Dalam UUD belum disebutkan buat berapa lama anggota2 dipilih, dan segera setelah Konstituante terbentuk hal ini mestinja akan ditentukan.

Konstituante Indonesia sebagai sebuah Sidang Pembuat UUD, memerlukan hana orang2 tjerdik pandai jang mempunyai keachlian Perundang-undangan, serta beranasir progressief revolusioner. Adapun orang2 manakah jang progressief revolusioner itu, tjukuplah dilihat akan perbuatannja jang sudah lampau, dan apakah jang dimaksud progressief revolusioner itu. Tjukuplah ditjotjokkan dengan teorie jang ada. Progressief dan revolusioner diperlukan, supaja undang2 jang akan ditelorkan progressief revolusioner djuga, karena orang2 jang tidak beranasir demikian, tidak akan mentjip-takan undang2 jang penuh dinamik, dimana tjita2 baru bisa dimasukkan.

Konstituante sebagai Sidang Pembuat UUD **merangkap** sbg Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen), memerlukan orang2 dgn sjarat jg lebih banjak, jaitu:

1. Orang2 achli Undang2.
2. Orng2 jang progressief revolusioner.
3. Orang2 jg diakui sbg wakil Rakjat.

Dimanakah titik berat perdojoangan Konstituante ini, terserah kepada chalajak. Perlu diinsjafi bahwa DPR adalah suatu Dewan jang akan menentukan hak dan kuadjiban Rakjat.

Kini Rakjat tinggal menunggu bagaimana bentuk undang2 pemilihan umum itu, serta menunggu bagaimana penjenggaraannja nanti, sambil melihat2 **slapa2** jang lajak serta patut utk dipilih sebagai anggota Konstituante.

a. Adanja Marshall-plan dan Truman Doctrine jang berarti persetudjuan2 politik, ekonomi dan militer dibawah pimpinan imperialis Amerika.

b. Pembentukan Pact-Atlantik di Eropa-Barat dan persiapan2 pembentukan Pact2 itu untuk daerah sekitar lautan Tengah dan Pasific.

c. Pembentukan pangkalan2 militer di negeri2 kapitalis dan di negeri2 djadjahan dan setengah djadjahan.

d. Usaha untuk memperbesar produksi dan memodernisir alat2 perlengkapan perang seperti bom-atoom, bom-hydrogen dan bom kuman2.

e. Agressi bersendjata langsung terhadap Korea dan Formosa; intervensi di negeri2 djadjahan dan setengah djadjahan seperti di Viet Nam, Malaya, Indonesia, Pilipina dll.

f. Propaganda perang imperialis jang bermaksud menimbulkan suasana perang hingga dgn demikian dapat menarik Rakjat2 jg tjinta kepada perdamaian kedalam arus peperangan.

g. Menindas dan memetjah belah gerakan2 Rakjat jang anti perang imperialis dgn djalan mempergunakan pemerintah2 boneka jg korupt seperti: Bao Dai, Syngman Rhee, Chiang Kai Shek, Quirino dll.

III. Rakjat Indonesia menghendaki perdamaian dan kemerdekaan, bebas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan, dan oleh karena itu menentang tiap2 usaha/persiapan perang jang merupakan antjaman bagi perdamaian. Lebih2 karena kedudukan Indonesia itu dalam strategi militer internasional sa-

ngat penting, sehingga jika timbul peperangan sewaktu2. Indonesia akan terseret didalamnya.

Berhubung dengan perdjandjian2 kompromi dengan kaum pendjadjah (antara lain KMB) sebagai landjutan dari pada siasat politik imperialisme untuk mempersiapkan perang baru itu, maka di Indonesia, timbul akibat sbb.:

- Dalam lapangan ekonomi dan keuangan, tetap berlakunya sistim ekonomi djadjahan seperti ternyata dari bertjokolnja kekuasaan modal besar asing di Indonesia dan pindjamaan2 modal dari kaum imperialis luar negeri; — dinaikkannya pajak bumi 200% dan lain2 matjam pajak yang memberatkan beban hidup rakyat banjak; — adanya inflasi; — dan masih tetap berlakunya sistim feodalisme dalam lapangan pertanian.
- Dalam lapangan sosial: adanya masa-ontslag dan rasionalisasi yang berakibat pengangguran setjara besar2an; — meradjaelanjnja terror dan anarchie; — terlantarnya anak2 sekolah, dan karenanjja sangat kurang kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan hidupnya, — dan bertambah banjaknja pelatjuran.
- Dalam lapangan politik: adanya pembatasan dan pelarangan hak2 demokrasi, — jaitu hak utk mengadakan rapat2, demonstrasi dan pemogokan.
- Dalam lapangan militer:

- Belum ditariknja semua tentara Belanda dari Indonesia, yang berakibat peristiwa Westerling di Bandung, peristiwa Sultan Hamid, peristiwa Andi Aziz di Makassar, peristiwa Maluku Selatan, dim peristiwa mana telah terbunuh ribuan tentara dan rakyat patriot.
- Masuknja tentara KNIL dalam Apri setjara utuh.
- Tidak ada dijaminan pemasukan Irian Barat dalam lingkungan kekuasaan Negara RI dalam tahun ini, seperti yang telah ditetapkan dalam Konperensi Medja Bundar.

Oleh sebab itu, persetudjuan dengan kaum imperialis (KMB dan lain2) merupakan penghambat dan penghalang tertjapainja perdamaian dan kemerdekaan nasional dari pada rakyat Indonesia.

IV. Rakyat Indonesia yang menghendaki perdamaian, kemerdekaan dan demokrasi menjatakan sikapnja menentang segala usaha kearah persiapan perang yang telah dan sedang dikerdjakan oleh kaum imperialis itu dan:

A. Menjatakan persetudjuannya terhadap **SERUAN BURO TETAP PEMBELA PERDAMAIAN JANG DIPUTUSKAN DI PRAHA.**

B. Mengusulkan, untuk diperbin-tjangkan dan diperdjoangkan:

- Diadakannya perundingan2 tentang perdamaian antara Sovjet Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perantjis dan RRT.
- Berdasarkan seruan Praha mengenai pelarangan agresi dan intervensi Negara2 asing di negeri2 lain, supaya antara lain tentara Belanda seluruhnja segera ditarik mundur dari Indonesia dan dihentikannya tjampur tangan negara2 asing dalam soal2 dalam negeri Indonesia, seperti soal2 Irian, Maluku dan lain2.
- Dilaksanakannya hak2 tiap2 bangsa untuk menentukan nasibnja sendiri dengan menghapuskan perdjandjian2 yang bersifat menghilangkan atau mengurangi kemerdekaan dan kedaulatan nasional, antara lain perdjandjian2 Indonesia dengan negara2 imperialis.
- Adanya hubungan ekonomi yang bebas atas dasar saling harga menghargai dan hormat menghormati kemerdekaan nasional masing2.
- Mengadakan pembangunan ekonomi perdamaian diseluruh dunia dengan dipergunakannya tenaga manusia dan kekajaan dunia untuk sebesar2 kemakmuran rakyat diseluruh dunia.
- Memperhebat propaganda perdamaian dan anti perang imperialis dalam segala bahasa dan membuka kedok kaum penghasut perang serta kaki tangannja.

C. Menjerukan kepada pemerintah Republik Indonesia, supaya berusaha dengan berbagai2 djalan, untuk menghindarkan terseretnja Indonesia dalam peperangan imperialis.

Jogjakarta, 31 — 10 — 1950.

Komite Pembela Perdamaian Dunia Pusat.

DARI REDAKSI.

Kita memandang perlu memuatkan „Manifest” dari Komite Pembela Perdamaian Dunia buat Pusat Indonesia di Jogjakarta dalam Suara Tani, karena penting isinja. Tidak sadja penting sebagai „pemberitaan”, melainkan lebih2 penting pula maksud dan isinja manifest itu bagi sebagian besar masyarakat ditinjau air kita ini, — yang mana berwatak dan bersifat „tjinta kepada perdamaian” itu.

Konperensi di Jogja.

KONPERENSI Perdamaian yang diselenggarakan di Jogjakarta pada tgl 30 — 31-10-1950 dikundjungi oleh Komite Perdamaian dari Djakarta, Surabaya, Jogjakarta, Madiun, Kediri, Purwokerto, Solo dan organisasi2 Sobsi, BTL, Kowani, Front Pemuda Indonesia, IPPI, Pesindo, PPTS, Gerwis, telah mengambil keputusan:

I. Mengirimkan delegas Indonesia ke Konggres Perdamaian Dunia II di London.

II. Menentukan susunan delegasi sbb:

- Sudarsono dari Sobsi dan Komite Perdamaian Pusat.
- Dr Tjoa Sek Ien.
- S. Sardjono dari BTL.
- Nj. Sutarman dari Kowani.
- Trimurti, Wartawan.
- Sudjojono, seniman.
- Busono, IPPI (ada di Praha).
- Domine Harahap.
- Kjai Hadji Moch Chatib.
- Mr. Sujono Hadinoto.
- Dr. Pudjo dari Palang Merah (di Geneve).
- Pangeran Bintoro dari Palang Merah (di Geneve).
- Otto Rondonuwu.
- Mr. Wilopo.
- Sutardjo Kartohadikusumo.

Jogjakarta, 30-10-1950.

Komite Pembela Perdamaian Dunia Pusat.

Tanda tangan perdamaian.

DJUMLAH tanda tangan yang telah terkumpul di Komite Pembela Perdamaian Pusat pada tgl 31-10-1950.

Djakarta	86.324.
Surakarta	76.357.
Medan	22.318.
Jogjakarta	22.143.
Solo	3.000.
Purwokerto	2.720.
Kediri	1.741.
Madiun	1.594.
Djember	1.014.
Gombong	282.

Djumlah 217.496.

Jogja, 31-10-1950.

Komite Pembela Perdamaian Dunia Pusat.

Sedikit tentang GULA.

SOAL penanaman tebu, djadi djuga soal pembikinan gula, pada saat ini di Indonesia merupakan soal yang boleh dikata hangat sekali. Kehangatan ini disebabkan oleh karena pengusaha2 pabrik ingin sekali memproduksi gula lagi, yang harganya dipasar dunia pada waktu ini agak tinggi. Sekarang ialah waktu „hoogconjunctuur” akan bahan ini. Ini berarti bahwa permintaan (vraag) akan gula lebih besar daripada penawaran (aanbod).

Sebaliknya pada tahun2 1929 — 1934 ialah saat laagconjunctuur, dimana banjak pabrik2 gula ditutup oleh karena produksi kelebihan2 itu tak dapat dijual dengan harga yang membikin banjak sekali untung.



Ir. SOEMIJOTO.

MENURUT ahli2 ekonomi Belanda yang ulung seperti: Prof. Boeke, Prof. Gongrijp dan Prof. Kielstra dan lain2nja, produksi bahan perkebunan itu sangat „conjunctuurgevoelig” atau dengan lain perkataan, untungnja tidak dapat tetap, kadang2 rugi. Apakah ia benar?

Tidak benar, akan tetapi djuga tidak salah. Benar atau tidaknja „Conjunctuurgevoeligheid” itu tergantung pada dasar yang diambil dalam produksi akan bahan2 perkebunan tadi.

Dasar daripada produksi untuk pengusaha2 ialah untung yang melipamh2. Kalau mereka mendapat untung 10% dari modalnja yang ditanam, ini berarti rugi, katanja. Ini tidak redeljik. Di Hawaii salah satu maatschappij Amerika pada tahun 1948 dalam hal produksi gula mendapat untung bersih 557.000 dollar. Ini merupakan 1/2% dari modalnja. Pabriknja modern sekali, lebih modern daripada pabrik gula di Indonesia dan tjara penanaman dan panenpun — didjalankan setjara mekanis. Segala2nja mekanis, en toch mendapat untung. Pengusaha Amerika itu bukan tukang pgalamun. Mereka itu benar2, zakenlieden yang didorong oleh slogan „money making” (mentjari uang). Djadi dalam membikin gula untung mesti ada.

„Conjunctuurgevoeligheidstheorie” itu djuga disebabkan oleh karena mereka tidak ambil pusing akan kebutuhan rakjat akan gula. Sebelum perang dunia ke II konsumsi gula di Indonesia rata2 hanya 4,7 kg tiap2 tahun, sedangkan di Amerika Serikat angka ini mentjapai tingkatan 43,4 kg pada tahun 1938. Sekarang konsumsi gula di Indonesia terang merosot. Theorie2 dari pada professor2 yang ulung2 itu ternyata tidak begitu ulung. Mereka hanya ulung dalam hal mempertahankan kedudukan daripada modal2 besar yang ditanam di tanah air kita itu.

Produksi gula di Indonesia ini kalau kita bandingkan dengan produksi gula di lain2 negeri memang besar sekali. Rata2 hasil gula pabrik ialah 150 quintal gula tiap2 hektare. Bahkan produksi gula rakjat yang rata2 70 quintal tiap hektare yang didjalankan setjara primitif masih lebih tinggi daripada produksi di lain2 negeri. Lebih2 kalau tebu rakjat ini digiling di pabrik, hasilnya gula meningkat 90—100 quintal tiap hektare.

Produksi gula tiap2 hektare di beberapa negeri adalah sebagai berikut: Formosa (Taiwan) di tanah yang baik ialah 30 quintal; Phillipina 53 quintal; Brazilia (Am. Selatan) 11,4 quintal; Afrika Selatan 62 qt; Louisiana (Neg. Bag. Am. Serikat) 72 quintal; Polandia di tahun 1938 ada 35 quintal dan pada tahun 1948 ada 28 quintal; India 35 qt.

Dibandingkan dengan tebu rakjat, Tani kita zonder pakai pupuk dan lain2 matjam teknik pertanian ala ambtenaar deskundigen didikan Belanda kolonial, produksinja sudah mentjapai tingkatan gilang gemilang. Apalagi kalau dapat pimpinan teknis yang baik dari orang2 yang dinamis, lebih2 produksi akan meningkat sampai 4-5 kali.

Apa sebabnja Indonesia mentjapai produksi gula yang begitu besar itu? Banjak ambtenaar deskundigen Indonesia didikan Belanda kolonial berpendapat, bahwa itu semua disebabkan oleh karena tinggi tekniknya fabricage dan teknik menanam. Tingginja teknik fa-

bricage dan menanam di lain2 negara seperti di benua Amerika, Europa dan Asia tidak kalah dengan teknik disini; malahan melebihi. Pendapat2 baru dalam hal teknik di Amerika Serikat dan Europa dan Soviet Unie telah dipraktikkan. Segala2nja telah di mekanisir. Djadi alasannja amtenar2 deskundigen itu tidak betul.

Pokok dari sebab-sebabnja vruchtbaarheid (baiknja buat tanaman) dari pada tanah air kita. Klimatologisch (iklim) dan geologisch (ilmu tanah), letaknja Indonesia ialah sangat baik sekali. Biasa dikatakan tak ada bandingnja di dunia. Boleh kita hiaskan, kalau kita menanam tongkat di tanah, ini akan berbuah djuga.

Melihat produksi gula di beberapa negeri itu, ternyata bahwa dengan rendement 50 quintal tiap hektare pabrik gula sudah dapat renderen (memberi keuntungan). Djadi tidak masuk akal djika opkoopriet sistim didjalankan, pabrik akan menderita kerugian, oleh karena tebu rakjat itu kurang baik kwaliteitnja, menurut merika.

Bagaimana tjara2nja memakai tanah untuk penanaman tebu di lain2 negeri?

Di Formosa (Taiwan) didjalankan dengan sistim opkoopriet dan pembajarannja didasarkan atas rendement daripada tebu. Misalnja begini. Rendement (banjaknja gula yang dikandung oleh tebu) 10%. Pak tani misalnja menjerahkan kepada pabrik 10.000 kg tebu. Ini mendjadi gula 1000 kg. Pak Tani lantas dapat 48% dari pendapatan gula ini berupa uang. Yang menetapkan harga gula ialah organisasi pabrik gula dengan wakil tani, biasanja tani besar.

Kurang baiknja tjara di Formosa ini ialah penetapan harga gula yang tidak didasarkan atas harga di pasar dunia, tidak adanya controle tentang penetapan rendement dan 48% itu merupakan bagian yang terketjil kalau dibandingkan dengan lain2 negeri dengan sistim yang sama, seperti di Phillipina.

Di Phillipina pabrik hanya dapat 35%-45% daripada hasil gula, dan yang menanam tebu menempatkan seorang chemiker di pabrik untuk mengontrol rendement daripada tebu.

Dari uraian di atas tersebut teranglah bahwa bagaimana pun djuga tjara2nya menanam, dan bagaimana hasilnya tiap2 hektare, usaha membikin gula tidak akan rugi, akan tetapi selalu untung. Oleh karena itu buruh dan Tani harus mendapat djuga untungnja.

Keterangan. Angka2 diambil dari: "Phillipine Sugar News", "Sugar" (majalah Amerika Serikat), dan "Indian Sugar".

Jogja, 6-11-'50.

Ir. Sumijoto.

MOSI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dalam sidangnya yang pertama pada bulan Oktober 1950.

Mendengar:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 1 April 1950 No. P.B. 5-1-1, tentang kenaikan pajak bumi 2 sampai 3 kali dari pajak bumi sebelum perang, yang berlaku mulai 1 Januari 1950 untuk diseluruh Djawa dan Madura;
2. Pengumuman pendjelasan Kantor Besar Djawatan Pajak Bumi tanggal 1 April 1950 No. 5-1-2 kepada semua Residen diseluruh Djawa dan Madura, yang salinannya dikirimkan kepada semua Gubernur dan Bupati serta Djawatan2 Pajak Bumi yang bersangkutan diseluruh Djawa dan Madura;
3. Telah didjalankannya penarikan pajak bumi atas keputusan itu dibeberapa daerah oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

Menimbang:

1. bahwa tindakan itu sangat tidak bidjaksana, karena tidak sadja ekonomis sangat memberatkan penghidupan, tetapi djuga psychologis sangat memberatkan perasaan Rakyat Tani;
2. bahwa dasar yang dipakai untuk menaikkan pajak bumi itu dengan alasan kenaikan harga padi pada waktu ketetapan itu lipat 8 a 9 kali dari harga padi tahun 1947 s/d 1949, itu tidak benar, karena kenaikan harga barang2 lainnja yang langsung mendjadi keperluan hidup Rakyat Tani djauh lebih tinggi dan berlipat ganda dari kenaikan harga padi, hingga kenaikan harga padi itu sama sekali tidak menambah kekuatan membayar Rakyat Tani, bahkan sebaliknya;
3. bahwa sebagai akibat peperangan yang berkali-kali yang biayanya dipikulkan kepada Rakyat Tani, hingga sekarang Rakyat Tani masih menderita kerusakan2 harta benda dan djiwa yang berat;
4. bahwa sesudah perang selesai, Rakyat Tani masih harus memperbaiki kerusakan2 bangunan2 didesa-desa seperti djalan2 dan irigasi dengan biaya dan tenaganya yang tidak sedikit, yang seharusnya mendjadi tanggungan dan kewadajiban Pemerintah, yang berarti Rakyat Tani sudah dan masih terus membayar pajak extra yang tidak ringan disamping pajak2 lainnja yang sudah tentu;
5. bahwa systeem pajak bumi (landrente) sebagai sisa peraturan feodal yang tidak adil dan memberatkan Rakyat Tani itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh Republik Indonesia telah dihapuskan dengan Undang2 No. 1 tahun 1949;

MEMUTUSKAN:

1. Mendesak kepada Pemerintah agar dengan segera mentjabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 1 April 1950 No. P.B. 5-1-1;
 2. Mengembalikan uang kenaikan pajak bumi yang sudah dibayar kepada yang berhak menerimanya kembali;
 3. Segera mengadakan peraturan pengganti pajak bumi dengan pajak penghasilan yang adil.
- Djakarta, Oktober 1950.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Moch. Tauchid, | 8. Ahem Erningpradja, |
| 2. Dr. A. Tjokronegoro, | 9. Djuir Mochammad, |
| 3. S. Sardjono, | 10. Kusnan, |
| 4. Sundjoto, | 11. Nj. Mudikdio, |
| 5. M.S. Kartohadikusumo, | 12. Basri, |
| 6. Mr. Iwa Kusumasumantri, | 13. R. Abdurrachman, |
| 7. R. Pardede, | 14. Sidik Kertapati. |

Tjatatatan:

1. Karena ada tambahan dari rentjana mosi yang pertama (jag sudah dimuat dalam Suara Tani No. 5), jaitu ditambahnja dengan angka 5 dari bagian „Menimbang” dan angka 3 dari bagian „Memutuskan”, maka tekst mosi kami muatkan lagi.
2. Dalam tekst mosi yang sudah dimuat dulu, ada tertjantum namanja sdr2 Mr. Moch. Daljono dan Endrosudarmo, tetapi dalam tekst yang baru ini tidak ada, karena kedua sdr itu mengundurkan diri dari penanda-tanganan mosi ini.

Moch. Tauchid.

Padjak Bumi hapus.

MOSI Moch. Tauchid es tentang „padjak bumi” telah diterima dengan suara bulat oleh DPR—RI dalam sidangnja pada tgl 3 Nopember 1950.

Sebagai tersebut dalam bagian „Memutuskan” dari mosi itu (jang termuat disebelah ini), bermaksud:

1. Mendesak kepada Pemerintah agar dengan segera mentjabut „Keputusan Menteri Keuangan RI” tgl 1 April 1950 No. PB 5—1—1 (tentang kenaikan padjak bumi 2 á kali buat tahun 1950);

2. Mengembalikan uang kenaikan padjak bumi jang sudah dibayar, kepada jang berhak menerima kembali;

3. Segera mengadakan peraturan pengganti padjak bumi dengan padjak penghasilan jang adil.

D JADI mosi itu mengandung dua soal jang penting, jaitu pertama (insidental) mendesak ditjabutnja peraturan kenaikan padjak buat tahun 1950, dan kedua jang prinsipil, ialah mengganti padjak bumi dengan padjak penghasilan, jang oleh Pemerintah Republik sudah diputuskan penghapusannya dengan Undang2 no. 1 tahun 1949, tetapi berlakunja masih ditunda buat th 1950 (dan selama waktu penundaan ini oleh Pem. Republik Indonesia dinaikkan dengan 2 sampai 3 kali dari pokok jang lama).

A LASAN2 penolakan kenaikan padjak bumi itu kami uraikan dalam sidang DPR tgl 1 Nopember 1950 instansi pertama, jang isinja seperti sudah dimuat dalam Suara Tani no. 5 dan 6 bulan Oktober 1950 (berkepala „Penjelasan mosi padjak bumi”), ialah alasan2 ekonomis dan psychologis.

Soal jang prinsipil ialah tentang penghapusan padjak bumi dan digantinya dengan padjak penghasilan. Instelling padjak bumi harus dihapuskan, dan diganti dengan padjak penghasilan, karena dasar2 dan peraturan padjak bumi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, diantaranya:

1. Padjak bumi (landrente), berdasarkan hukum agraria feodal, ialah bahwa tanah itu kepunjaan radja, sedang orang tani hanya mendjadi tukang mengerdjakan tanah radja itu, dan berkewadajiban membayar sewa kepada radja berupa hasil bumi (kira2 seperlimanja), jang kemudian oleh Raffles diganti penjerahan hasil bumi dengan uang, jang besarnya kira2 sama. Pada waktu GG v.d. Bosch mengadakan Cultuurstelsel, dasar dan perhitungan ini dipakai, jaitu seperlima dari luas tanah orang tani harus ditanami tanaman untuk keperluan Cultuurstelsel, dan orang tani harus mengutamakan pemeliharaan tanaman itu dari tanaman untuk keperluan hidupnya.



Moch Tauchid.

Disamping padjak bumi itu, rakjat sebagai orang jang hanya mengerdjakan tanah (tidak mempunjai hak), masih harus menjerahkan tenaganya guna keperluan tuannya (rodi, heerendienst, pantjen dan sebagainya).

2. Padjak bumi terlalu besar (berat), jaitu antara 8 á 20% (menurut dasar no. 1 diatas), satu padjak jang tidak ada bandingan beratnja dgn padjak lain2nja.

3. Padjak bumi itu ditetapkan tiap2 10 tahun sekali, dengan menetapkan klasnja sawah (klassering, klasiran), hingga sekalipun selama waktu itu terdapat perubahan besar dalam soal kesuburannya (merosot), besarnya tetap menurut ketetapan klasiran itu (jang diadakan 10 tahun sekali). Sedang padjak penghasilan peng-aanslag-annja didjalkan tiap2 tahun.

4. Padjak bumi tidak mengenal batas minimum penghasilan jang dikenakan wadjib padjak (minimum belastbare inkomen), tidak sebagai jang berlaku dalam peraturan padjak penghasilan (sebelum perang ditetapkan penghasilan dibawah f 120, jang kemudian diturunkan

mendjadi f 90 tidak dikenakan padjak penghasilan, sekarang f 900). Menurut peraturan padjak bumi, semua pemilik tanah, berapapun sempitnja, sekalipun hanya sedjengkal, harus membayar padjak menurut tarif.

5. Padjak bumi tidak mengenal progressiviteit (tingkatan menurut kemampuan/draagvermogen) tetapi sama prosentasenja buat segala tingkatan kemampuan. Menurut peraturan padjak penghasilan, makin besar penghasilan, makin besar djuga prosentagenja. Hal2 tersebut diatas itulah jang sudah tidak selajaknya berlaku, karena ketjuali dasarnya sudah tidak sesuai, djuga wujudnja terlalu berat.

Ketjuali pembitjaraan2 dalam rapat2 terbuka, diadakan djuga dua kali perundingan informil antara penanda tangan mosi dengan pihak Pemerintah (pertama sebelum rapat terbuka, kedua sesudah pembitjaraan instansi pertama). Perundingan informil jang berpokok kepada soal keberatan2 Pemerintah mengenai penglaksanaan mosi berhubung dengan kesulitan2 teknis administratif untuk pelaksanaan angka 2 (pengembalian uang kelebihan padjak jang sudah dibayar), jang karenanya menghendaki perubahan redaksi mosi, tidak terdapat ketjotjokan antara pihak penanda tangan mosi dan pihak Pemerintah, sedang dalam dasarnya Pemerintah dapat menerima isi mosi jang dimadjukan itu.

Mosi itu dibitjarkan dalam sidang DPR. tgl. 1 dan 3 November 1950. (Babak ke I dan II). Setelah pengusul mosi (Moch Tauchid) berbitjara, maka lalu disambung oleh anggota2 penjokong mosi, dan djuga oleh wakil2 Pemerintah.

Penjokong mosi ialah anggota2: Dr. Diapari (S.K.I.), K. Werdojo (Buruh), Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Sundjoto (Parindra), Sutardjo Kartohadikusumo (P.I.R.), Mr. A.Z. Abidin (P.S.I.), Abdurrachman (P.T.I.), Manuaba (P.N.I.), Utarjo (P.K.I.). Sedang anggota Ardiwinangun (Masjumi), berpendapat, mosi ta' perlu dimadjukan, karena Pemerintah sudah bermaksud mengganti „padjak bumi,” dengan „padjak penghasilan” nanti mulai tahun 1951. Wakil2 Pemerintah jang berbitjara: Mr. Tandiono Manu (Ment. Pertanian) dan Mr. Saubari (Skr. Djendralnja).

Achirnja mosi diterima dengan suara bulat.

Perundingan antara ALS dan PPM.

DIDALAM bulan October telah berulang2 diadakan perundingan antara Pihak Pemilik Perkebunan Asing (A.L.S.) dengan Pembangunan Perkebunan Masyarakat (P.P.M.) Tjiamis yang buahnja senantiasa mundur2, deadlock dan mundur lagi. Sampai dewasa ini dari kedua belah pihak belum mendapat persetujuan.

Pangkal kekandasan perundingan terletak kepada pokok dasar dari pada tujuan kedua belah pihak yang sangat berdjauhan.

Dari pihak P.P.M. dimajukan permintaan sebagai berikut:

1. Pekerdjaan Perkebunan tetap ditangan P.P.M.
2. dengan pihak Pemilik dapat mengadakan penilikan (kontrol).
3. Keuntungan bersih dibagi:
10% untuk simpanan buruh.
20% .. Pembangunan Desa2 daerah Kabupaten Tjiamis.
35% .. P.P.M. dan
35% .. Pemilik.

Usul ini ditolak oleh Pihak Pemilik dengan memajukan contra usulnja sebagai berikut:

1. Pemilik akan memberikan kerugian kepada P.P.M. dengan perhitungan f 30, tiap 1 H.A. buat kebon yang masih ada kebon karetja.
2. Membeli semua alat2 (mesin2 d.l.l.) yang menjadi kepunyaan P.P.M.
3. Tuntutan buruh Pemilik akan berhadapan sendiri dengan „Sarbupri“. Dengan demikian maka perundingan menjadi deadlock.

P.P.M. DENGAN Mr. TOBING.

PERUNDINGAN yang dilakukan antara P.P.M. dengan Mr. Tobing, adalah mengenai Perkebunan karet Tjikas yang mempunyai kebon karet selebar 40 H.A.

Dalam perundingan P.P.M. memajukan tuntutan sebagai halnja dengan A. L.S. Sedang dari pihak Mr. Tobing dimajukan usul sebagai berikut:

1. Memberi kepada P.P.M. dengan perhitungan f 500 tiap 1 ton karet kering yang dihasilkan, dengan minimum f 5900 (lima ribu sembilan ratus rupiah) tiap-tiap bulan.
2. Tiap2 naik hasil, pemberian kepada P.P.M. naik sampai tertjapai maximum 40 ton tiap2 bulan (f 20000) tiap2 bulan.
3. Terhadap buruh, sanggup mengadakan djaminan yang memuaskan. Perundingan ini belum dapat diputuskan (belum diterima oleh P.P.M.).

BURUH DAN TANI BERDIRI DI-BELAKANG P.P.M.

SAMPAI dewasa ini P.P.M. telah mengerdjakan sebagian pada 7 tempat perkebunan karet yang dapat menempatkan tenaga kurang lebih 1800 orang, jalah 1400 buruh Perkebunan dan 400 anak2 bekas Demobilisasi tentara, dengan djaminan2 yang memuaskan, dari pada buruh2 Perkebunan yang dipimpin oleh pihak Bld sendiri.

Hal ini dapat dibuktikan dengan Resolusinja Sarbupri Tjabang Tjiamis yang diputuskan dalam rapatnja pada tanggal 5 November sbb.

RESOLUSI. (Saliman).

RAPAT Sarbupri Tjabang Tjiamis Selatan yang diadakan pada tgl. 5 November 1950, bertempat di Gedung Sandiwara Djalan Madjenang Bandar, dikundungi oleh Utusan2 Ranting Sarbupri seluruh Kabupaten Tjiamis, mewakili anggota sebanyak 5000 orang.

Mendengar dan membatja:

Surat idzin sementara dari Bapa Residen dan dari Bapa Gupernur, perihal pengembalian Perkebunan kepada Pemilik.

Mengingat:

- I. Pada njatnja Perkebunan telah dikerdjakan oleh P.P.M. yang telah mendapat Kemupakatan dan sokongan penuh dari-buruh2nja.
- II. Persetujuan bersama antara Sarbupri dan A.L.S. pasal 11 ayat 1 yang berbunyi demikian:
„Anggauta2 A.L.S. anggauta2 Z.W. S.S. dan anggauta2 B.E.B.T.O. akan menjelenggarakan mendirikan dan membutuhkan rumah2 diam, supaya buruh yang diam pada Perusahaan Perkebunan itu mendapat perumahan yang lajak“.

Menimbang:

Bahwa pengembalian milik Asing ini, tiada dapat diabaikan begitu saja dengan tidak disertai konsekwensinja dari pihak Pemilik sendiri.

Memutuskan:

1. Buruh hanya dapat bekerdja apabila pihak Pengusaha telah memenuhi sja-

rat2 persetujuan pasal 11 ayat 1 tersebut diatas.

2. Barang2 dan alat2 yang telah diusahakan oleh P.P.M. dapat diserahkan dan djadi hak milik Organisasi Buruh dan Tani.

Bandjar, 11 November 1950.

Dew. Pimp. Sarbupri Tjab. Tjiamis, di Bandar.

Ketua I.

ttt. Abdulah Pakih.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ranting2 Sarbupri seluruh Kabupaten Tjiamis,
2. Comm. Daerah Priangan timur/ Banjumas,
3. P.P. Sarbupri Djakarta,
4. Bapa Bupati Tjiamis,
5. Penjelenggaraan Perburuhan Daerah Priangan di Bandung.
6. Bapa Residen Priangan di Bandung.
7. Bapa Gubernur Djawa Barat di Bandung,
8. Bapa Kepala Polisi Tjiamis,
9. D.P.R.D. Sementara di Tjiamis,
10. P.D.M. I di Tjiamis,
11. Bapa Wedana Bandar,
12. Bapa Tjamat Bandar,
13. Bapa Kep. Pulisi di Bandar.
14. S.O.B.S.I. Tjabang Tjiamis,
15. Kem. Perburuhan di Djakarta.

KETERANGAN.

P.P.M. (Panitya Pembangunan Masyarakat) dan P.P.M. (Pembangunan Perkebunan Masyarakat).

Kedua P.P.M. ini didirikan di Kabupaten Tjiamis pada bulan Juni 1950. Jang pertama di bawah Pimpinan Sdr. Radi (Bupati Tjiamis) sedang P.P.M. jang kedua di Bandar di pimpin oleh Dewan Pimpinan jang terdiri dari 1. Sdr. Padmosumadjo; 2. Sdr. Sukarnaatmadja; dan 3. Sdr. Maundidjaja.

Di samping Dewan Pimpinan diadakan Delegasi untuk menghadapi pihak luar (Pemilik2 Perkebunan) jang anggautanja terdiri dari Ketua Sdr. Padmosumadjo dan anggautanja Sdr. Maundidjaja dan Sdr. Adidjaja.

Delegasi ini telah berulang2 mengadakan Perundingan dengan pihak Pemilik sebagai mana perslah tertulis di atas tadi.

Penulis,

ttt. Padmosumadjo.

Kirim kepada:

1. Dewan Pimpinan B.T.I. Jogja,
2. Suara Tani Jogja.
3. Sdr. Muntalif Djl. Kiaratjondong 117 Bandung.
4. Archief.

Desa dan Pimpinannya

Oleh: Hardjono.

MEMBANGUN Masjarakat desa harus dimulai dengan menumbuhkan „semangat gerak (dinamis)” yang positif dalam kalangan kaum Tani. Semangat gerak ini harus bersifat membangun dan menghasilkan.

Baik semangatnja maupun sifatnja tidak dapat diharapkan timbul dengan sendirinja, karena golongan Tani mempunyai sifat statis. Dorongan dari luar yang tegas terus-menerus, harus ada. Dorongan ini harus berupa: tuntunan, perlindungan, dan bantuan yang njata.

PEMERINTAHLAH yang terutama mempunyai kewajiban harus memberi tuntunan, artinja harus menundukkan objek2 apa jg dikerdjakan utk pembangunan desa dan bagaimana tjara mengerdjakannya. Dengan lain kata Pemerintah harus mengadakan program pembangunan desa, lengkap dengan tjara pelaksanaannya.

Perlindungan artinja bahwa Pemerintah harus mengeluarkan undang2 dan peraturan2 yang tegas2 bersifat melindungi (protectie) pertumbuhan kekuatan ekonomi dari golongan Tani. Dengan tidak adanya perlindungan ini, pertumbuhan itu akan terdesak mati oleh perkembangan modal besar, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Bantuan artinja sokongan berupa bahan (materieel), uang (financien), dan tenaga pimpinan yang mempunyai ketjakinan teknis. Tjampur tangan dari pemerintah berupa tuntunan, perlindungan dan bantuan yang tegas ini merupakan syarat mutlak agar supaya pembangunan masjarakat desa mempunyai dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar hidup (levensrecht) yang kuat.

Ada lagi soal yang pokok, ialah bahwa semua pekerdjaan pembangunan harus mempunyai dasar dan arah yang pasti. Pekerdjaan dijalankan atas dasar kekuatan (energie) yang berada dalam kelompok penduduk Tani dengan desa sebagai ikatan (dessa-verband). Ikatan desa ini telah memberi bukti mempunyai kekuatan hidup yang besar sekali. Desalah yang harus dibawa kearah, yang pasti, ialah membangkitkan didalamnya demokrasi untuk mewujudkan susunan ekonomi yang dipimpin oleh Negara. Hanya dengan perkembangan demokrasi didalam desa, dapat bertumbuh kekuatan membangun yang pada ini waktu ada dalam keadaan tertidur (latent).

Kekuatan ini memang dengan sengaja dibuat latent oleh pemerintah Hindia-Belanda, karena takut mengembang-

kan demokrasi dalam kalangan kaum Tani. Kekuatan itu terlihat njata2 ada, djika kaum Tani berusaha mengatasi kesukaran2 hidup seperti kekurangan bibit, kekurangan tenaga mengerdjakan tanah, memperbaiki pengairan, kekurangan makan dll. Bahaja2 ini memaksa mereka berunding, bermufakat dalam ikatan desa, karena didesak oleh keadaan. Djadi kekuatan itu timbul dalam sifat mempertahankan diri (defensief). Sekarang yang menjadi soal ialah menimbulkan kekuatan yang bersifat aktif serta produktif. Djalan satu-satunya ialah mengembangkan demokrasi dalam kalangan kaum Tani, demokrasi atas dasar „ikatan desa” yang diisi dengan pekerdjaan2 yang dijalankan setjara systematis dan programatis (memakai tjara dan menurut rentjana).

Pekerdjaan pembangunan desa ini tidak dapat kita harapkan timbul dengan sendirinja dari kalangan kaum Tani, baik iniatief maupun pimpinanja. Pemerintah harus memberi dorongan dan pimpinan. Pekerdjaan ini harus dijalankan bersama-sama dgn organisasi Tani, djustru karena organisasi Tani ini yang akan mendukung pertumbuhan demokrasi dalam kalangan Tani. Organisasi dalam desa, vak- maupun massa harus hidup. Untuk tingkat permulaan, bentuknja tidak begitu mendjadi soal, dapat berbentuk „kring Tani” atau „koperasi Tani” atau „koperasi desa”, atau „salah suatu ranting” dari organisasi massa yang berpusat.

Didalam organisasi2 ini akan diadakan pembittjaraan mengenai soal2 yang akan diadakan dalam rapat desa atau rapat Dewan Perwakilan Rakjat Desa. Djika soal2 tsb mendapat pengesahkan, maka pembittjaraan itu akan djadi peraturan pemerintah desa. Djadi organisasi2 dalam desa mempunyai functie (kewajiban) memusatkan dan mengkrystalisir (mewujudkan) kehendak penduduk desa menjadi peraturan desa. Djelaslah

betapa penting kedudukan organisasi2 ini, karena berkewajiban menentukan dasar2 pekerdjaan yang akan dijalankan oleh desa beserta penduduknja. Badan2 ini akan merupakan bingkai (rangangan) kekuatan, yang mendukung pekerdjaan2 pembangunan desa.

DAPATKAH organisasi2 tersebut menunaikan tugas kewadibannya?

Djika tidak dipimpin dan diisi, sudah terang tidak dapat. Menentukan pekerdjaan apa yang harus dijalankan untuk membangun desa, tidak mudah, apalagi menentukan bagaimana tjara pelaksanaannya. Untuk menjusun ini dibutuhkan pandangan yang dalam dan luas mengenai „plattelands problemen” (masalah2 desa). Program serta tjara pelaksanaannya hendaknja dibuat oleh pemerintah bersama dengan pusat2 organisasi Tani dan diisikan kedalam desa, artinja kepada organisasi2 Tani primair (pertama) didalam desa. Program harus betul2 meliputi segala lapangan pembangunan desa dalam lapangan ekonomi, sosial dan politik, tidak hanya mengenai prinsip2 njata dan garis besarnya, tetapi setjara reeel dan gedetailleerd. Hal ini tidak dapat diharapkan dapat dibuat oleh desa, tapi harus disodorkan, diisikan kepadanya. Tjara menjodorkan, mengisikan, merupakan satu probleem tersendiri. Pimpinan „mengisi” desa ini hendaknja terdiri atas sebuah panitia di ibu2 kota kabupaten, yang terdiri atas:

1. Wakil2 pemerintah, terutama dari dinas2 kemakmuran (welvaarts-diensten).
2. Wakil Badan Excentief D.P.R. Kabupaten.
3. Wakil2 organisasi2 Tani.

Panitia ini berkewajiban djuga menjusun kadaer2 yang berasal dari organisasi2 Tani di desa. Djuga badap2 dari pemerintah yang berada di desa (sebelum undang2 otonomi berdjalan, berada di Ketjamatan dan Kawedanan) harus djuga dilatih mengenai program pembangunan desa. Badan2 ini bersama dengan kader2 organisasi akan mendjadi alat penghubung antara panitia di kabupaten dengan desa. Kalau isi pembangunan desa ini telah dapat diterima oleh Organisasi Tani dalam desa, maka ia mendjelang pengesahannya oleh rapat desa atau rapat D.P.R. desa. Setelah ada pengesahan maka pekerdjaan beserta pimpinannya dpt dimulai bergerak.

REVOLUSI NASIONAL.

REVOLUSI NASIONAL adalah revolusi demokrasi bordjuis. Akan tetapi sebaliknya tiap-tiap revolusi demokrasi bordjuis bukanlah selalu bisa dinamakan revolusi nasional. Revolusi Perancis dan revolusi Rusia (bulan Maart tahun 1917) adalah revolusi demokrasi bordjuis, tetapi bukan revolusi nasional. Revolusi Tiongkok, revolusi Turki, revolusi Vietnam dan revolusi Indonesia adalah revolusi demokrasi bordjuis dan juga revolusi nasional, karena ia berlangsung dinegeri djadjan atau setengah djadjan.

SIFAT DAN KEWADJIBAN REVOLUSI NASIONAL.

REVOLUSI nasional jaitu revolusi demokrasi bordjuis dinegeri djadjan atau setengah djadjan; mempunyai sifat yang berbeda dgn revolusi demokrasi bordjuis dinegeri2 yg telah merdeka, ialah karena revolusi nasional langsung bersangkutan dengan perjoangan kemerdekaan menentang penjadjan atau imperialisme. Faktor nasional ini sangat besar pengaruhnya kepada perkembangan pergerakan revolusioner dinegeri djadjan dan setengah djadjan dimana perbudakan imperialisme dalam bentuk yang kedjam telah membawa rakyat banyak kearah pemberontakan. Disatu pihak penindasan bordjuasi nasional terhadap rakyat banyak menambah rasa djengkel dan tidak puas dalam kalangan kelas pekerdja dan kaum tani, mempermudah tjara2 untuk mengorganisasi massa terbanjak ini dan karenanya mempertjepat masaknya kelas2 revolusioner ini untuk mengadakan revolusi. Dilain pihak anasir nasional itu bisa



Ir. SAKIRMAN.

di bandingkan dengan kuadjan2 daripada revolusi demokrasi bordjuis dinegeri2 yang telah merdeka, ialah karena revolusi nasional langsung bersangkutan dengan perjoangan kemerdekaan menentang penjadjan atau imperialisme. Faktor nasional ini sangat besar pengaruhnya kepada perkembangan pergerakan revolusioner dinegeri djadjan dan setengah djadjan dimana perbudakan imperialisme dalam bentuk yang kedjam telah membawa rakyat banyak kearah pemberontakan. Disatu pihak penindasan bordjuasi nasional terhadap rakyat banyak menambah rasa djengkel dan tidak puas dalam kalangan kelas pekerdja dan kaum tani, mempermudah tjara2 untuk mengorganisasi massa terbanjak ini dan karenanya mempertjepat masaknya kelas2 revolusioner ini untuk mengadakan revolusi. Dilain pihak anasir nasional itu bisa

dikota2 dan didesa2 dan kaum intelektual. Disebagian besar negeri2 djadjan dan setengah djadjan, yang merupakan negeri2 pertanian, pengaruh reaksioner daripada bordjuasi nasional itu diperkuat oleh golongan2 feodal, hingga faktor feodal-bordjuis ini merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi kaum penjadjan-imperialis dalam usahanya untuk memperbudak rakyat2 dinegeri2 terbelakang. Riwayat perjoangan kemerdekaan rakyat dinegeri2 djadjan dan setengah djadjan membuktikan bahwa kekuasaan kaum imperialis bisa menjadi besar justru karena bersendi kepada stelsel feodalisme dan stelsel kapitalisme-nasional-burokrasi.

Revolusi nasional atau revolusi demokrasi bordjuis dinegeri2 djadjan dan setengah djadjan dengan sendirinya mempunyai kuadjan2 yang lain pula djadjan2 yang telah merdeka. Revolusi nasional keneranya mempunyai dua kuadjan yang pokok, jaitu :

- (a) menggulingkan kekuasaan imperialisme.
- (b) menghanturkan stelsel feodalisme dan kapitalisme-nasional-burokrasi, yang merupakan sendi daripada kekuasaan imperialisme itu.

KEDUA kuadjan2 ini mempunyai tujuan yang satu, jaitu terbentuknya suatu masyarakat yang demokratis bebas dari kekuasaan imperialisme kapitalisme-burokrasi, dan feodalisme dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan, akan tetapi mesti dijalankan sekaligus.

Kekuasaan imperialisme tidak dapat digulingkan apabila ia masih berakar kepada feodalisme dan kapitalisme-burokrasi, dan sebaliknya stelsel feodalisme dan kapitalisme-burokrasi ini tidak dapat dilenyapkan selama kekuasaan imperialisme masih meradajala.

Lenjapnya kekuasaan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme-burokrasi ini belum berarti bahwa rakyat sudah bebas sama sekali dari pengaruh system penindasan dan penghisapan. Kebebasan penuh daripada pengaruh ini baru bisa tercapai dalam masyarakat sosialisme. Oleh sebab itu dalam masyarakat demokrasi bordjuis, kapitalisme nasional yang progressif masih diperbolehkan hidup didalam batas2 yang tertentu, jaitu didalam batas2 yang tidak merugikan kepentingan rakyat terbanjak kelas pekerdja dan kaum tani. Dan masyarakat demokrasi bordjuis, yang masih membolehkan hidupnya kaum

Bersambung halaman 38.

DEMIKIANLAH gambaran mendi namiseer masyarakat desa. Dynamic yang produktif yang didukung oleh faham demokrasi, menuju kearah susunan ekonomi yang dipimpin oleh negara. Sudah dapat diduga terlebih dahulu bahwa pada waktu sendi2 produksi baru didalam "desa" diletakkan, akan timbul juga beberapa kekurangan/keburukan yang tidak diharapkan, akan tetapi jika adanya beberapa kekurangan /keburukan ini dijadikan alasan untuk tidak mulai melaksanakan sistem produksi yang baru, maka ini berarti bahwa pemerintah membiarkan sistem kolonial terus berlaku di lapangan kepentingan penduduk Tani. Ini terang bertentangan dengan semangat undang2 dasar Negara Republik Indonesia yang mengandung falsafah demokrasi dan keadilan sosial.

Demokrasi belum berlaku di Indonesia selama Rakyat Tani belum diberi tjukup saluran2 untuk ikut aktif menentukan peraturan2 dan dasar2 bekerdja yang

mengenai kepentingan mereka sendiri, justru karena mereka merupakan golongan yang terbesar dari penduduk Indonesia. Yang harus diusahakan ialah membatasi adanya keburukan2 sampai djumlah yang minimum. Tidak boleh pemerintah menjilahkan kaum Tani membuat salurannya sendiri, karena didalam hal ini Tani telah ketinggalan mengenai berbagai-bagai hal jika dibandingkan dengan lain2 golongan dalam masyarakat, umpamanya golongan pedagang dan pengusaha, yang sedang bertumbuh.

Ketinggalan ini terutama berupa keadaan ekonomi yang lemah, akibat penjadjan berabad-abad, serta kepandaian dan ketjaksanaan yang sangat rendah, akibat politik "onderwijs" dan pemerintahan penjadjan.

Kurang adil rasanya, jika tidak diadakan tuntunan, perlindungan dan bantuan yang nyata dari pemerintah pada golongan Tani, dalam "perlombaan demokrasi" dengan lain2 golongan.

DALAM NEGERI.

MENURUT berita2 yang kita terima, kedjadian2 selama 25 hari dalam bulan November ini, belumlah menundukkan tanda2 berkurangnya kesulitan2 yang harus kita hadapi.

Masyarakat Indonesia terus bergolak, pergolakan diantara dua anasir yang saling bertentangan satu sama lain. Anasir kemerdekaan menentang anasir pendjadjahan. Banjak benih2 yang mudah menimbulkan kekeruhan disana-sini.

KEAMANAN UMUM.

SUDAH banjak usaha Pemerintah untuk menjelenggarakan kertjapainja keamanan dalam negeri. Tapi masih besar, kalau tak mau dikatakan semakin besar, adanya „perasaan tidak aman“ bagi rakyat umumnya.

Gedoran, perampokan dan perampasan yang sering sadja disertai pembunuhan2, masih sadja terdjadi dimana2. Berhubung dengan hal ini, timbulah pertanjaan2 dari rakyat banjak, kapankah yang berwadjab dapat membasmi semua itu?

Semakin sering, kita mendengar berita2 tentang adanya pendaratan gerombolan2 bersendjata, yang tiba2 lalu mengatjau dan menjerang penduduk, sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda, dgn membakar rumah2 rakyat dll.

Hal mana terdjadi belum lama ini di Pamanukan. Untungnja lalu ketahuan oleh TNI. Terdjadi pertempuran, akhirnya pendjahat2 itu melarikan diri dengan meninggalkan korban jiwa diantara anak buahnya.

Terdjadi serupa itu djuga pada tgl 10 Nopember dan 16 Nopember di Makassar. Djuga menimbulkan kerusakan dan kerugian rakyat.

PEMBERSIHAN SENDJATA.

DENGAN tiba2 pada tgl 19-11-50 mulai pagi sampai siang hari, Pemerintah melakukan pembersihan sendjata dikota Djakarta. Pekerdjaan dijalanan oleh Komando Militer Kota Besar Djakarta. Selama itu semua penduduk dilarang keluar rumah. Penjagaan kuat sekali, didalam dan dipinggir2 kota. Alasan yang menjejabkan tindakan itu ialah karena meningkatnja perdagangan sendjata2 gelap dan timbulnja kedjahatan2.

Hasilnja, banjak orang2 ditangkap dan ditahan, mulanja lk. 170 orang, terdiri dari: orang2 Belanda, Tionghoa dan Indonesia. Diantaranya: D. Spies (direktur Javasche Bank), H. H. Kan (bekas anggota volksraad), Wang Chi Juen (pemimpin madjallah Seng Hoa Pao),

bekas opsir Knil Suriosantoso, dan lain2nja. Hingga kini sudah ada sementara yang dilepaskan karena tidak bersalah. Lain2nja menunggu pemeriksaan.

Hasil berupa sendjata yang dibeslah: pistol, granaat, peluru2 dan ada djuga sendjata otomatis.

Banjaklah reaksi yang ditimbulkan oleh kedjadian itu, terutama dari pers2 putih dan luar Negeri. Ini disebabkan karena kurang tjepatnja Pemerintah kita mengumumkan duduknja perkara ini yang sebenarnya. Nederland merasa tidak enak/tidak senang melihat tindakan Pemerintah kita serupa itu, (berhubung dengan pengeledahan dirumahnja Drs. Speekenbrink, penasehat ekonomi Komisariat Agung Belanda). BBC mengabarkan bahwa tindakan itu bermaksud untuk menghalangi/mematahkan aksi2 kaum Komunis. Javasche Bank ditutup buat umum pada hari berikutnya kedjadian diatas, beralasan karena Direktur2nya turut ditangkap itu. Dan lain2nja.

Tepat pada waktunya dari fihaknja Sobsi dan PKI yang turut dikabarkan seperti diatas segera mengumumkan bantahan2, yang menjatakan bohongnja berita2 yang menghasut2 itu.

Selanjutnja baiklah kita lihat, bagaimana nanti akhirnya soal tersebut.

PENJERAHAN SENDJATA.

PADA tgl 14-11-50 Pemerintah mengumumkan maklumat tentang „penjerahan sendjata“. Semua orang yang menjimpan sendjata dan badan2 perdjuaan bersendjata diluarnya A.P.R.I. diharuskan menjerahkan sendjata itu kepada Pemerintah. Waktunja ditetapkan dari 28-11-50 sampai 4-12-50. Buat daerah Kalimantan dan Sulawesi Selatan batasan waktu itu akan ditetapkan tersendiri. Buat pemegang2 sendjata dari badan2 perdjuaan itu boleh mendaftarkan menjadi anggota tentera resmi atau polisi. Kalau tidak mau, boleh memilih pekerdjaan lainnja, akan mendapat bantuan seperlunya dari Pemerintah.

Bagaimana akhirnya hal ini, baiklah kita tuliskan lagi lain waktu.

SOAL IRIAN.

HASRAT dan pendirian seluruh rakyat Indonesia sudah djelas. Menghendaki agar Irian dimasukkan mendjadi daerah RI. secepat mungkin, dalam tahun ini djuga. Ini bisa dilihat dengan adanya resolusi2, desakan2, dan tuntutan2 dari badan2 yang diselenggarakan dibanjak tempat. Di Atjeh, di Djawa, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan dan Utara, di Ternate, dan di Sunda-Ketjil.

Tidak lama lagi soal ini akan dibicarakan oleh Delegasi Indonesia dengan Belanda. Bagaimana hasilnja nanti, baik kita tunggu sadja.

Sementara itu baiklah kita ketahui, bagaimana reaksinja diluar Negeri akan hal ini. Menurut keterangan dari Missi Parleментар yang dipimpin oleh Dr. Sukiman dan Mr. Moh. Yamin yang baru sadja datang dari negeri Belanda, kita mendengar, bahwa mulanja masyarakat disana memang tidak menghendaki penggabungan Irian kedalam RI. Tetapi setelah Missi itu membikin penerangan2 disana, pendapat diatas lalu berubah. Singkatnja Missi itu yakin, bahwa dalam tahun ini djuga Irian pasti kembali bergabung dengan RI.

Berhubung dengan keterangan diatas, menurut AFP, Pemerintah Belanda di Den Haag mengeluarkan memorandum resmi yang isinja menjatakan, bahwa tidak mungkin Belanda akan menjerahkan kedaulatan atas Irian kepada Indonesia sebelum tgl 1 Djanuari 1951.

Selanjutnja lagi, AFP kabarnya menangkap desas-desus dari kalangan wakil2 Indonesia, bahwa wakil2 ini dikatakan, akan menjetudjui kalau masuknja Irian ke RI ditanda 3 bulan setelah 1 Djanuari 1951. Tetapi „desas-desus itu menurut „Antara“ segera dibantah oleh kalangan Pemerintah kita di Djakarta. Dikatakan bahwa, berita itu hanya untuk memantjing2 sadja. Dan lagi, hingga kini Delegasi untuk soal Irian itu belum disusun.

Disamping itu, Partai Komunis Nederland (CPN) djuga tidak menjetudjui kalau Irian masuk RI, harusnja Irian didjadian masalah Internasional, yang mana harus turut berunding RRT.

Adapun pendapat dan pendirian Australia tetap seperti yang sudah, sangat tidak menjetudjui Irian diserahkan kepada Indonesia.

Singkatnja, hal itu masih sulit, belum dapat kita anggap ringan akan penyelesaianja.

LUAR NEGERI.

KEDJADIAN2 dalam bulan ini menundukkan bahwa keadaan di dunia semakin bertambah genting. Pertempuran2 yang tadinya diharapkan segera dapat dipadamkan, malah meluas. Pertempuran2 yang lama belum padam disusul pertempuran2 yang baru. Pada umumnya timbulnya pertempuran2 itu ditempat dimana kaum kapitalis-imperialis berkuasa. Pertempuran yang bersifat membrontak. Membrontak karena tidak puas dengan system Pemerintahan yang dikuasai oleh kaum kapitalis-imperialis.

PORTO RICO.

PADA waktu yang hampir bersamaan waktu rumah Presiden Truman diserbu oleh orang2 Porto Rico yang bermaksud akan membunuh Presiden Truman, tetapi gagal, terdjadi juga pemberontakan di San Juan dll tempat di Porto Rico. Porto Rico adalah pulau djadjahan Amerika. Maksud dari pihak pemberontakan ini adalah agar pulau Porto Rico lepas dari tjengkeraman Amerika. Ingin menerimatah sendiri dan berdaulat sepenuhnya.

Jg mendjadi sasaran pemberontakan yang pertama kalinya rumahnja Gubernur. Gubernurnja akan dibunuh. Sementara itu mereka telah membunuh sebagian dari polisi2 dan membakar sebagian besar gedung2 dikota tersebut. Pertempuran terdjadi ± 24 djam. Korban dari kedua belah pihak terdapat 40 orang meninggal dan 34 luka2. 18 Orang pemberontak tertangkap. Pemberontak lainnya mengundurkan diri ke pegunungan2.

Kedjadian di Porto Rico ini dapat dianggap, bahwa Pemerintah Amerika mengadakan tindasan dalam lingkungannya sendiri.

FILIPINA.

HUKBALAHAK, jg artinja Tentara Rakjat anti Djepang, kini dirobah namanya mendjadi Hukbong Mapagpalayan ang Bayan, disingkat HMB. Artinja Tentara utk memerdekakan Rakjat. Dan lain nama ini dapat didjadiakan bukti bahwa di Filipina itu yang merdeka baru Negeranja, tetapi rakjatnja belum. Dalam nama itu pula gerakan rakjat berdjuaug di Filipina telah mengandung maksud untuk mentjapai kemerdekaan dan kedaulatan rakjatnja.

Pemerintah Phillipina telah berkali2 mengadakan pembersihan, tetapi hasilnya belum nampak. Bahkan kini gerakan itu bertambah giat, dan timbul disana sini. Pemerintah telah mendakwa bahwa aktiviteit gerakan tersebut dipimpin oleh Partai Komunis Fillipina. Karenanja kini beberapa orang anggota Partai Komunis ditangkapi.

KOREA.

PERANG di Korea yang tadinya oleh Mac Arthur di ramalkan akan segera dapat diselesaikan, kini malah

menghebat. Betul pasukan Mac Arthur telah dapat merebut ibu kota Pyong Yang dan kota2 besar lainnya, namun perlawanan Rakjat Korea tidak ada berhenti2nja.

Pemerintah R.R.T. yang tidak akan membiarkan sadja negara tetangganya di indjak2 oleh kaum penindas, telah 2 kali memperingatkan pada Mac Arthur jg diutjapkan oleh Chou En Lai. Peringatan itu maksudnja bahwa bila pasukan Mac Arthur djadi meliwati garis lintang 38 deradjat, Pemerintah R.R.T. akan mengambil tindakan yang tegas. Tiongkok ingin damai, tetapi tidak takut menentang agressor. Peringatan ini tidak bersifat gertakan sadja. Tetapi telah mendjadi kenjataan. Setelah pasukan Mac Arthur menerdjang garis lintang 38 deradjat, R.R.T. lalu mengirimkan tentara bantuannja ke tapal batas Manchuria—Korea, ditepi sungai Yalu. Ada sebagian pasukan Suka-rela dari Tiongkok telah ikut aktif bertempur dimedan pertempuran. Pengalaman rakjat Tiongkok dalam peperangan gerilja tidak dapat diabaikan begitu sadja. Serangan2 dari pasukan ini telah membikin kotjar-katjirnja pasukan Mac Arthur. Sehingga boleh dikata bahwa seluruh front pasukan Mac Arthur mengalami kemunduran.

Kedjadian yang demikian itu telah dipandang menguatirkan oleh Washington. Karena kekuatan ini Pemerintah mengadjukan permintaan kepada Dewan Keamanan P.B.B. agar soal interventi tentara R.R.T. di Korea jang berdasarkan laporan Mac Arthur dibitjarakan. Dewan Keamanan telah menerima usul tersebut. Dan soal itu telah dibitjarakan djuga. Hasil pembitjaran ialah menerima usul Inggeris, jaitu untuk mengundang wakil R.R.T. guna didengarkan keterangannya atas tuduhan Mac Arthur. Usul ini diterima dengan suara 8 menjokong, 2 melawan (Tiongkok Nasionalis dan Cuba), dan 1 blanco.

Delegasi R.R.T. yang dikirim ke P.B.B. diketuai oleh djendral Wu Hsu Chuan. Barangkatnja melalui Moskow dan Praha.

MESIR BERGOLAK.

MESIR menuntut kepada Inggris supaya: tentaranya jang menduduki

terusan Suez ditarik, dan Sudan (didarah sungai (Nil) yang masih didjadjah Inggris itu digabungkan dengan Mesir.

Anasir2 jang memperkuat dan membantu tuntutan itu ialah: demonstrasi mahasiswa besar2an „Anti Inggris“, utjapan P.M. Syria Nazim Kudsi jang memihak Mesir, dan pernyataan Ismail el Azhari ketua partai Assigga di Khartum (Sudan) kepada Inggris jang menjokong statement Radja Farouk jang berisi tuntutan diatas.

Tetapi sajang, disamping itu ada djuga anasir2 jang melemahkan, jaitu: Menteri D.N. Fuad el Din Pasha' mengemukakan negara dalam keadaan bahaya dan melarang semua demonstrasi, Menteri L.N. Saleh el Din Bey bersedia akan berunding dengan Inggris untuk bikin perdjandjian baru.

Disamping itu Amerika djuga turut tjampur, mengandjurkan supaya hal itu diselesaikan dengan djalan damai. Ini disebabkan karena Amerika djuga punya banyak kepentingan disana. Strategis pentingnja terusan Suez jang menghubungkan lautan Tengah dengan Samudra India, dan ekonomis untuk mendjaga keamanan tambang2 minyaknja di Arabia bila ada kemungkinan terdjadinja bentrokan antara Lembaga2 Arab dengan Inggris.

KONGRES PERDAMAIAN DUNIA.

MULANJA akan diselenggarakan di London. Tapi karena Pemerintah Inggris menolak masuknja beberapa utusan terkemuka diantara pengundjung2 Kongres itu, maka oleh para Anggota Kongres, tempatnja dipindahkan ke Warsawa ibu kota Polandia.

Putusan Kongres itu diantaranya: mendirikan badan organisasi dunia bernama Dewan Perdamaian Dunia, terdiri dari Anggota2 wakil2 rakjat seluruh dunia baik dari negara2 merdeka, setengah djadjahan atau djadjahan. Tugasnja mengawasi Persatuan Bangsa2. Usahanja sekarang antara lain: supaya, dilarang adanya sendjata atoom, pengurangan sendjata umum dengan pengawasan keras, menentang dipersendjatainja kembali Djepang dan Djerman, perang Korea supaya diakhiri dengan damai, pemberhentian intervensi Amerika di Korea dan permusuhan di Indo China. Dan lain2nja lagi.

Sudah barang tentu Amerika tidak senang melihat adanya badan diatas, karena hal itu akan mendjadiakan rintangan baginja.

pitalisme nasional yang progressief ini dinamakan masyarakat demokrasi rakyat. Karena itu revolusi nasional demokrasi bordjuis, didalam zaman imperialisme atau zaman revolusi proletar ini dinamakan pula revolusi demokrasi rakyat. Tiap revolusi demokrasi rakyat adalah bagian daripada revolusi dunia yang anti-imperialis, dan sebaliknya tiap revolusi itu mesti membantu pergerakan imperialisme, dan karena itu merupakan kontra-revolusi.

KAUM TANI SEBAGAI SEKUTU DARIPADA KLAS PEKERDJA.

KARENA revolusi demokrasi rakyat menjadi bagian daripada revolusi dunia yang anti-imperialis, maka ia mesti menudju kearah revolusi sosialis. Oleh sebab itu sjarat mutlak untuk menyelesaikan kuadriban2 revolusi demokrasi rakyat ialah adanya pimpinan revolusi ditangan klas buruh dengan perantaraan partai klas buruh. Sebab klas pekerdja adalah klas yang paling konsekwen anti-imperialis, klas yang terdisiplin dan yang paling mudah diorganisasi dalam bentuk perdjjoangan internasional. Sjarat yang kedua ialah adanya persekutuan antara kaum tani dan klas pekerdja, sebab kaum tani merupakan golongan terbesar dalam masyarakat djadjahan, setengah djadjahan dan setengah feodal, yang paling menderita dibawah system perbudakan feodalisme. Sjarat ketiga ialah adanya persatuan antara klas pekerdja, kaum tani dan lain2 golongan tertindas ja itu bordjuasi nasional (golongan pertengahan) dan golongan bordjuis ketjil (pedagang ketjil, pengusaha kerajinan tangan didesa2 dan dikota2, pegawai negeri, kaum intelektual dan peladjar dan pekerdja2 bebas) yang progressief, dalam bentuk Front Persatuan Nasional jg anti-imperialis diatas dasar persekutuan klas pekerdja dan kaum tani.

Pengalaman dalam perdjjoangan kemerdekaan nasional diluar negeri menunjukkan, bahwa tenaga kaum tani merupakan tenaga yang pokok dalam revolusi nasional. Klas pekerdja tidak mungkin dapat melaksanakan pimpinan revolusi djika tidak dapat menarik kaum tani kesifat2 revolusioner. Dan terbawa oleh watak2nja, maka kaum tani hanya bisa memihak kepada klas pekerdja apabila klas pekerdja bisa meyakinkan kaum tani, bahwa tujuan perdjjoangan klas pekerdja chusunya dan tudjuan revolusi umumnya adalah tudjuan daripada perdjjoangan kaum tani djuga, dan apabila klas pekerdja bisa menunjukkan dengan bukti2 yang njata, bahwa hasil revolusi menjadi hasil daripada perdjjoangan kaum tani djuga. Oleh

sebab itu persekutuan antara klas pekerdja dan kaum tani hanya bisa menjadi kuat dan mendalam, apabila revolusi nasional berputar disekitar revolusi agraria. Zonder adanya revolusi agraria sebagai pusat pendorong revolusi nasional, maka mustahil kaum tani akan ikut serta dalam revolusi difihaknja klas pekerdja, sebaliknya kaum tani malahan bisa menjadi sekutu dari kaum imperialis dan langsung atau tidak langsung menjadi musuhnja klas pekerdja.

Pendapat orang bahwa revolusi agraria bisa melemahkan Front Persatuan Nasional adalah pendapat yang keliru. Pengalaman diluar negeri menunjukkan, bahwa persatuan nasional anti-imperialis djustru menjadi kuat karena klas pekerdja berhasil membangkitkan kaum tani untuk melawan tuan2 tanah dan mengadakan perobahan2 agraria yang radikal. Dan sebaliknya tiap2 „Front Persatuan Nasional“, yang tidak berdasarkan kepada persekutuan yang kuat antara klas pekerdja dan kaum tani mesti lemah dan hanya merupakan gerombolan orang2 bagian atasan sadja, yang pada hakekatnja „berdjjoang“ untuk kepentingan diri sendiri. Pengalaman pahit di Indonesia telah membuktikan kebenarannya hal ini. Tiap kali dibentuk persatuan nasional atau persatuan perdjjoangan hanya membawa akibat sebaliknya dari apa, yang kita harapkan. Bukan persatuan yang kita tjapai, tetapi perpetjahan jg lebih hebat dikalangan kita sendiri.

PERDJJOANGAN TANI REVOLUSIONER DILUAR NEGERI.

PERGERAKAN revolusi Tiongkok, yang sedjak tahun 1927 mulai meluas menjadi gerakan revolusi agraria, makin menjadi kuat dan mendalam pengaruhnja dikalangan rakyat terbanjak, hingga dalam tempo yang singkat sudah bisa meliputi puluhan djuta rakyat tani jg tertindas. Tentara Merah Tiongkok yang kemudian menjelma menjadi Tentara Kemerdekaan Rakyat dibentuk dari kaum gerilja petani, yang merupakan inti daripada Front Persatuan Nasional Tiongkok dibawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok. Dan Tentara Kemerdekaan Rakyat, yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok dan disokong oleh seluruh rakyat Tiongkok inilah yang dapat mewujudkan kekuatan demokratis didaerah2 yang telah dibebaskan dari pengaruh kekuasaan fasis Djepang dan akhirnya memerdekakan seluruh rakyat Tiongkok dari penindasan pemerintahan reaksioner Chiang Kai Shek. Dalam tempo k.l. 4 tahun akhir2 ini Tentara Kemerdekaan Tiongkok telah dapat membasmi 8,5 djuta tentara reaksioner. Kemenangan gemilang yang telah diperoleh

oleh Tentara Kemerdekaan ini disebabkan karena Partai Komunis berhasil untuk membentuk Front Nasional bersendjata diatas dasar persekutuan antara klas pekerdja dan kaum tani dan terlaksananya program agraria yang menguntungkan kaum tani miskin, tani ketjil dan menengah. Dengan kemenangan revolusi Tiongkok itu, maka kaum tani Tiongkok dalam sedjarah revolusi kemerdekaan bangsa2 yang terdjadjah mempunyai arti yang sangat penting dan merupakan tjambuk bagi perdjjoangan tani dinegeri2 terdjadjah untuk lebih mempererat persekutuannya dgn klas pekerdja.

PERGERAKAN rakyat Vietnam jg pada bulan September tahun 1945 telah berhasil untuk melahirkan Republik Demokrasi Vietnam, berbentuk dalam Front Nasional anti-imperialis, klas pekerdja, kaum tani miskin, ketjil dan sedang, penduduk miskin dikota2 dan didesa2, pengusaha pertukangan, kaum modal sedang dan ketjil, dan kaum peladjar. Tentara tetap Republik Demokrasi Vietnam, jg buat sebagian besar terdiri dari petani miskin, berdjumlah 150.000 orang dan dibantu langsung oleh k.l. 300.000 gerilja. Berkat persatuan antara tentara dan rakyat dan berhasilnja gerakan revolusi agraria, perlawanan rakyat Vietnam terhadap kaum agressor imperialis Perantjis dan pemerintah boneka Baodai yang korrupt itu, makin lama makin bertambah kuat, hingga menggonggongkan seluruh dunia imperialis. Pembagian tanah kepada petani miskin telah dikerdjakan oleh pemerintah Vietnam, sewa tanah yang dulu dibayar dengan duapertiga hasil panen telah diturunkan menjadi separo, dan penghisapan menurut system lintah darat telah dilarang. Kini rakyat Vietnam yang buat sebagian besar terdiri dari tani miskin sedang melanjutkan perlawanan sengit untuk mengusir imperialisme Perantjis.

DI Filipina kekuatan daripada kubu demokrasi yang dipelopori oleh Front Nasional Tani makin lama bertambah besar pengaruhnja. Hukbalahab yang didirikan dalam tahun 1942 oleh Front Nasional Anti-fasis pada tahun 1945 ditaksir kekuatannya 70.000 orang lelaki dan wanita bersendjata. Dalam bulan Agustus tahun 1948 kekuatan itu telah bertambah menjadi 200.000 orang. Hukbalahab merupakan inti daripada Front Persatuan Tani yang sekarang mempunyai tidak kurang dari satu djuta anggauta petani. Perlawanan Front Nasional Tani dan Hukbalahab terhadap pemerintah Quirino dan imperialisme Amerika tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan sendjata. Ini disebabkan karena Hukbalahab dapat menggabungkan per-

duangan anti imperialis dengan per-
juangan untuk mengadakan pe-
robahan2 agraria yang menguntungkan
rakjat buruh dan tani. Sambil bertempur
melawan tentara reaksioner, Hukbalahab
mendjalankan program agraria yang re-
volusioner itu. Tanah2 milik tuan tanah
yang menjadi musuhnja rakjat banjak,
dibeslah dan dibagi2kan kepada petani
miskin, dan peraturan2 yang masih ber-
bahu feodal dan kolonial diganti dengan
peraturan2 baru yang meringankan be-
ban hidup rakjat tani.

GERAKAN tani di India dalam ga-
ris besarnja dapat dibagi menjadi
tiga golongan, jaitu gerakan tani revo-
lusioner yang dipengaruhi oleh perdj-
oangan buruh, gerakan tani Islam, dan
gerakan tani yang mengikuti „Gandhi-
isme“. Persekutuan antara klas buruh
dan tani di India diperkuat oleh adanya
golongan buruh pertanian dan perke-
bunan yang sangat kuat di India.

Perdjjoangan massa tani India menen-
tang kekuasaan tuan2 tanah dan penin-
dasan kedjam daripada imperialisme
Inggris, sudah timbul sedjak permulaan
abad kesembilan belas dan meliputi ling-
kungan yang sangat luas. Akan tetapi
gerakan tani setjara besar-besaran dan
teratur baru kita lihat di India dari tahun
1918 hingga tahun 1922.

Berkat pengaruh perdjjoangan klas
buruh dan Partai Komunis India, maka
selama perang dunia II, timbullah orga-
nisasi2 persatuan tani (kisan sabhas)
yang terutama selama periode setelah
perang memperkuat dari dalam Persa-
tuan Organisasi Tani Seluruh India.
(All-Indian Kisan Sabha), sekarang
menjadi pelopor perdjjoangan kaum tani
India.

Tidak lama setelah selesai perang
dunia II, timbullah pemberontakan didae-
rah2 Timur dan Utara Propinsi Bengal
dari penjewa2 tanah yang menuntut kpd
tuan2 tanah supaya mengurangi sewa ta-
nah yang berupa hasil panen.

Dibeberapa distrik daerah Bihar dan
Orissa dan di Punjab Barat telah timbul
perbentusan langsung antara polisi dan
rakjat tani, yang menentang tindakan2
tuan2 tanah untuk mengusir penjewa2
tanah.

Di daerah2 Madras, Heyderabad, Bi-
har dan Telengana beberapa kali telah
terdjadi pemberontakan rakjat tani,
yang menuntut pensitaan tanah dari tu-
an2 tanah. Di Telengana 2500 desa telah
berhasil untuk membagi2 tanah kepada
petani miskin. Dalam bulan September
1948 pemerintah India mengirimkan ten-
tara untuk menindas pemberontakan itu.

Menurut keterangan „Press Of India“
maka selama enam bulan permulaan ta-

hun 1949 didaerah yang disebut „United
Provinces“ sadja telah timbul 2057 kali
pemberontakan rakjat tani hingga me-
ngakibatkan „kekacauan“ yg maha hebat.

SEMENDJAK berahirnja perang
dunia II di Malaya berkobar pe-
rang kolonial, yang oleh imperialisme
Inggris disebut „aksi politonil“ untuk
membasmi gerakan rakjat bersendjata
Malaya. Pada akhir tahun 1948 Inggris
mengirimkan sedjumlah 50.000 tentara
kolonial bersendjata lengkap dan modern
untuk menggempur gerilja rakjat Malaya
yang kekuatannja k.l. 5000 orang ber-
sendjata. Kini kabarnya kekuatan tentara
Inggris itu sudah meningkat menjadi
lebih dari 75.000 orang. Walaupun begi-
tu rupanja tentara imperialisme Inggris
yang disokong oleh imperialisme Amerika
tidak berhasil menindas gerakan kemer-
dekaan rakjat Malaya, yang dipelopori
oleh pasukan2 gerilja rakjat.

Kemenangan2 yg mengagumkan dari-
pada tentara rakjat Malaya itu disebab-
kan karena adanya persatuan yang kuat
antara tentara dan rakjat, buruh, buruh
perkebunan dan perusahaan pertanian,
golongan tani miskin dan pemuda rakjat
Malaya, dibawah pimpinan partai klas
buruh.

Bahwa kaum tani memainkan rol yang
penting djuga dalam perdjjoangan kemer-
dekaan rakjat Malaya, dapat kita buktikan
dari sebuah manifes, yang ditanda-
tangani oleh *Organisasi Pemuda Pedjo-
ang, Organisasi Persatuan Tani dan Per-
satuan Wanita Malaya*, yang berbunyi:
„Imperialis Inggris telah memperlihat-
kan tjara2 faschis dalam menindas rak-
jat, membombardir desa2 dan menga-
singkan para patriot Malaya keluar ne-
geri..... Walaupun perdjjoangan rakjat
Malaya melawan imperialisme Inggris
akan memakan banjak waktu, namun ke-
menangan adalah pasti difihak rakjat,
karena imperialis Inggris makin bertam-
bah lemah, sedangkan kita makin bertam-
bah kuat, sebab perdjjoangan kita
adalah merupakan peperangan revolusi-
oner untuk kemerdekaan „negara“ dan
rakjat“.

DI ALAIN2 negeri djadahan atau
setengah djadahan seperti di *Irak, Iran, Siria, Libanon, Turki, Mesir dan negeri2 Arab lainnja*, dimana perdj-
joangan klas pekerdja berhubung dengan
sangat banjakknja kesulitan2 yang diha-
dapi oleh klas pekerdja gisana, belum
bisa memelopori perdjjoangan kemerde-
kaan nasional dengan terang-terangan,
terbukti bahwa perdjjoangan tani djuga
sangat lemah, dan sangat dipengaruhi
oleh anasir2 feodalisme dan nasional-
reformis. Ini adalah suatu bukti, yang me-
mundukkan betapa pentingnja perdj-

joangan klas pekerdja bagi kaum tani.
Ini adalah suatu bukti bahwa kaum tani
tidak mungkin mentjapai kebebasan dari
penindasan feodalisme dan imperialisme
dengan tidak adanya perdjjoangan klas
pekerdja yang kuat.

PERDJJOANGAN TANI DI INDONESIA.

WALAU PUN Indonesia merupakan
negeri agraria, yang penduduknja
85 persen terdiri dari kaum tani, akan
tetapi pengalaman dalam perdjjoangan
nasional kita, memberi bukti2 tjukup baha-
wa kaum tani belum pernah mengorga-
nisir diri dalam organisasi klas yg mem-
punjai program agraria yang njata. Ini
disebabkan karena kurang sadarnja klas
pekerdja Indonesia tentang pentingnja
rol kaum tani dalam revolusi kemerdekaan
nasional, sebagai sekutu yang pokok
daripada klas pekerdja dan djuga karena
tindakan2 terror daripada pendjajah Be-
landa dan faschis Djepang terhadap orga-
nisasi2 revolusioner, terutama organisa-
si buruh dan tani.

Didalam zaman kemerdekaan pun ter-
njata bahwa tjorak organisasi2 tani ma-
sih belum tegas, walaupun kaum tani te-
lah mengambil bagian yang aktif dalam
perdjjoangan revolusioner selama lima
tahun merdeka ini. Tidak sedikit djasa2
dan pengorbanan2 yang telah diberikan
oleh kaum tani selama berkobarnja api
revolusi dulu pada akhir tahun 1945 dan
selama perang kolonial pertama dan ke-
dua.

Berkat pengalaman2 selama revolusi
ini, maka kaum tani Indonesia telah mu-
lai menjadi insjaf dan sadar akan pen-
tingnja adanya organisasi tani yang tegas
tjorakknja dalam mewakili kepentingan2
golongan tani miskin, buruh tani dan tani
ketjil. Dan klas pekerdja sendiripun su-
dah bertambah kesadarannja tentang rol
kaum tani sebagai sekutu daripada klas
pekerdja. Partai klas buruh Indonesia,
P.K.I. sudah mulai menjtjurahkan perha-
titan dan tenaganja untuk mengorganisasi-
kaum tani dalam bentuk2 perdjjoangan
tani revolusioner.

Disamping R.T.I. yang sedjak semula
telah mengakui partai klas buruh seba-
gai pemimpin revolusi, B.T.I. pun dalam
kongresnja terahir telah menegakkan
pendiriannja dengan merobah anggaran
dasarnja yang reformistis menjadi an-
garan dasar yang progressief. Disamping
B.T.I. dan R.T.I. masih ada lain2 orga-
nisasi tani, seperti Sakti, Petani, S.T.I.I.
dan organisasi2 tani yang bersifat keda-
erahan.

Kuadjabian kaum tani yang sekarang
telah mengorganisasi diri didalam ber-
matjam2 organisasi2 itu ialah untuk mem-
bentuk Front Nasional Tani yang revo-

lusioner. Badan Permusjawaratan Tani yang telah didirikan di Djakarta belum lama berselang ini tidak bisa membawa kaum tani kesifat revolusioner, oleh sebab badan itu merupakan gabungan yang tidak berdasarkan atas program yang konkret, tetapi semata2 berdasarkan kepada keputusan2 yang diambil oleh suara bulat. Jadi dalam prakteknya badan itu menjadi impotent, karena peraturan2 yang mengikatnya itu.

Organisasi persatuan kaum tani hanya bisa memenuhi tugasnya sedjarah apabila :

(a) sanggup mengakui partai klas buruh sebagai pelopor dan pemimpin revolusi,

(b) mempunyai program agraria yang radikal, dan

(c) bersama2 dengan klas pekerdja menjadi inti dan pendorong daripada *Front Persatuan Nasional* anti-imperialis, yang meliputi golongan2 masyarakat lainnya yang progressief, yaitu *golongan pertengahan, golongan pengusaha modal kecil, penduduk miskin dikota2, pegawai negeri, peladjar, wanita dan pemuda.*

Dalam melaksanakan sjarat2 ini, perlu diperhatikan beberapa hal, untuk meyakinkan golongan2 yang belum mau insjaf akan perlunya adanya persekutuan antara klas pekerdja dan kaum tani.

Pendapat golongan2 atau orang2 bahwa klas buruh Indonesia tidak bisa memimpin Front Persatuan Nasional yg anti-imperialis, karena klas proletariat Indonesia tidak begitu kuat, adalah salah.

Walaupun susunan klas proletariat Indonesia tidak begitu maju djika dibandingkan dengan klas proletariat dinegeri2 kapitalis, akan tetapi ada banyak faktor yang memungkinkan klas pekerdja dengan kaum tani sebagai sekutunya pokok, untuk memegang hegemoni dalam revolusi ini.

Pertama, pengalaman2 perdoangan buruh selama k.l. 30 th ini telah membawa kesadaran klas buruh kepada tingkat yang lebih tinggi;

Kedua, persatuan antara buruh dan tani diperkuat oleh adanya golongan buruh-tani, buruh perkebunan, perusahaan-ondermeling dan pertanian Barat dan buruh-berkala;

Ketiga, pengalaman kaum tani sendiri selama revolusi ini telah menambah rasa solidariteit antara buruh dan tani;

Keempat, keadaan umum yang agak lebih baik daripada keadaan dulu dalam zaman pendjadjahan Belanda dan fascis Djepang, terutama adanya kesempatan untuk mempelajari teori2 tentang perdoangan buruh; dan

Kelima, situasi internasional, yang ma-

kin lama makin menguntungkan perdoangan revolusioner rakyat Indonesia.

PROGRAM agraria harus disusun menurut hasil penindjauan dan penjelidikan yang teliti tentang keadaan masyarakat tani di Indonesia sendiri, dan sekali2 idak boleh didasarkan kepada pengalaman diluar negeri semata2. Sebagai dasar untuk menjusun program agraria itu dapat dipakai falsaf 38 U.U.D. R.I. sekarang, dan „Program Nasional“, yang telah disetujui oleh bagian terbanyak dari golongan2 masyarakat kita.

Dalam usaha kita untuk membentuk Front Nasional Tani yang revolusioner itu, maka sudah barang tentu B.T.I. dan R.T.I. harus menjadi pelopornya. Untuk ini maka B.T.I. dan R.T.I. mesti mengkonsolidir dulu organisasinya masing2, dan kemudian memberi lonto kepada lain2 organisasi bagaimana tjara2 mempersatukan tenaga tani nasional. Selama B.T.I. dan R.T.I. belum bisa bersatu dalam satu persatuan organisasi, selama itu, sukanlah kiranja untuk membentuk Front Nasional Tani, yang menjadi inti daripada Front Persatuan Nasional yang anti-imperialis.

Demikianlah gambaran daripada apa yang harus dikerdjakan oleh B.T.I. dalam mengindjak usianja 6 tahun ini.

Sudahkah Tuan-Tuan disamping berlangganan

surat kabar harian djuga menjadi warga :

„TEMPO“ ?

Isinja : ● Hangat ● Progressif ● Revolusioner ● Critis

Langganan sebulan :..... f 5,60.

3 bulan :..... f 15,60.

Etjeran senomer :..... f 1,50.

Advertensi ketjil :..... f 20,—.

Berhubungan dengan Agen2 kita tersebar diseluruh Indonesia atau kepada :

14—8/9—R.

TATA USAHA Bubutan 87 — Post 60 × 98 — Surabaya.

SURJA - TJANDRA

Satu-satunya Madjallah Mingguan bahasa Daerah (Djawa) yang terbesar di Djawa-Tengah. Setiap terbit memuat karangan-karangan : pengetahuan Umum populer serta berita-berita hangat dalam dan luar negeri. Diusahakan oleh „BRAMANA“ dan staf yang berpengalaman.

Harga langganan R 0,75 senomer, sedikitnja 4 nomor.

Nomer lepas R 1,—.

Alamat Red. & Adm. MARGOMULJO — JOGJAKARTA.

16—8/9—R.